



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN
TAHUN 2025-2029**



H. Herman Deru

Gubernur Sumatera Selatan



H. Cik Ujang

Wakil Gubernur Sumatera Selatan

“Sumatera Selatan Maju Terus Untuk Semua”



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029.

Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 yang berisi tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJPD Provinsi Sumatera Selatan

Untuk itu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan menetapkan tujuan yaitu meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan yang dijabarkan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2025-2029.

Akhirnya, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dan membantu dalam penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 ini, semoga rencana strategis ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan dalam penyusunan kegiatan, sehingga terjadi harmonisasi dan keterpaduan langkah dalam mewujudkan Visi Sumatera Selatan Maju Terus Untuk Semua.

Palembang, 29 September 2025

**KEPALA BAPPEDA
PROVINSI SUMATERA SELATAN,**

REGINA ARIYANTI, S.T.
Pembina Utama Madya (IV/c)
NIP. 196712042002122003



DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU	
STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	8
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	8
2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	8
2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	22
2.1.3. Kinerja Pelayanan Bappeda Provinsi Sumatera	
Selatan	41
2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan Bappeda Provinsi	
Sumatera Selatan	47
2.1.5. Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian	
Pelayanan	48
2.1.6. Dukungan BUMD dalam Pencapaian	
Perangkat Daerah	50
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis	52
2.2.1. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	
Bappeda Provinsi Sumatera Selatan	52
2.2.2. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas	
dan Fungsi Pelayanan Bappeda Provinsi	
Sumatera Selatan	56
2.2.3. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah	
Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	57
2.2.4. Telaahan Keterkaitan Kajian Lingkungan Hidup	
Strategis dengan Tugas dan Fungsi Pelayanan	
Bappeda Provinsi Sumatera Selatan	59
2.2.5. Penentuan Isu Strategis	62



BAB III	TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN	63
		
3.1.	Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029	63
3.2.	Strategi Bappeda Provinsi Sumatera Selatan Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029	67
3.3.	Arah Kebijakan Bappeda Provinsi Sumatera Selatan Dalam Mencapai Tujuan Dan Sasaran	68
BAB IV	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN	70
4.1.	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	70
4.2.	Uraian Sub Kegiatan Berserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif	101
4.3.	Struktur Anggaran APBD Bappeda Provinsi Sumatera Selatan	136
4.4.	Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	136
4.5.	Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah.....	142
4.6.	Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) Bappeda Provinsi Sumatera Selatan	143
BAB V	PENUTUP	146



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Rekapitulasi Jumlah Pegawai ASN Bappeda Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025.....	22
Tabel 2.2 Rekapitulasi Pegawai Bappeda Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Golongan Tahun 2025	22
Tabel 2.3 Rekapitulasi Jumlah Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Bappeda Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025	23
Tabel 2.4 Jabatan Pelaksana Berdasarkan Evaluasi Jabatan Tahun 2025	24
Tabel 2.5 Jabatan Fungsional Berdasarkan Evaluasi Jabatan Tahun 2025	25
Tabel 2.6 Rencana Diklat tahun 2025-2029	29
Tabel 2.7 Daftar Aset Bappeda Provinsi Sumatera Selatan	38
Tabel 2.8 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah BAPPEDA SUMSEL	43
Tabel 2.9 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2024.....	46
Tabrl 2.10 Analisis SWOT.....	53
Tabel 2.11 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	56
Tabel 2.12 Isu Strategis Perangkat Daerah	62
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Bappeda Provinsi Sumatera Selatan.....	64
Tabel 3.2 Penahapan Renstra Perangkat Daerah	67
Tabel 3.3 Arah Kebijakan Renstra dan Strategi.....	68
Tabel 4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Selatan.....	71
Tabel 4.2 Rencana/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Dan Pendanaan	101
Tabel 4.3 Struktur Anggaran Apbd Bappeda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2030.....	136
Tabel 4.4 Daftar Kegiatan dan Subkegiatan dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	137
Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah.....	142
Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci (indikator program).....	143



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Keterkaitan dan Tahapan Penyusunan Renstra SKPD berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2022	2
Gambar 2.1	Struktur Organisasi BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan.....	9
Gambar 2.2	Kebutuhan Pegawai (Data per September 2025)	24
Gambar 2.3	Pejabat Struktural Bappeda yang telah mengikuti Diklat Kepemimpinan	27
Gambar 2.4	Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Diklat tahun 2025	28
Gambar 2.5	Data Pegawai Bappeda yang akan Pensiun 5 Tahun Ke depan (Data per Januari 2025).....	31
Gambar 2.6	Screenshot Tampilan Aplikasi Dashboard SDGs	32
Gambar 2.7	Screenshot Tampilan Aplikasi SIPD-RI dan SIPD-Penatausahaan	33
Gambar 2.8	Screenshot Tampilan Aplikasi SIGertak.....	34
Gambar 2.9	Screenshot Tampilan Aplikasi Srikandi dan E-Bappeda	35
Gambar 2.10	Screenshot Tampilan Aplikasi Sistem Informasi Geoportal	36
Gambar 2.11	Aplikasi SIAP Tanjak	37



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah menerapkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Setiap Perangkat Daerah (PD) harus memiliki Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Rencana Strategis Perangkat Daerah disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi daerah serta tujuan setiap organisasi pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah yang merupakan unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, maka Renstra Bappeda Tahun 2025-2029 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029.

Rencana Strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah. Dokumen Renstra pada dasarnya menjabarkan suatu rencana strategis yang erat kaitannya dengan proses menetapkan arah, tujuan dan masa depan yang akan dicapai lima tahun mendatang secara komprehensif untuk mencapai tujuan, mengarahkan pengambilan keputusan serta berbagai tindakan dengan menghubungkan sumber daya dan dana dengan tujuan yang ingin dicapai oleh suatu institusi pemerintahan.



Adapun fungsi dari Renstra adalah untuk memudahkan melakukan kontrol terhadap semua aktifitas baik yang sedang berjalan maupun yang akan datang, dapat mengukur *outcome* (hasil) yang harus dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas.

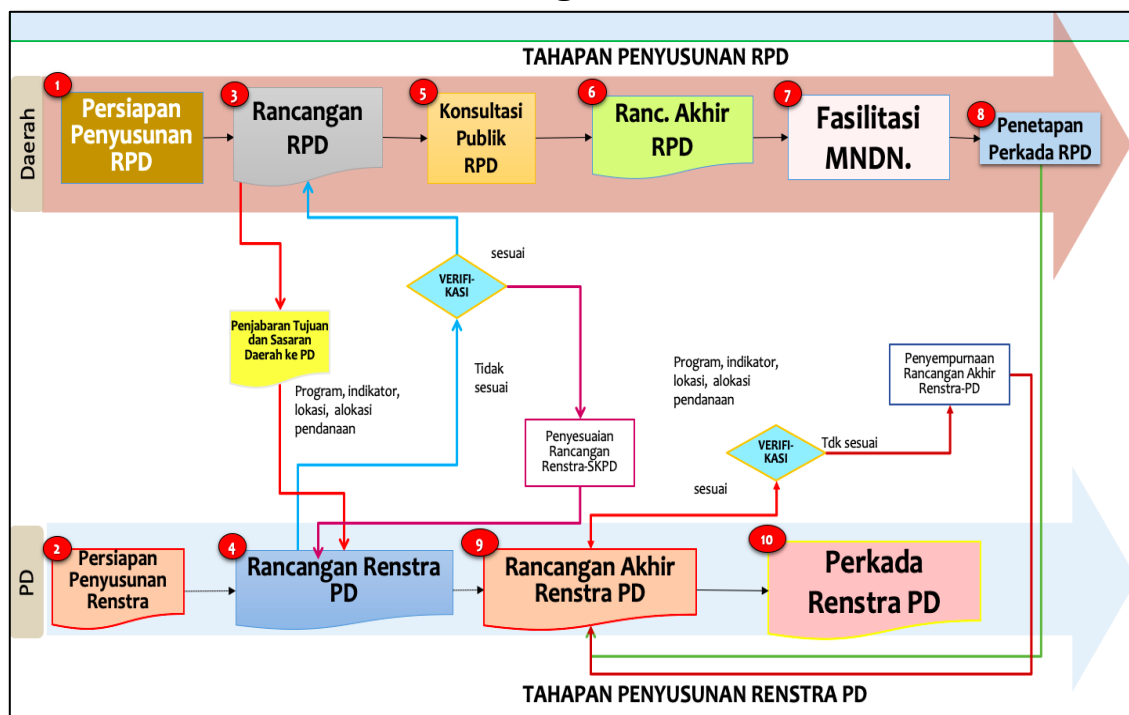
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, sebagai unsur pelaksana pemerintah provinsi di bidang perencanaan pembangunan daerah, mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan di Sumatera Selatan berjalan dengan baik dengan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi, sehingga memberikan kontribusi kepada pencapaian visi dan misi pembangunan daerah.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, maka sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 25 Tahun 2018, maka Bappeda mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan pemerintahan provinsi di bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan.

Proses penyusunan Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 dilakukan melalui tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal renstra, penyusunan rancangan renstra, pelaksanaan forum perangkat daerah, penyusunan rancangan akhir renstra, hingga penetapan Renstra.

Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra Bappeda Tahun 2025-2029 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sebagaimana Gambar berikut.

Gambar 1.1
Keterkaitan dan Tahapan Penyusunan Renstra SKPD
berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2022



1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 berdasar pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 Ayat 6 tentang Pemerintahan Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan;
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);



- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- f. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- g. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
- h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);



- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- l. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- m. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
- n. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- o. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 6);
- p. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2024);
- q. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2025); dan
- r. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 71), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 Nomor 25);



1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renstra Badan Perencanaan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun 2025-2029 yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sesuai dengan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029.

Tujuan dari penyusunan Renstra Badan Perencanaan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut:

- a. memberikan arahan tujuan, sasaran, strategis, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu 5 tahun (2025-2029), dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029;
- b. menyediakan tolak ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu 5 tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam pengendalian dan evaluasi kinerja Badan Perencanaan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan; dan
- c. memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan dalam kurun waktu 5 tahun (2025-2029).

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Selatan ini ditulis dengan susunan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang.
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH



2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah

2.1.5. Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Pelayanan

2.1.6. Dukungan BUMD dalam Pencapaian Perangkat Daerah

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis

2.2.1. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

2.2.2. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

2.2.3. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

2.2.4. Telaahan Keterkaitan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dengan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD

2.2.5. Penentuan Isu Strategis.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029

3.2 Strategi Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029

3.3 Arah Kebijakan Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Selatan

4.2 Struktur Anggaran APBD Bappeda Provinsi Sumatera Selatan



- 4.3 Uraian Sub Kegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah
- 4.4 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah
- 4.5 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah

BAB V PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Tugas, fungsi dan struktur organisasi Bappeda Provinsi Sumatera Selatan diatur berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 14) dan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang mengalami perubahan melalui Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut :

a. Tugas

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Gubernur tersebut di atas, Kepala Badan mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan Pemerintahan Provinsi di bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah.

b. Fungsi

Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Gubernur tersebut di atas menegaskan bahwa untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala Badan mempunyai fungsi:

- 1) penyusunan kebijakan teknis dalam lingkup perencanaan pembangunan daerah;
- 2) pengkoordinasian, penyinkronisasian, penyusunan RPJPD, RTRW, RPJMD, dan RKPD;
- 3) pengkoordinasian, pengsinergian, penyinkronisasian perencanaan pembangunan antar SKPD dalam lingkungan Pemerintah Provinsi, lembaga/instansi vertikal, kabupaten/kota dan pemangku kepentingan lain yang berada dalam wilayah provinsi;
- 4) pengkoordinasian perencanaan kerjasama antar kabupaten/kota dalam provinsi, antar provinsi, dalam negeri dan luar negeri;

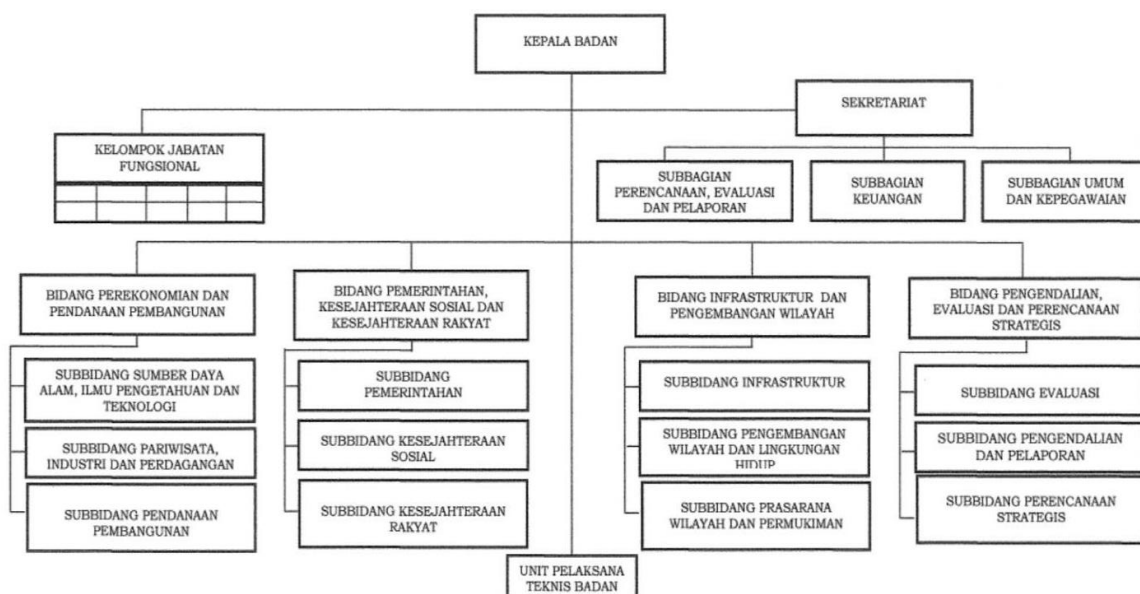


- 5) pengkoordinasian perencanaan dan pengembangan wilayah provinsi;
- 6) pelaksanaan pengendalian, pemantauan dan evaluasi pembangunan;
- 7) penyiapan bahan untuk penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) Gubernur di bidang pembangunan;
- 8) penyediaan data, informasi dan laporan hasil-hasil pembangunan yang sedang atau telah dilaksanakan;
- 9) pengkoordinasian penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/daerah;
- 10) pelaksanaan kegiatan tata usaha Bappeda; dan
- 11) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

c. Struktur Organisasi

Adapun susunan Struktur Organisasi Bappeda Provinsi Sumatera Selatan terdiri atas 1 (satu) orang pejabat eselon 2 (dua), 5 (lima) orang pejabat eselon 3 (tiga) dan 15 (lima belas) orang pejabat eselon 4 (empat).

Gambar 2.1
Struktur Organisasi BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan



Sumber: Peraturan Gubernur Sumber Selatan Nomor 71 Tahun 2016

a. Kepala Badan

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program kegiatan serta pelayanan administrasi, keuangan dan sumber daya di lingkungan Bappeda.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi:

- 1) penyusunan, pengkoordinasian dan pemantauan pelaksanaan rencana program/kegiatan/anggaran, pelaksanaan kegiatan administrasi/penatausahaan keuangan serta sarana dan prasarana kerja Bappeda;
- 2) penyiapan Renstra Bappeda yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan;
- 3) penyusunan Renja Bappeda dengan berpedoman kepada Renstra Bappeda memuat kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan;
- 4) penyusunan LAKIP Bappeda dan evaluasi renja Bappeda;
- 5) perencanaan pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya aparatur;
- 6) penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum, rumah tangga dan keprotokolan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Bappeda;
- 7) perencanaan dan persiapan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi serta Musrenbangda yang diselenggarakan Bappeda;
- 8) pengelolaan penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/daerah; dan
- 9) penyelenggaraan urusan keuangan Bappeda; dan
- 10) pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Untuk pelaksanaan fungsi tersebut, Sekretariat membawahi 3 (tiga) Subbagian:

- 1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, mempunyai tugas:
 - a) melakukan koordinasi penyusunan Renstra Bappeda yang membuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan;
 - b) melakukan penyiapan Renja Bappeda yang mempedomani Renstra, memuat kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan;
 - c) melakukan koordinasi, menyinkronisasikan dan memfasilitasi penyiapan program/kegiatan tahunan di lingkungan Bappeda;
 - d) mengisi data capaian kinerja Bappeda ke dalam aplikasi e-monev Provinsi;



- e) menyusun bahan LKPJ Bappeda;
 - f) menyusun LAKIP dan evaluasi Renja Bappeda;
 - g) menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah lingkup Bappeda;
 - h) menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja (PK) Bappeda;
 - i) melakukan penyiapan bahan evaluasi kinerja Bappeda untuk Kepala Bappeda;
 - j) mengelola website Bappeda; dan
 - k) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- 2) Subbagian Keuangan, mempunyai tugas:
- a) melakukan penyiapan bahan penyusunan anggaran Bappeda;
 - b) melakukan administrasi keuangan;
 - c) menyusun RKA Bappeda;
 - d) melakukan penyusunan, penatausahaan, verifikasi, dan pelaporan keuangan serta pengujian pembayaran;
 - e) menyiapkan laporan kemajuan fisik dan keuangan kegiatan-kegiatan di lingkungan Bappeda; dan
 - f) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- 3) Subbagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas:
- a) melakukan kegiatan penatausahaan surat menyurat dan administrasi perjalanan dinas;
 - b) melakukan urusan rumah tangga Bappeda;
 - c) melakukan kegiatan urusan kehumasan dan keprotokolan;
 - d) merencanakan dan mengelola kebutuhan perlengkapan kantor dan perpustakaan Bappeda;
 - e) melaksanakan penatausahaan dan pelaporan barang-barang inventaris;
 - f) menyelenggarakan segala sesuatu yang diperlukan tentang kebutuhan pengusulan pengangkatan, kenaikan pangkat, manajemen karir, mutasi, penggajian dan kesejahteraan pegawai;
 - g) menyelenggarakan administrasi kepegawaian, pengelolaan data dan informasi yang berkaitan dengan kepegawaian;

- h) merencanakan peningkatan dan pengembangan kemampuan dan keterampilan pegawai;
- i) melakukan penatausahaan pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/daerah;
- j) melaksanakan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU); dan
- k) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

c. Bidang Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan

Berdasarkan Pasal 9, 10, dan 11 Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Bidang Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyiapkan bahan untuk perumusan kebijakan dan penyusunan rencana program pembangunan di bidang perekonomian dan menggali sumber-sumber pendanaan untuk pembangunan provinsi. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan mempunyai fungsi:

- 1) pengkoordinasian penyusunan perancangan awal RPJPD, RPJMD, dan RKPD di bidang perekonomian dan pendanaan pembangunan;
- 2) pengkoordinasian penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang perekonomian dan pendanaan pembangunan sebagai bahan Musrenbang;
- 3) pengkoordinasian penyusunan rancangan akhir RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang perekonomian dan pendanaan pembangunan;
- 4) pemverifikasian rancangan Renstra dan Renja SKPD mitra di bidang perekonomian dan pendanaan pembangunan;
- 5) pengkoordinasian penyusunan IKU dan PK SKPD mitra di bidang perekonomian dan pendanaan pembangunan;
- 6) pengkoordinasian sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD di bidang perekonomian dan pendanaan pembangunan;



- 7) pengkoordinasian sinergitas dan harmonisasi program kegiatan SKPD Provinsi di bidang perekonomian dan pendanaan pembangunan;
- 8) pengkoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan kementerian/lembaga di provinsi dan kabupaten/kota di bidang perekonomian dan pendanaan pembangunan;
- 9) pengkoordinasian dukungan sumber-sumber pendanaan untuk perencanaan pembangunan di seluruh sektor;
- 10) pengkoordinasian pembinaan teknis perencanaan kabupaten/kota mitra bidang perekonomian dan pendanaan pembangunan; dan
- 11) pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Untuk pelaksanaan fungsi tersebut, Bidang Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan membawahi 3 (tiga) Subbagian:

1. Subbidang Sumber Daya Alam, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Subbidang Pariwisata, Industri dan Perdagangan; dan
3. Subbidang Pendanaan Pembangunan.

d. Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat

Uraian Tugas dan Fungsi Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat berdasarkan Pasal 12, 13, dan 14 Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan adalah membantu Kepala Badan dalam menyiapkan bahan untuk perumusan kebijakan dan penyusunan rencana program pembangunan di bidang pemerintahan, sosial dan kesejahteraan rakyat serta mengkoordinasikan dan mensinergikan program/kegiatan tujuan pembangunan berkelanjutan dan kemiskinan provinsi. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan rakyat mempunyai fungsi:



- 1) pengkoordinasian penyusunan rancangan awal RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang pemerintahan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan rakyat;
- 2) pengkoordinasian penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang pemerintahan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan rakyat sebagai bahan Musrenbang;
- 3) pengkoordinasian penyusunan rancangan akhir RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang pemerintahan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan rakyat;
- 4) pemverifikasian rancangan Renstra dan Renja SKPD mitra di bidang pemerintahan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan rakyat;
- 5) pengkoordinasian penyusunan IKU dan PK SKPD mitra di bidang pemerintahan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan rakyat;
- 6) pengkoordinasian sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD di bidang pemerintahan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan rakyat;
- 7) pengkoordinasian sinergitas dan harmonisasi program kegiatan SKPD Provinsi di bidang pemerintahan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan rakyat;
- 8) pengkoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan kementerian/lembaga di provinsi dan kabupaten/kota di bidang pemerintahan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan rakyat;
- 9) penganalisaan pencapaian indikator tujuan pembangunan berkelanjutan dan kemiskinan pada RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- 10) pengkoordinasian dan pensinkronisasian program/kegiatan tujuan pembangunan berkelanjutan dan kemiskinan;
- 11) pengkoordinasian pembinaan teknis perencanaan kabupaten/kota mitra bidang pemerintahan, sosial dan kesejahteraan rakyat; dan
- 12) pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Untuk operasional fungsi-fungsi tersebut, Kepala Bidang dibantu oleh:

- 1) Subbidang Pemerintahan;
- 2) Subbidang Kesejahteraan Sosial; dan
- 3) Subbidang Kesejahteraan Rakyat.

e. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Pada Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan pasal 15, 16, dan 17, Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyiapkan bahan untuk perumusan kebijakan dan penyusunan rencana program pembangunan di bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai fungsi:

- 1) pengkoordinasian penyusunan rancangan awal RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;
- 2) pengkoordinasian penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah sebagai bahan Musrenbang;
- 3) pengkoordinasian penyusunan rancangan akhir RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;
- 4) pengkoordinasian rencana tata ruang wilayah provinsi;
- 5) pemverifikasian rancangan Renstra dan Renja SKPD mitra bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;
- 6) pengkoordinasian penyusunan IKU dan PK SKPD mitra bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;
- 7) pengkoordinasian sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD di bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;
- 8) pengkoordinasian sinergitas dan harmonisasi program kegiatan SKPD Provinsi di bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;
- 9) pengkoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan kementerian atau lembaga di provinsi dan kabupaten atau kota di bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;
- 10) pengkoordinasian dan perumusan konsep pengembangan wilayah yang mengacu pada dokumen-dokumen perencanaan, seperti rencana tata ruang wilayah sehingga terjadi sinergi antara provinsi dengan provinsi tetangga dan kabupaten/kota;

- 11) pengkoordinasian penyusunan RKPD di bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;
- 12) pengkoordinasian penyusunan program infrastruktur berbasis pengembangan wilayah, kawasan strategis, perbatasan serta cepat tumbuh Provinsi;
- 13) pengkoordinasian penyusunan perencanaan transportasi;
- 14) pengkoordinasian penyusunan keterpaduan perencanaan program infrastruktur strategis Provinsi;
- 15) pengkoordinasian penyusunan perencanaan program DAK infrastruktur;
- 16) pengkoordinasian program infrastruktur melalui Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU);
- 17) pengkoordinasian penyusunan *roadmap* strategi pencapaian akses universal sanitasi, air minum dan kawasan kumuh;
- 18) penginternalisasian program Pengembangan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif (PPSIP) ke dalam dokumen perencanaan RPJPD, RPJMD, RKPD;
- 19) pengkoordinasian dan harmonisasi program pengelolaan sumber daya air;
- 20) pengkoordinasian pengendalian kebakaran hutan dan bencana alam;
- 21) pengkoordinasian penyusunan rencana aksi daerah pembangunan berbasis *landscape*; dan
- 22) pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Untuk operasional fungsi-fungsi tersebut, Kepala Bidang dibantu oleh:

- 1) Subbidang Infrastruktur;
- 2) Subbidang Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup; dan
- 3) Subbidang Prasarana Wilayah dan Permukiman.

f. Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Perencanaan Strategis

Menurut Pasal 18, 19, dan 20 Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Perencanaan Strategis mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam

menyiapkan bahan untuk perumusan kebijakan dan penyusunan rencana program pembangunan di bidang pengendalian, evaluasi dan perencanaan strategis, penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD/RKPD Perubahan, RKT, pengendalian dan evaluasi capaian kinerja pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah dan pengkoordinasian kerjasama antar daerah dan antar lembaga serta pengumpulan, pengelolaan, penyusunan, penganalisaan data dan informasi sebagai bahan perencanaan pembangunan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Perencanaan Strategis mempunyai fungsi:

- 1) pengkoordinasian penyusunan rancangan awal, rancangan dan rancangan akhir RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- 2) pemverifikasian rancangan Renstra dan Renja SKPD mitra bidang pengendalian, evaluasi dan perencanaan strategis;
- 3) pengkoordinasian penyusunan IKU dan PK SKPD mitra bidang pengendalian, evaluasi dan perencanaan strategis;
- 4) pengkoordinasian sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD bidang pengendalian, evaluasi dan perencanaan strategis;
- 5) pengkoordinasian sinergitas dan harmonisasi program kegiatan SKPD Provinsi bidang pengendalian, evaluasi dan perencanaan strategis;
- 6) pengkoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan kabupaten/kota bidang pengendalian, evaluasi dan perencanaan strategis;
- 7) pengkoordinasian pembinaan teknis perencanaan kabupaten/kota mitra bidang pengendalian, evaluasi dan perencanaan strategis;
- 8) penyusunan bahan capaian kinerja pembangunan tahun berjalan dan arah kebijakan tahunan;
- 9) pengkoordinasian hasil kesepakatan Musrenbang kabupaten/kota, provinsi dan nasional;
- 10) pengkoordinasian pengusulan program/kegiatan melalui e-Musrenbangnas;
- 11) penyusunan rancangan awal, rancangan dan rancangan akhir RPJPD, RPJMD, RKPD/RKPD Perubahan dan RKT;



- 12) penyusunan IKU dan PK Provinsi;
- 13) pengelolaan *e-planning*;
- 14) pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan dan hasil pelaksanaan pembangunan, tahunan, menengah dan panjang;
- 15) penyelenggaraan koordinasi seluruh SKPD Provinsi serta Bappeda/SKPD kabupaten/kota berdasarkan hasil pengendalian, pemantauan dan evaluasi;
- 16) penyusunan laporan triwulanan pelaksanaan rencana pembangunan untuk disampaikan kepada Kepala Bappeda dan diteruskan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah serta Kementerian/Lembaga terkait;
- 17) pengkoordinasian kerjasama antar daerah dan antar lembaga;
- 18) penyiapan bahan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) Gubernur di bidang pembangunan;
- 19) pengelolaan e-monev capaian kinerja pembangunan Sumatera Selatan baik yang bersumber dana APBD maupun APBN;
- 20) pengevaluasian RPJPD, RPJMD, RKPD dan APBD kabupaten/kota;
- 21) pengkoordinasian, penghimpunan, pengelola, penyajian, dan memberikan pelayanan data informasi potensi daerah dan statistik hasil-hasil pembangunan daerah;
- 22) penghimpunan dan penganalisaan saran, masukan dan aspirasi masyarakat sebagai bahan dalam penyusunan program pembangunan strategis daerah;
- 23) penghimpunan dan pemfasilitasi serta pengkoordinasian dengan bidang-bidang tentang bahan RPJPD, RPJMD dan RKPD yang akan dipergunakan dalam Musrenbang RPJPD dan Musrenbang RPJMD dan Musrenbang RKPD Provinsi dan kabupaten/kota;
- 24) penghimpunan dan pemfasilitasi serta pengkoordinasian dengan bidang-bidang terkait dengan pengelolaan data dan informasi;
- 25) pengembangan sistem data dan informasi perencanaan pembangunan daerah; dan
- 26) pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Untuk operasionalisasi fungsi-fungsi tersebut, Kepala Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Perencanaan Strategis membawahi:

- 1) Subbidang Evaluasi;
- 2) Subbidang Pengendalian dan Pelaporan; dan
- 3) Subbidang Perencanaan Strategis.

g. Kelompok Jabatan Fungsional

1. Pejabat Fungsional Pranata Komputer

Berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 32 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pranata Komputer, Unsur dan Sub Unsur Kegiatan Jabatan Fungsional Pranata Komputer sebagai berikut:

Unsur dan Sub Unsur Kegiatan

- (1) Unsur kegiatan tugas jabatan fungsional pranata komputer yang dapat dinilai angka kreditnya terdiri atas:
 - a. tata kelola dan tata laksana teknologi informasi;
 - b. infrastruktur teknologi informasi; dan
 - c. sistem informasi dan multimedia.
- (2) Sub Unsur dari unsur kegiatan
 - a. tata kelola dan tatalaksana teknologi informasi meliputi:
 1. *information technology enterprise*;
 2. manajemen layanan teknologi informasi;
 3. pengelolaan data (data management);
 4. audit teknologi informasi; dan
 5. manajemen risiko teknologi informasi;
 - b. infrastruktur teknologi informasi, meliputi:
 1. sistem jaringan komputer; dan
 2. manajemen infrastruktur teknologi informasi;
 - c. sistem informasi dan multimedia, meliputi:
 1. sistem informasi;
 2. pengolahan data; dan
 3. area teknologi informasi khusus.

2. Pejabat Fungsional Pustakawan

Berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 55 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan, Unsur dan Sub Unsur Kegiatan Jabatan Fungsional Pustakawan sebagai berikut:

- (1) Unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Pustakawan yang dapat dinilai angka kreditnya terdiri atas:
 - a. pengelolaan; dan
 - b. pelayanan perpustakaan.
- (2) Sub unsur dari unsur kegiatan :
 - a. pengelolaan, meliputi:
 1. pengembangan koleksi perpustakaan;
 2. pengorganisasian bahan perpustakaan dan pengetahuan; dan
 3. pengembangan sistem kepastakawanan.
 - b. pelayanan perpustakaan, meliputi:
 1. pelayanan informasi dan referensi;
 2. promosi perpustakaan; dan
 3. pengembangan literasi informasi.

3. Pejabat Fungsional Arsiparis

Berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 13 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis, tugas pokok Jabatan Fungsional Arsiparis adalah melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi.

4. Pejabat Fungsional Analis Sumber Daya Manusia Aparatur

Berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 37 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analis SDM Aparatur, uraian kegiatan dan sub uraian kegiatan Jabatan Fungsional Analis SDM Aparatur sebagai berikut:

- (1) Unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Analis SDM Aparatur yang dapat dinilai angka kreditnya yaitu sistem manajemen aparatur sipil negara, manajemen sumber daya aparatur aparatur strategik dan reformasi birokrasi, analisis dan rancangan organisasi publik, serta proses dan analisis kebiakan/regulasi bidang sumber daya manusia aparatur.
- (2) Sub unsur dari unsur kegiatan Jabatan Fungsional Analis SDM Aparatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:



- a. penyusunan dan penetapan kebutuhan aparatur sipil negara;
- b. pengadaan aparatur sipil negara;
- c. pangkat dan jabatan aparatur sipil negara;
- d. pengembangan karier aparatur sipil negara;
- e. pola karier aparatur sipil negara;
- f. promosi aparatur sipil negara;
- g. mutasi aparatur sipil negara;
- h. penugasan aparatur sipil negara;
- i. pengembangan kompetensi aparatur sipil negara;
- j. penilaian kinerja aparatur sipil negara;
- k. disiplin aparatur sipil negara;
- l. penghargaan aparatur sipil negara;
- m. penggajian, tunjangan dan fasilitas aparatur sipil negara;
- n. pemberhentian aparatur sipil negara;
- o. jaminan pensiun dan jaminan hari tua aparatur sipil negara;
- p. perlindungan aparatur sipil negara;
- q. cuti aparatur sipil negara;
- r. sistem informasi aparatur sipil negara;
- s. manajemen sumber daya manusia aparatur strategik;
- t. reformasi birokrasi;
- u. analisis organisasi publik;
- v. rancangan organisasi publik;
- w. proses kebijakan/regulasi bidang sumber daya manusia aparatur; dan
- x. analisis kebijakan/regulasi bidang sumber daya manusia aparatur.

5. Pejabat Fungsional Perencana

Berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 20 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional Perencana, uraian kegiatan dan sub uraian kegiatan Jabatan Fungsional Perencana sebagai berikut:

Unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Perencana:

- a. identifikasi masalah/isu strategis;
- b. penyusunan kebijakan rencana pembangunan;
- c. adopsi dan legitimasi rencana pembangunan;
- d. pelaksanaan rencana pembangunan; dan
- e. evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.



6. Pejabat Fungsional Analis Kebijakan

Berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 45 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Analis Kebijakan, sub unsur kajian dan analisis kebijakan terdiri dari:

- melakukan riset dan analisis kebijakan;
- memberikan rekomendasi kebijakan;
- melakukan komunikasi, koordinasi, advokasi, konsultasi dan negosiasi kebijakan; dan
- melakukan publikasi hasil kajian kebijakan.

2.1.2. Sumber Daya BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan

a. Sumber Daya Manusia

Jumlah Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Bappeda sampai dengan September Tahun 2025 tercatat adalah sebanyak 150 (seratus lima puluh) orang yang terdiri dari ASN Perempuan sebanyak 83 orang dan ASN laki-laki sebanyak 67 orang pegawai ASN Bappeda. Data tersebut dapat dilihat dari tabel 1 dibawah ini:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Jumlah Pegawai ASN Bappeda Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025

No	Unit Kerja	Jenis kelamin		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	PNS	48	53	101
2	PPPK	32	60	92
	Jumlah	80	113	193

Sedangkan komposisi pegawai Bappeda menurut Golongan terdiri dari 28 orang golongan IV, 68 orang golongan III, dan 2 orang golongan II, PPPK 92 orang, 3 orang tenaga kontrak, dari total pegawai Bappeda sebanyak 193 orang.

Tabel 2.2
Rekapitulasi Pegawai Bappeda Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Golongan Tahun 2025

No	Golongan	Jumlah
1	Golongan IV	28 orang
2	Golongan III	68 orang
3	Golongan II	2 orang
4	PPPK	92 Orang
5	Non ASN	3 Orang
	Jumlah	159 orang



Jika dilihat dari kualifikasi pendidikan, jumlah pegawai Bappeda Provinsi Sumatera Selatan didominasi oleh pegawai yang pendidikan terakhirnya Sarjana S1 (116 orang), pegawai dengan pendidikan S2 (54 orang), pegawai dengan pendidikan Doktoral S3 (2 orang), pegawai dengan pendidikan Diploma (17 orang) dan pegawai dengan pendidikan SLTA (5 orang). Jika dilihat dan dibandingkan dengan analisa kebutuhan pegawai dari aspek kuantitasnya masih kurang, namun dari kualitas personil di Bappeda Provinsi Sumatera Selatan (dengan kebijakan menambah personil non PNS atau tenaga ahli) dianggap cukup dalam menunjang kinerja organisasi.

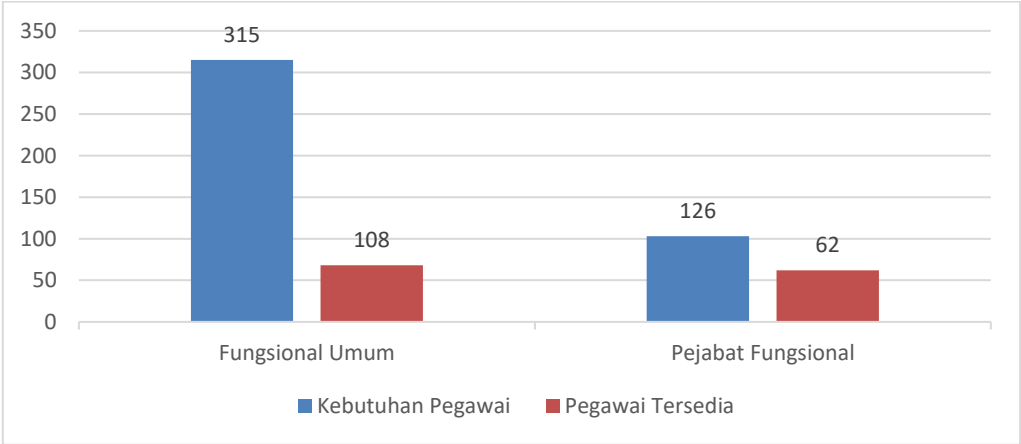
Tabel 2.3
Rekapitulasi Jumlah Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN)
Bappeda Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Tingkat
Pendidikan Tahun 2025

No	Unit Kerja	Pendidikan				
		SLTA	D3	S1/D-IV	S2	S3
1	ASN	1	2	45	51	2
2	PPPK	4	15	71	2	0
	Jumlah	5	17	116	53	2

Dari Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Anjab dan ABK) Bappeda yang disusun berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang mengalami perubahan melalui Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, kebutuhan pegawai Bappeda adalah sebanyak 462 orang yang terdiri dari Pejabat Struktural sebanyak 21 orang, Jabatan Fungsional 126 orang dan Pelaksana 315 orang.



Gambar 2.2
Kebutuhan Pegawai 2025



Namun sampai tahun 2025 jumlah pegawai Bappeda baru berjumlah 193 orang, sehingga mengalami kekurangan pegawai sebanyak 269 orang. Dan kebutuhan pegawai untuk pejabat fungsional adalah sebanyak 126 orang, namun baru terisi 62 orang, sehingga terjadi kekurangan pejabat fungsional sebanyak 64 orang. Jabatan pelaksana dan jabatan fungsional yang ada di Bappeda adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Jabatan Pelaksana Berdasarkan Evaluasi Jabatan
Tahun 2025

No.	Jabatan Pelaksana	Tingkat Pendidikan	Kualifikasi Pendidikan		
			Σ SDM Ideal	Σ SDM Tersedia	Σ SDM Dibutuhkan
1	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 / D-4 atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	169	39	130
2	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	S-1 / D-4 atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	23	3	20
3	Pengolah Data dan Informasi	D-III atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	33	3	30
4	Pengadministrasi Perkantoran	SMA/SLTA atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	20	19	1
5	Penata Layanan Operasional	S-1 / D-4 atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	43	43	0
6	Pengelola Layanan Operasional	D-III atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	27	1	26
	Jumlah (orang)		315	108	207



Jabatan pelaksana di Bappeda Provinsi Sumatera Selatan baru terisi sebanyak 108 orang dari 315 orang yang diperlukan sehingga dari analisis jabatan ini masih terdapat kekurangan pegawai untuk jabatan pelaksana. Hal ini juga terjadi pada jabatan fungsional di Bappeda Provinsi Sumatera Selatan yang baru terisi 62 orang fungsional dari 126 orang yang dibutuhkan.

Tabel 2.5
Jabatan Fungsional Berdasarkan Evaluasi Jabatan
Per September Tahun 2025

No	Jabatan Pelaksana	Tingkat Pendidikan	Kualifikasi Pendidikan		
			Σ SDM Ideal	Σ SDM Tersedia	Σ SDM Dibutuhkan
1	Fungsional Perencana Ahli Pertama	S-1 / D-4 atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	33	27	6
2	Fungsional Perencana Ahli Muda	S-1 / D-4 atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	13	12	1
3	Fungsional Perencana Ahli Madya	S-1 / D-4 atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	10	9	1
4	Fungsional Perencana Ahli Utama	S-1 / D-4 atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	3	0	3
5	Analisis Kebijakan Pertama	S-1 / D-4 atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	13	3	10
6	Analisis Kebijakan Muda	S-1 / D-4 atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	4	1	3
7	Analisis Kebijakan Madya	S-1 / D-4 atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	4	0	4
8	Analisis Kebijakan Utama	S-1 / D-4 atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	3	3	0
9	Arsiparis Ahli Muda	S-1 / D-4 atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	1	1	0
10	Arsiparis Ahli Pertama	S-1 / D-4 atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	8	8	0
10	Pustakawan Muda	S-1 / D-4 atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	1	0	1



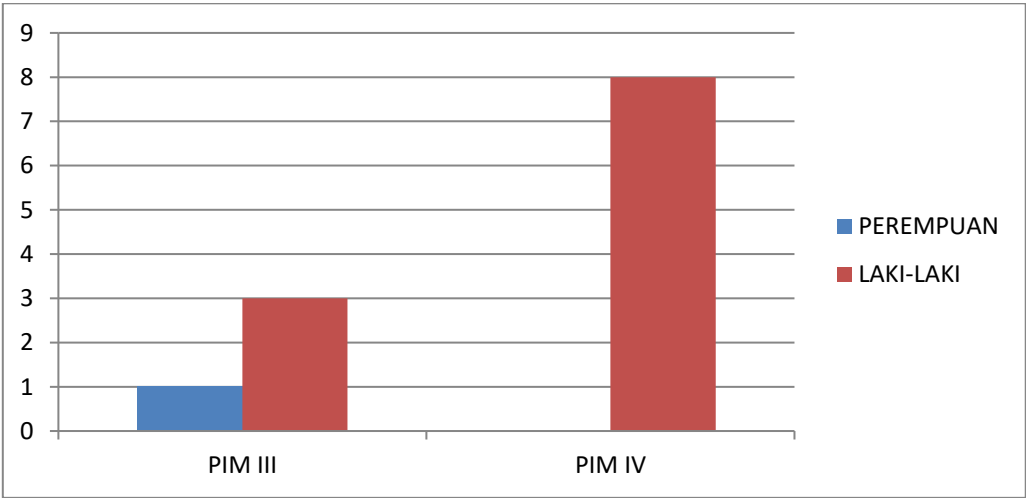
No	Jabatan Pelaksana	Tingkat Pendidikan	Kualifikasi Pendidikan		
			Σ SDM Ideal	Σ SDM Tersedia	Σ SDM Dibutuhkan
11	Pustakawan Pertama	S-1 / D-4 atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	1	0	1
12	Pranata Komputer Terampil	D-III atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	1	0	1
13	Pranata Komputer Mahir	D-III atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	1	0	1
14	Pranata Komputer Penyelia	D-III atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	1	0	1
15	Pranata Komputer Ahli Pertama	S-1 / D-4 atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	2	0	2
16	Pranata Komputer Ahli Muda	S-1 / D-4 atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	1	0	1
17	Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama	S-1 / D-4 atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	2	0	2
18	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda	S-1 / D-4 atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	1	0	1
19	Analisis SDM Aparatur Ahli Madya	S-1 / D-4 atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	1	0	1
20	Surveyor Ahli Pemetaan Pertama	S-1 / D-4 atau bidang PWK, Geografi, Geodesi, Surveyor Pemetaan dan Disiplin Ilmu Lainnya yang Relevan	6	0	6
21	Surveyor Ahli Pemetaan Muda	S-1 / D-4 atau bidang PWK, Geografi, Geodesi, Surveyor Pemetaan dan Disiplin Ilmu Lainnya yang Relevan	3	0	3
22	Surveyor Ahli Pemetaan Madya	S-1 / D-4 atau bidang PWK, Geografi, Geodesi, Surveyor Pemetaan dan Disiplin Ilmu Lainnya yang Relevan	2	0	2



No	Jabatan Pelaksana	Tingkat Pendidikan	Kualifikasi Pendidikan		
			Σ SDM Ideal	Σ SDM Tersedia	Σ SDM Dibutuhkan
23	Statisi Ahli Pertama	S-1 / D-4 atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	6	0	6
24	Statisi Ahli Muda	S-1 / D-4 atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	3	0	3
25	Statisi Ahli Madya	S-1 / D-4 atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	2	0	2
Jumlah (orang)			126	64	62

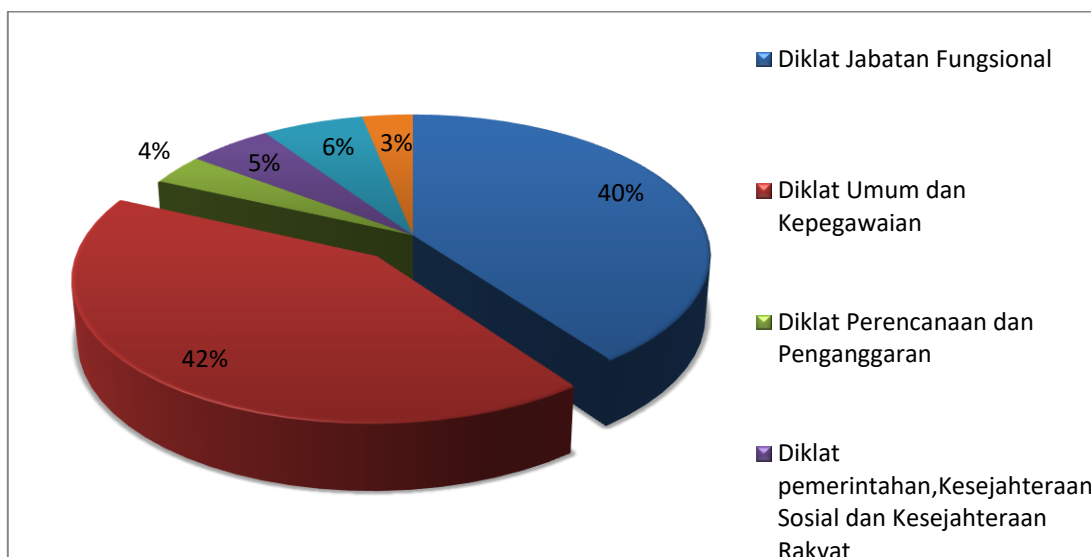
Jika dilihat dari kuantitas pegawai di Bappeda Provinsi Sumatera Selatan masih kurang namun dari segi kualitas, pegawai Bappeda dapat ditingkatkan kapabilitasnya dengan mengikuti bimtek atau diklat-diklat sehingga dapat meningkatkan kinerja pegawai untuk menunjang tugas dan fungsi dari organisasi.

Gambar 2.3
Pejabat Struktural Bappeda yang telah mengikuti Diklat Kepemimpinan



Untuk meningkatkan kapabilitas pegawai Bappeda diperlukan Diklat Kepemimpinan maupun Diklat-Diklat Teknis. Pejabat Struktural Bappeda yang telah mengikuti Diklat Kepemimpinan sebagai syarat menduduki jabatan struktural Bappeda Provinsi Sumatera Selatan adalah sebanyak 4 orang yang terdiri dari 3 orang laki-laki dan 1 orang perempuan pegawai yang mengikuti DIKLAT PKA, dan sebanyak 8 orang laki-laki dari pegawai yang mengikuti DIKLAT PKP.

Gambar 2.4
Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Diklat Tahun 2025



Telah mengikuti diklat dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Diklat Umum dan Kepegawaian sebanyak 42% terdiri dari:
 - Diklat Penyusunan ANJAB, ABK dan Evaluasi jabatan.
 - Diklat Arsip.
2. Diklat Jabatan Fungsional sebanyak 40% terdiri dari:
 - Diklat Jabatan Fungsional Perencana.
3. Diklat Perekonomian dan Pendanaan 3% terdiri dari:
 - Diklat Penyusunan Data dan Informasi Diklat Pemerintahan.
4. Diklat Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat 5% yang terdiri dari:
 - Diklat Arah Kebijakan dana alokasi khusus tahun 2025 penurunan Stunting.
 - Diklat *Sharing Knowledge* dan peningkatan kapasitas SDGs Centers dalam pelaksanaan TPB/SDGs.
5. Diklat Perencanaan dan Penganggaran 4% yang terdiri dari:
 - Diklat Perencanaan Pembangunan Daerah.
 - Diklat Perencanaan Berbasis data Program BPMP.
6. Diklat Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah 6% yang terdiri dari:
 - 1) Pemeliharaan Bangunan Gedung dengan tema "Bangunan Gedung Hijau dan Bangunan Gedung Cerdas".
 - 2) Penyusunan Profil Perekonomian Provinsi Sumatera Selatan dengan tema "Skenario Transisi Energi di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024".



Tabel 2.6
Rencana Diklat Tahun 2025-2029

No	Unit Kerja	Pendidikan	Jumlah Rencana Pegawai Yang Mengikuti Diklat
1	SEKRETARIAT	1. Diklat Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	25
		2. Diklat Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Instansi Pemerintah	25
		3. Diklat Penyusunan Manajemen Resiko Instansi Pemerintah (<i>Risk Register</i>)	25
		4. Diklat PIM IV	5
		5. Bimtek Barang dan Jasa	25
		6. Bimtek Pengelolaan Aset	40
		7. Bimtek SDM Aparatur	40
		8. Bimtek Public Speaking	191
		9. Bimtek Etika Pegawai	200
		10. Diklat Arsiparis	20
		11. Diklat Pranata Komputer	25
		12. Bimtek Tata Naskah Dinas	25
		13. Bimtek Keprotokolan	25
		14. Bimtek Fotografer dan Video	20
		15. Diklat Pengelolaan Keuangan	20
		16. Diklat Bendahara	10
2	PEPS	1. Diklat Perencanaan dan Penganggaran	100
		2. Diklat Monitoring dan Evaluasi	100
		3. Diklat Penyusunan RPJMD dan RENSTRA	100
		4. Diklat Penyusunan RPJPD	100
3	PPP	1. Diklat Bisnis Plan (Investasi)	50
		2. Diklat Makro Ekonomi	50
		3. Diklat Carbon Market (Dana Transfer)	50

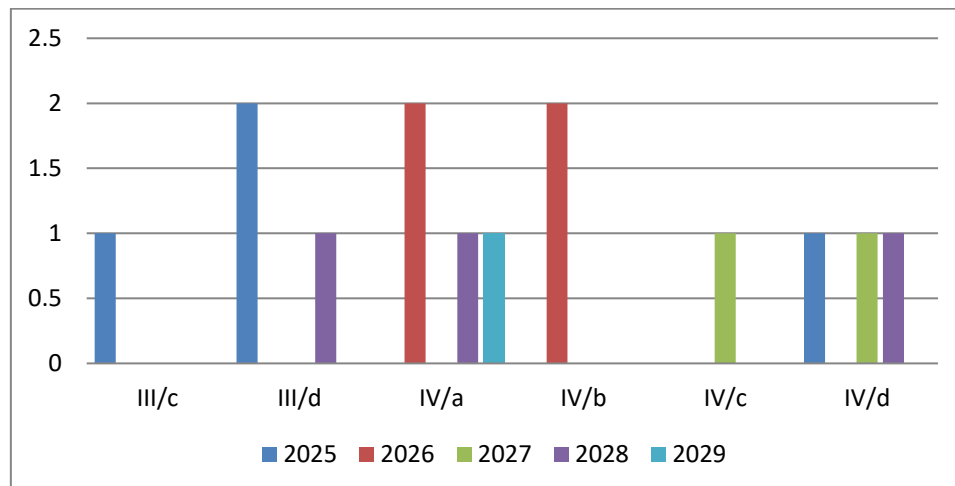


No	Unit Kerja	Pendidikan	Jumlah Rencana Pegawai Yang Mengikuti Diklat
4	IPW	1. Diklat Peningkatan Kapasitas SDM Perencanaan: Bidang Sanitasi/Perumahan	30
		2. Bimtek Survey dan Pemetaan dan Webgis	30
		3. Diklat /Bimtek KLHS RPJMD	30
		4. Diklat /Bimtek KLHS RPJPD	30
		5. Bimtek Tata Ruang Provinsi	25
		6. Bimtek ARCGIS Dasar	25
		7. Bimtek ARCGIS Tingkat Lanjut	20
		8. Bimtek Perhitungan Emisi Carbon/Carbon Trade	30
		9. Bimtek Pembuatan Metadata Spasial dan Penjamin Kualitas Data	25
5	PKK	1. Diklat 8 Aksi Konvergensi Stunting	50
		2. Bimtek Perencanaan Pembangunan Desa (RAPID RURAL APPRASIAL)	50
		3. Bimtek Indeks Demokrasi Indonesia	50
		4. Bimtek Pengarusutamaan Gender	50
		5. Bimtek Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Literasi bagi Aparatur Perencana	50

Dalam rangka peningkatan kinerja pegawai Bappeda maka direncanakan setiap tahun ada pegawai Bappeda yang dapat mengikuti diklat-diklat sesuai dengan kebutuhan organisasi dan ketersediaan anggaran Bappeda Provinsi Sumatera Selatan.



Gambar 2.5
Data Pegawai Bappeda yang akan Pensiun 5 Tahun Kedepan
(Data per Januari 2025)



Berdasarkan diagram di atas, pegawai Bappeda Provinsi Sumatera Selatan yang akan pensiun dari Tahun 2025-2029 yaitu sebanyak 14 orang. Pada tahun 2025 terdapat 1 orang pegawai golongan III/c, 2 orang pegawai golongan III/d, dan 1 orang pegawai golongan IV/d yang akan pensiun, tahun 2026 terdapat 2 orang pegawai golongan IV/a dan 2 orang pegawai golongan IV/b, tahun 2027 terdapat 1 orang pegawai dari golongan IV/c dan 1 orang pegawai golongan IV/d yang akan pensiun, pada tahun 2028 terdapat 1 orang pegawai dari golongan III/d, 1 orang pegawai dari golongan IV/a dan 1 orang pegawai dari golongan IV/d yang akan pensiun, serta pada tahun 2029 terdapat 1 orang pegawai golongan IV/a yang akan pensiun. Hal ini menunjukkan pegawai Bappeda Provinsi Sumatera Selatan akan berkurang sebanyak 14 orang hingga Tahun 2029, oleh karena itu akan dibutuhkan penambahan.

b. Sistem Pendukung kerja

1) *Dashboard* SDGs Sumatera Selatan Bappeda Sumsel

Dashboard SDGs Provinsi Sumatera Selatan adalah sebuah Sistem informasi yang menyajikan data pelaporan pelaksanaan RAD (Rencana Aksi Daerah), yang memuat indikator-indikator SDGs di Provinsi Sumatera Selatan yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023.



RAD TPB/SDGs Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019-2023 terdiri dari 17 tujuan/*goals*, 91 target dengan 252 indikator. SDGs bertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Gambar 2.6
Screenshot Tampilan Aplikasi *Dashboard* SDGs

The screenshot displays the 'Form 1 Monev' (Monitoring and Evaluation Form 1) for the SDGs in South Sumatra Province. The interface includes a sidebar menu with options like 'Beranda', 'Pengguna', 'Data Master', 'Target & Realisasi', 'Program & Kegiatan', and 'Form 1 Monev'. The main content area is titled 'Form 1 Monev' and contains a section for 'Input Form 1 Monev PROVINSI SUMATERA SELATAN'. This section includes a dropdown for 'PILIH TARGET' (Select Target) and a 'TAHUN' (Year) dropdown set to 2022. Below this is a table with columns 'Simbol', 'Arti', and 'Keterangan' (Symbol, Meaning, and Description). The table lists three target types: 'Tercapai (achieved)', 'Akan tercapai / membaik (positive change)', and 'Perlu perhatian khusus (negative change)'. The 'Form 1 Monev' section also includes a table for 'Tanpa Kemiskinan' (Without Poverty) with columns for 'Kode', 'Indikator', 'Sumber Data', 'Satuan', 'Baseline', 'Target', 'Capaian', and 'Status'. The table shows data for indicator 1.2.1* regarding the percentage of the population living below the national poverty line.

Kode	Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline	Target	Capaian	Status
1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	BPS	%	-	9,5		

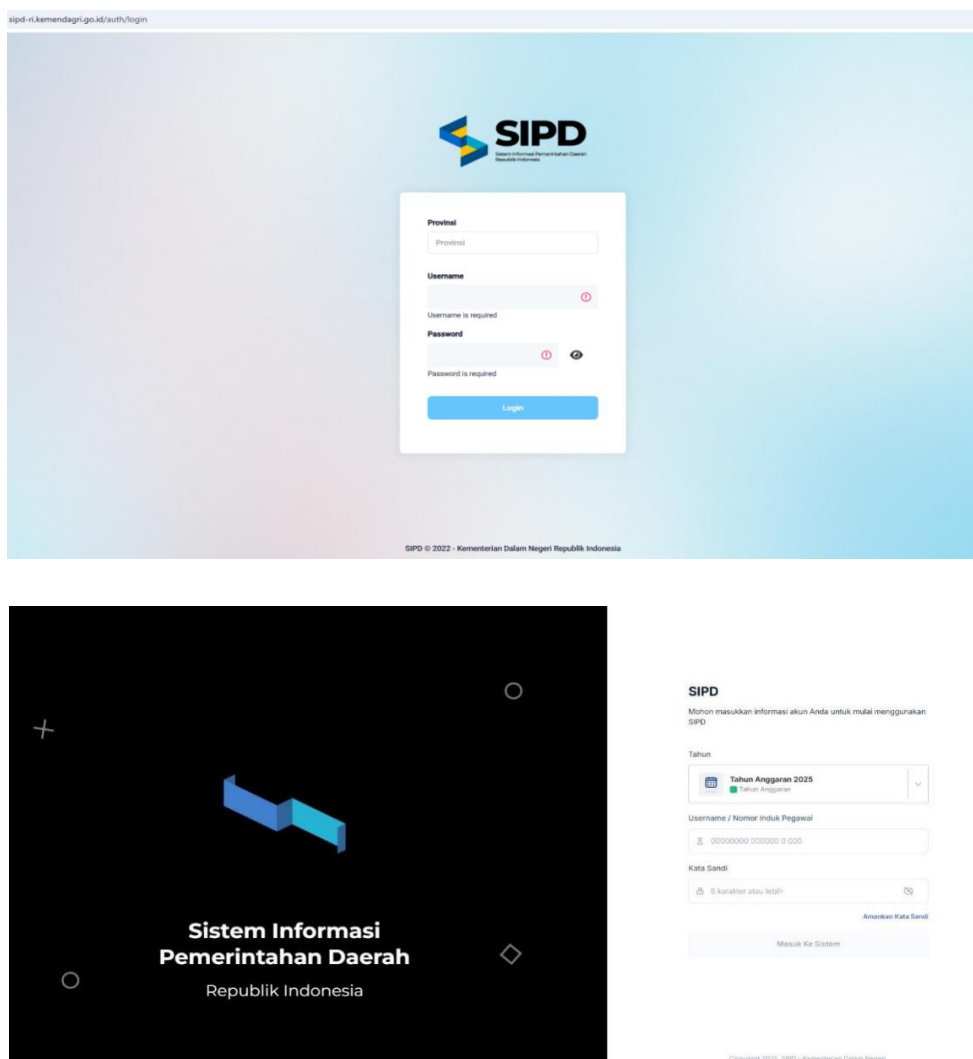
Maksud yang ingin dicapai melalui *dashboard* SDGs ini adalah meningkatkan efektifitas *stakeholders* dalam penyampaian laporan *program/kegiatan* yang mendukung tercapainya *goals* dalam SDGs sehingga pada akhirnya dapat menampilkan data *real time* yang dapat diakses secara berkesinambungan dalam fungsi monitoring dan evaluasi capaian pembangunan yang berkelanjutan.



2) Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI) dan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Penatausahaan (SIPD-PENATAUSAHAAN)

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Penatausahaan (SIPD-Penatausahaan) dan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI) yang digunakan untuk memantau kinerja secara cepat dan ketat seluruh OPD di jajaran Pemprov Sumsel dan sinergi antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah. Sistem ini lebih efektif dalam sistem perencanaan, penganggaran dan pelaporan keuangan. SIPD-Penatausahaan dan SIPD-RI dibuat untuk memudahkan dalam perencanaan dan penganggaran jumlah dana yang harus dianggarkan secara otomatis.

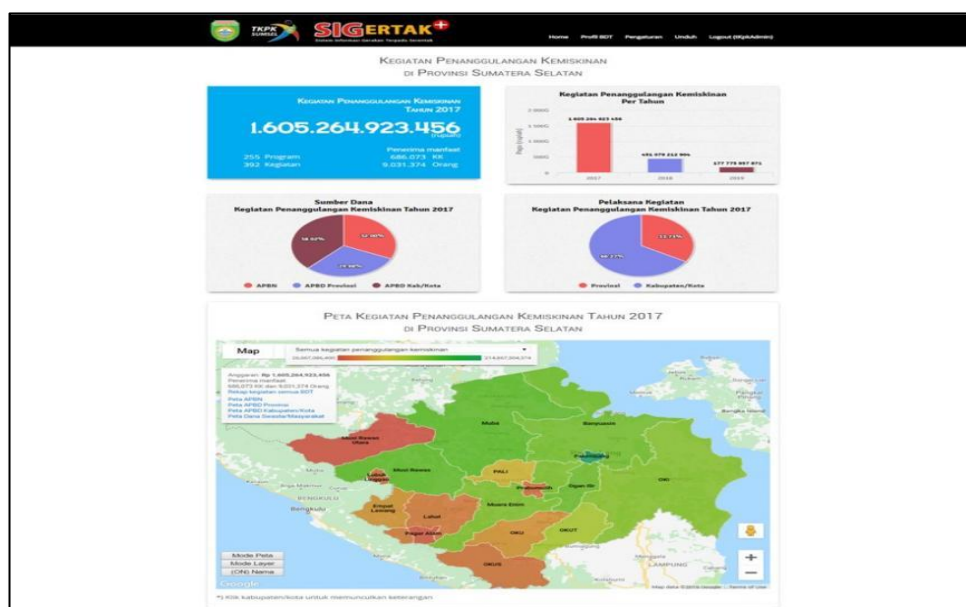
Gambar 2.7
Screenshot Tampilan Aplikasi SIPD-RI dan SIPD-Penatausahaan



3) Sistem Informasi Manajemen Kemiskinan Gerakan Terpadu Serentak (SIGertak)

Sistem Informasi Manajemen Kemiskinan Gerakan Terpadu Serentak Plus (SIGertak Plus) merupakan aplikasi yang menyajikan data berbagai variable kemiskinan yang terpadu dan terintegrasi, berbasis BDT *by name by address* secara spasial, interaktif dan informatif, sehingga diharapkan dapat memberikan pemahaman dan memudahkan penggunaan aplikasi khususnya pengambil keputusan untuk mengetahui, membaca, serta menganalisa situasi dan kondisi pada setiap variable data kemiskinan tidak hanya sampai level desa tetapi sampai ke rumah tangga dan individu.

Gambar 2.8
Screenshot Tampilan Aplikasi SIGertak



Dengan dimasukkannya beberapa varian variabel BDT pada setiap level mulai dari individu/rumah tangga, desa/kelurahan, kecamatan hingga kabupaten/kota di aplikasi SIGertak Plus, maka pengguna aplikasi dapat menganalisa faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kesejahteraan masyarakat di suatu daerah rendah. Selain itu, aplikasi ini juga dapat mengetahui seberapa tepat sebuah kegiatan penanggulangan kemiskinan dengan permasalahan penyebab kemiskinan.

Aplikasi ini diharapkan dapat meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan lintas sektor dan daerah, melaksanakan program/kegiatan serta melakukan evaluasi terhadap program/kegiatan penanggulangan kemiskinan yang telah dilakukan baik oleh OPD Provinsi maupun kabupaten/kota melalui Analisa data serta memberikan informasi bagi para pemangku kepentingan lainnya.

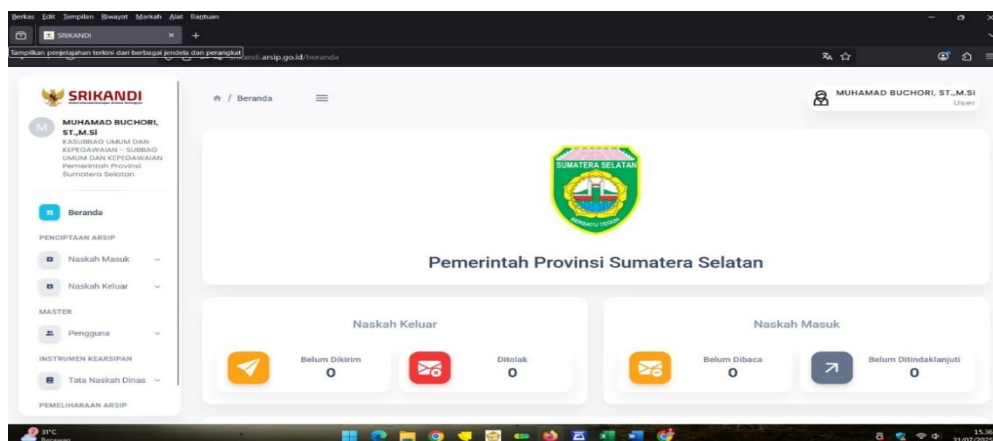
Tujuan yang dicapai melalui SIGertak Plus adalah meningkatkan efektifitas program/kegiatan penanggulangan kemiskinan yang tepat sasaran (sasaran hingga *by name by address*) dan tepat lokasi sehingga pada akhirnya dapat mengurangi angka kemiskinan di Sumatera Selatan. Sistem informasi SIGertak Plus juga telah terintegrasi dengan sistem informasi di kabupaten/kota di Sumatera Selatan sehingga lebih memudahkan dalam mengakses data kemiskinan hingga ke level individu.

4) Srikandi dan E-Bappeda

Sistem informasi administrasi umum atau disposisi online yang merupakan sistem informasi untuk memproses pemantauan dan pengelolaan data surat masuk dan keluar dari berbagai *stakeholder*.

Gambar 2.9

Screenshot Tampilan Aplikasi Srikandi dan E-Bappeda

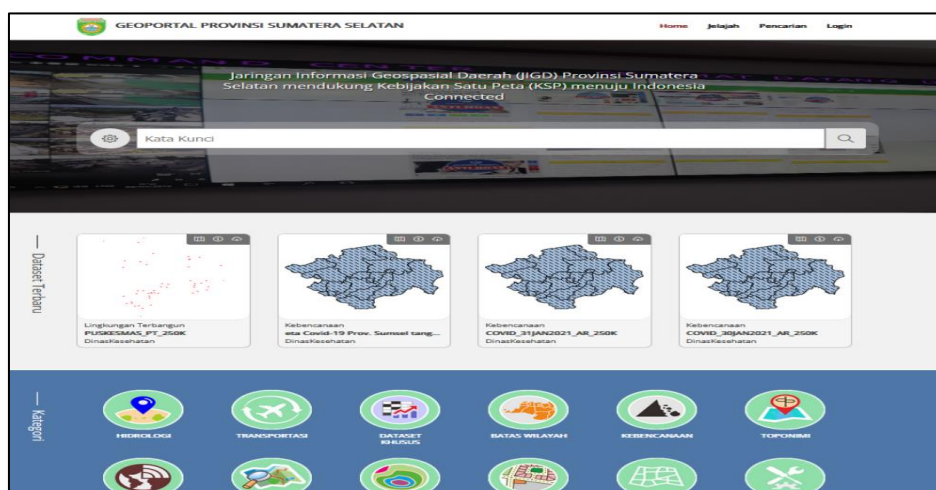


Aplikasi ini memudahkan dalam mengakses data dan informasi yang terkandung di dalam surat tersebut dan kemudian akan diteruskan ke bagian bidang yang dituju.

5) Sistem Informasi Geoportal

Jaringan informasi geospasial daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagai wadah penyimpanan informasi berbentuk data spasial atau data peta dalam mendukung pelaksanaan kebijakan satu peta dan satu data di Provinsi Sumatera Selatan.

Gambar 2.10
Screenshot Tampilan Aplikasi
Sistem Informasi Geoportal



Data spasial yang tersedia bisa dimanfaatkan dalam Penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan lahan, perbaikan kualitas tata ruang, acuan penerbitan izin, dan percepatan reformasi agrarian serta percepatan penyediaan infrastruktur selama periode tersebut Provinsi Sumatera Selatan (Simpul Jaringan Provinsi Sumatera Selatan) telah berhasil mendapatkan penghargaan berupa Tahun 2018 berhasil mendapatkan penghargaan Bhumandala Rajata dan Bhumandala Kencana (Pemanfaatan Simpul Jaringan Terbaik) Kategori Provinsi dan Tahun 2020 berhasil mendapatkan penghargaan Bhumandala Kanaka dan Bhumandala Kencana (Pemanfaatan Simpul Jaringan Terbaik) Kategori Provinsi. Tahun 2022 berupa Bhumandala Rajata (Simpul Jaringan Terbaik) Kategori Provinsi.

Gambar 2.11
Aplikasi SIAP Tanjak



c. Aset

Sarana dan prasarana pendukung kegiatan Bappeda Provinsi Sumatera Selatan adalah gedung kantor dengan luas tanah sebesar 4.000 m², serta ada 6 buah *router* jaringan internet yang di letakkan ditempat strategis, setiap pegawai dan tamu dapat mengakses jaringan *wi-fi* yang stabil. Di dalam gedung kantor Bappeda, terdapat ruang rapat utama Dapuntahyang yang terletak di lantai 3 dengan kapasitas 250 orang, ruang rapat Parameswara dan Balaputradewa yang terletak di lantai 2 dengan kapasitas masing-masing 80 orang dan 30 orang, dan di lantai 1 terdapat ruang rapat *display* yang berkapasitas 50 orang, serta ruang rapat masing-masing bidang di kantor Bappeda Provinsi Sumatera Selatan. Selain itu Kantor Bappeda juga dilengkapi dengan fasilitas kamar mandi dan toilet disetiap lantai yang sudah membedakan antara toilet laki-laki dan Perempuan, terdapat ruang laktasi untuk ibu menyusui, mushola khusus perempuan di lantai 2, tempat bermain anak serta terdapat tempat parkir khusus untuk penyandang disabilitas.



Rincian aset yang mendukung kegiatan di Bappeda Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.7
Daftar Aset Bappeda Provinsi Sumatera Selatan
(Data KIB per September 2025)

No.	Nama Aset (Barang)	Satuan	Aset Ideal (Sesuai Kebutuhan)	Aset yang ada	Rencana Penambahan Aset	Ket.
1	Tanah	unit	1	1	0	
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen	unit	2	2	0	Penambahan Nilai aset berdasarkan Nilai Kapitalisasi Penambahan Bangunan Baru semula 1 Tingkat menjadi 3 Tingkat
3	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	unit	1	1	0	Penambahan nilai aset berdasarkan Nilai Kapitalisasi Penambahan Bangunan Baru semula 1 Tingkat menjadi 2 Tingkat
4	Bangunan Gedung untuk Pos Jaga Permanen	unit	1	1	0	
5	Bangunan Parkir Terbuka Semi Permanen	unit	1	1	0	
6	Bangunan Tempat Tinggal Lainnya	unit	1	1	0	
7	<i>electric generating set</i> lainnya (dst)	unit	1	1	0	
8	Pompa Air	unit	1	1	0	
9	Kendaraan Roda 4	unit	16	16	0	Pada Tahun 2025 telah diusulkan penghapusan Kendaraan Dinas Roda 4 sebanyak 8 Unit dengan kondisi Rusak Berat
12	Sepeda Motor	unit	10	10	0	Pada Tahun 2025 telah diusulkan penghapusan Kendaraan Dinas Roda 2 sebanyak 5 Unit dengan kondisi Rusak Berat
13	<i>Scanner (Universal Tester)</i>	unit	1	1	0	
14	Lemari Penyimpan	unit	21	14	7	
16	Mesin Penghitung Uang	unit	1	1	0	
17	Mesin Fotocopy Folio	unit	6	1	5	
18	Lemari Besi/Metal	unit	62	12	50	
19	Lemari Kayu	unit	82	32	50	
20	Rak Besi	unit	23	11	12	
22	Filing Cabinet Besi	unit	60	3	57	
23	Brandkas	unit	5	5	0	
24	Lemari Kaca	unit	7	7	0	
25	Lemari Makan	unit	2	2	0	
26	Alat Penyimpanan Kantor lainnya (Koper)	unit	1	1	0	
27	CCTV - <i>Camera Control Television System</i>	unit	7	2	5	
28	Alat Penghancur Kertas	unit	25	5	20	
29	<i>White Board Electronic</i>	unit	2	2	0	



No.	Nama Aset (Barang)	Satuan	Aset Ideal (Sesuai Kebutuhan)	Aset yang ada	Rencana Penambahan Aset	Ket.
31	LCD <i>Projector/ Infocus</i>	unit	14	6	8	
32	<i>Acces Control System</i>	unit	8	8	0	
33	Papan Pengumuman	unit	1	1	0	
34	Papan Tulis	unit	1	1	0	
35	Alat Kantor Lainnya (<i>finger print</i>)	unit	2	2	0	
36	Meja Kerja Besi/Metal	unit	6	6	0	
37	Meja Kerja Kayu (Meja Infocus)	unit	16	16	0	
38	Kursi Besi/Metal (Kursi Rapat)	unit	245	95	150	
39	Meja Rapat	unit	50	24	26	
40	Meja Resepsionis	unit	1	1	0	
42	Meja 1/2 Biro	unit	244	44	200	
43	Meja Makan Kayu	unit	6	1	5	
44	Meja Bundar	unit	1	0	1	
45	Kursi Rapat	unit	170	70	100	
46	Kursi Tamu	unit	1	1	0	
47	Kursi Putar	unit	193	0	193	
48	Meja Komputer	unit	2	2	0	
49	Sofa	unit	21	9	12	
50	Meubeleur lainnya (Dinding Sekat Kayu)	unit	1	1	0	
51	<i>Meubeleur</i> lainnya (Lemari Arsip)	unit	15	10	5	
52	Lemari Es	unit	14	4	10	
53	A.C. Split	unit	100	65	35	
54	Televisi	unit	34	9	25	
55	Amplifier	unit	9	1	8	
56	<i>Loudspeaker</i>	unit	12	7	5	
57	<i>Sound System</i>	unit	58	48	10	
58	Tangga Aluminium	unit	2	2	0	
59	Dispenser	unit	30	15	15	
60	Mimbar/Podium	unit	6	1	5	
61	Handy Cam	unit	7	2	5	
62	Karpet (Masjid)	unit	43	33	10	
63	Gordyin/Kray	unit	150	94	56	
64	Bracket Standing Peralatan	unit	2	1	1	
65	Alat Rumah Tangga Lain- lain (Gelas Minum)	lusin	1	1	0	
66	Alat Rumah Tangga Lain- lain (Piring Makan)	lusin	5	5	0	
67	Alat Rumah Tangga Lain- lain (Cangkir Teh & Tatakan)	lusin	2	2	0	
68	Alat Rumah Tangga Lain- lain (Ambal jumbo 250x330)	unit	7	6	1	
69	Alat Rumah Tangga Lain- lain (Water Boiler)	unit	2	2	0	
70	Alat Rumah Tangga Lain- lain Tiang Pembatas Makmum/Masjid)	unit	4	4	0	
71	Alat Rumah Tangga Lain- lain (Beduk Masjid)	unit	1	1	0	
72	Alat Rumah Tangga Lain- lain (Alat Seni Hadroh)	unit	1	1	0	
73	Alat Rumah Tangga Lain- lain (Meja Pengajian Majelis Taklim)	unit	1	1	0	
74	Pompa Kebakaran/Portable (Pompa Air)	unit	1	1	0	



No.	Nama Aset (Barang)	Satuan	Aset Ideal (Sesuai Kebutuhan)	Aset yang ada	Rencana Penambahan Aset	Ket.
75	Pompa Kebakaran/Portable (Pompa Celup)	unit	1	1	0	
76	Alat Pembantu Kebakaran	unit	6	6	0	
77	Alat Pemadam Kebakaran lainnya	unit	59	9	50	
78	Meja Kerja Pejabat Eselon III	unit	5	3	2	
79	Meja Kerja Pejabat lain-lain	unit	21	1	20	
80	Meja Tamu Ruangan Tunggu Pejabat Eselon II	unit	2	2	0	
81	Meja Tamu Biasa	unit	2	2	0	
82	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	unit	1	1	0	
83	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	unit	5	2	3	
84	Kursi Kerja Pejabat lainnya	unit	21	21	0	
85	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon III	unit	10	2	8	
86	Kursi Hadap Depan Meja Kerja lainnya	unit	42	40	2	
87	Lemari Buku Untuk Pejabat Eselon II	unit	1	1	0	
88	Buffet Kayu	unit	1	1	0	
89	Lemari Arsip Pejabat lainnya (Keuangan)	unit	1	1	0	
90	Audio Amplifier (Masjid)	unit	2	2	0	
91	Microphone/ Wireless MIC	unit	50	6	44	
92	Voice Recorder	unit	21	2	19	
93	peralatan studio audio lainnya (speaker)	unit	2	2	0	
94	peralatan studio audio lainnya (Amplifier)	unit	1	1	0	
95	peralatan studio audio lainnya (Subwoofer)	unit	15	3	12	
96	Tripod Camera	unit	9	3	6	
97	Camera Digital	unit	11	8	3	
98	Tas Kamera	unit	5	5	0	
99	Lampu Blitz Kamera	unit	1	1	0	
100	Video Conference	unit	10	6	4	
101	Camera Conference	unit	2	2	0	
102	Alat Studio Lainnya (Battery Grip)	unit	1	1	0	
103	Telephone Mobile	unit	21	5	16	
104	Handy Talky (HT)	unit	14	4	10	
105	Wireless Amplifier (Mic Wireless)	unit	2	2	0	
106	Wireless Amplifier (Portable Amplifier Wireless)	unit	1	1	0	
107	peralatan komunikasi navigasi lainnya lainnya (Drone)	unit	2	1	1	
108	Elektronik Thermometer	unit	1	1	0	
109	Tripod	unit	1	1	0	
110	Exhaust Fan	unit	5	2	3	
111	alat peraga praktek sekolah (Buku-buku Perpustakaan)	paket	1	1	0	
112	recorder display lainnya dst)	unit	1	1	0	
113	Layar Proyektor	unit	7	1	6	
114	P.C Unit	unit	214	53	161	
115	Lap Top	unit	198	65	133	
116	Note Book	unit	21	16	5	



No.	Nama Aset (Barang)	Satuan	Aset Ideal (Sesuai Kebutuhan)	Aset yang ada	Rencana Penambahan Aset	Ket.
117	Tablet PC	unit	23	2	21	
118	Hard Disk	unit	11	6	5	
119	Printer (Peralatan Personal Komputer)	unit	214	63	151	
120	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	unit	5	3	2	
121	External/ Portable Hardisk	unit	10	10	0	
122	Server	unit	14	14	0	
123	Hub	unit	6	6	0	
124	Air Conditioning (AC)	unit	10	10	0	
125	Kompas Listrik (Ruang Pantry)	unit	1	0	1	
126	Home Theater	set	2	0	2	
127	Uninterruptible Power Supply (UPS)	unit	3	0	3	
128	Video Distribution Amplifier	unit	3	0	3	
129	Video Switcher	unit	3	0	3	
130	Dehumidifier (Humidity Control)	unit	1	0	1	
131	Router	unit	5	0	5	
132	Baterai Lifepo 4 SMT	unit	1	0	1	
133	Argo Cycle (Ruang Olahraga)	unit	1	0	1	
134	Treadmill (Ruang Olahraga)	unit	1	0	1	
135	Sit Up Board (Ruang Olahraga)	unit	1	0	1	
136	Damle Set (Ruang Olahraga)	unit	1	0	1	
137	Buku Umum Lain-lain (Perpustakaan)	buku	221	21	200	
138	Buku Agama (Perpustakaan)	buku/paket	102	2	100	
139	Lisensi dan Frenchise	unit	4	4	0	
140	Software	unit	10	6	4	

Sumber: KIP Bappeda Provinsi Sumatera Selatan

Jumlah aset yang terdapat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan jumlah KIP yang ada dan terdata namun untuk kebutuhan pada 5 tahun ke depan (tahun 2025-2029) Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan telah membuat rencana sesuai dengan kebutuhan ideal dan untuk mengantisipasi kerusakan sehingga dapat menunjang operasional dan mendukung proses perencanaan di Bappeda.

2.1.3. Kinerja Pelayanan Bappeda Provinsi Sumatera Selatan

Pada dasarnya BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan jenis pelayanan administrasi dengan pola pelayanan teknis fungsional dan pola pelayanan elektronik. Dalam hal ini BAPPEDA memberikan pelayanan tidak hanya kepada publik (masyarakat) namun juga melaksanakan pelayanan kepada unsur-unsur pemerintahan lainnya seperti unsur Pimpinan Daerah, Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Pemerintah kabupaten/kota se-Sumatera Selatan serta instansi vertikal yang terkait dengan perencanaan pembangunan, khususnya Kementerian Dalam Negeri dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.



Kinerja pelayanan Bappeda Provinsi Sumatera Selatan dapat diukur dari ketercapaian tujuan sasaran pada Renstra yang telah ditetapkan seiring dengan misi yang dimiliki oleh Kepala Daerah terpilih sebagaimana tercantum dalam dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Ketercapaian tujuan dan sasaran dimaksud dapat terlihat dari indikator kinerja Rencana Strategis BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 seperti dijelaskan di bawah ini.

Pencapaian kinerja pelayanan BAPPEDA Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2024 dapat dilihat dari pencapaian kinerja sasaran dan capaian indikator kinerjanya pada tahun tersebut. Pada Tahun 2019-2024, BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan memiliki 7 indikator kinerja. Sementara untuk rincian capaian indikator kinerja sasaran pelayanan BAPPEDA Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 2.8
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah BAPPEDA SUMSEL

No.	Indikator Kerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indika tor Lainn ya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke-					
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Program RKPD yang memenuhi THIS				82%	84%	-	-	-	-	82%	84%	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-	-
2	Persentase Kesesuaian Sasaran Antar Dokumen				-	-	88%	88%	90%	100 %	-	-	100%	100%	100%	100%	-	-	113%	113%	111%	100%
3	Penetapan RKPD Tepat Waktu				Tepat Waktu	Tepat Waktu	-	-	-		Tidak Tepat Waktu	Tidak Tepat Waktu	-	-	-		Tidak Tepat Waktu	Tidak Tepat Waktu	-	-	-	
4	Ketepatan Penyampaian Draf Final PERKADA RKPD ke Biro Hukum				-	-	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	-	-	-	Tepat Waktu (17 Juni 2021)	Tepat Waktu (30 Juni 2022)	Tepat waktu	-	-	-	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat waktu	-
5	Persentase Capaian Realisasi Target Sasaran RPJMD				81%	82%	-	-	-		60%	50%	-	-	-		74%	61 %	-	-	-	
6	Persentase Indikator Sasaran RKPD yang Diakomodir Dalam APBD				-	-	83%	80%	83%	-	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	120%	125%	120%	-
7	Persentase Capaian Sasaran Daerah Yang Termasuk Kategori Tinggi dan Sangat Tinggi									80%-95%						70,22%						87,78%

Capaian kinerja pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2019-2020 ditunjukkan melalui pencapaian indikator kinerja sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Sumatera Selatan (RPJMD Sumsel) Tahun 2019-2023 sedangkan capaian kinerja pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2021-2023 sesuai dengan Perubahan RPJMD Tahun 2019-2023, dan sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026.

Adapun realisasi capaian indikator poin 1 yaitu Persentase Program RKPD yang memenuhi THIS yang dipakai pada Tahun 2019 dan 2020 telah memenuhi target sebesar 82% untuk Tahun 2019 dan 84% di Tahun 2020. Untuk indikator poin 2 yaitu persentase kesesuaian sasaran antar dokumen dipakai untuk Tahun 2021-2023 dengan realisasi capaian untuk Tahun 2021, 2022 dan 2023 adalah 100%. Indikator poin 3 yaitu Penetapan RKPD tepat waktu dipakai untuk Tahun 2019 dan 2020 dengan realisasi capaian tidak tepat waktu. Hal ini disebabkan karena penetapan RKPD juga dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal Bappeda Provinsi Sumatera Selatan, sehingga indikator ini diganti dengan indikator poin 4 yaitu ketepatan penyampaian draf final PERKADA RKPD ke Biro Hukum untuk Tahun 2021-2023 dengan realisasi capaian pada Tahun 2021, 2022 dan 2023 adalah tepat waktu. Indikator poin 5 yaitu persentase capaian realisasi target sasaran RPJMD dipakai untuk Tahun 2019 dan 2020, dimana untuk target Tahun 2019 sebesar 81% didapati realisasi capaian sebesar 60% dan untuk target Tahun 2020 sebesar 82% didapati realisasi capaian sebesar 50%. Realisasi capaian yang terus menurun tersebut dikarenakan indikator tersebut bukan hanya menjadi tanggungjawab Bappeda sendiri namun melibatkan perangkat Daerah lain, sehingga untuk Tahun 2021-2023 indikator ini diganti menjadi indikator poin 6 yaitu persentase indikator sasaran RKPD yang diakomodir dalam APBD dengan realisasi capaian untuk Tahun 2021, 2022 dan 2023 sebesar 100%. Capaian indikator point 7 yaitu dengan target Tahun 2024 sebesar 80%-95%, dengan realisasi sebesar 70,22% dan capaian kinerja mencapai 87,78%.



Kinerja pelayanan Bappeda Provinsi Sumatera Selatan selain dapat diukur dari ketercapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 dan RPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026, juga digambarkan melalui kinerja anggaran dan realisasi pendanaan pembangunan sebagaimana dapat terlihat pada tabel berikut.



Tabel 2.9
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2024

Uraian	Anggaran (Rp.Milyar) pada Tahun						Realisasi Anggaran (Rp.Milyar) pada Tahun						Rasio antara Realisasi & Anggaran Tahun (%)						Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Total Belanja	32,67	29,65	30,51	35,22	35,07	30,77	30,18	26,28	28,07	29,28	32,35	30,18	92,38	88,63	92,00	83,13	92,24	98,09	-1,2%	0%
Belanja Operasi	19,53	15,38	30,51	34,13	33,96	30,55	18,08	13,63	28,07	28,20	31,24	29,96	92,58	88,62	92,00	82,63	92,00	98,07	9,43%	10,61%
Belanja Pegawai	13,14	14,26	14,77	19,42	18,03	20,90	12,1	12,66	14	14,51	16,44	20,51	92,09	88,78	94,79	74,71	91,20	98,14	9,74%	11,24%
Belanja Barang dan Jasa	15,65	12,39	16,9	14,71	15,93	9,65	14,28	10,8	13,03	13,69	14,80	9,45	91,25	87,17	77,10	93,06	92,91	97,94	-9,06%	-8,05%
Belanja Modal	3,88	1,79	1,04	1,09	1,11	0,22	3,8	1,65	1,03	1,08	1,11	0,22	97,94	92,18	99,04	99,08	99,71	100	-46,77%	-47,83%

Keterangan :

 = Rasio Capaian Tertinggi

 = Rasio Capaian Terendah

Dari data anggaran dan realiasi belanja bahwa anggaran Bappeda Provinsi Sumatera Selatan selama Tahun 2019 sebesar Rp. 32,67 Milyar. Pada Tahun 2020 menurun menjadi Rp. 29,65 Milyar atau sekitar 9,24% dari tahun sebelumnya. Pada Tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 30,51 Milyar. Pada Tahun 2022 mengalami kenaikan menjadi Rp. 35,22 Milyar, sedangkan pada Tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 35,07 Milyar dari tahun sebelumnya dan kemudian pada Tahun 2024 kembali mengalami penurunan menjadi Rp. 30,77 Milyar hal tersebut terjadi dikarenakan adanya *Recofusing* Anggaran untuk menyesuaikan Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Anggaran Daerah.

Dilihat dari Rasio antara Realisasi dan Anggaran paling tinggi pada Tahun 2024 yaitu sebesar 98,09%, sedangkan paling rendah pada Tahun 2022 yaitu sebesar 83,13%. Hal ini disebabkan karena terjadi Pandemi Covid-19 sehingga sejak Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2021 Anggaran Bappeda berkurang karena dialihkan untuk menanggulangi dampak Covid-19. Apabila dilihat rasio realisasi dari Tahun 2019-2024, rasio terendah adalah pada Tahun 2022 yaitu sebesar 83,13%. Rendahnya rasio antara realisasi dan anggaran Tahun 2022 disumbang oleh belanja pegawai yang memiliki rasio antara realisasi dan anggaran sebesar 74,71%. Hal ini disebabkan oleh tunjangan kinerja pegawai hanya dapat direalisasikan selama 6 bulan dari yang dianggarkan sebanyak 12 bulan.

2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan Bappeda Provinsi Sumatera Selatan

Perencanaan pembangunan merupakan kunci utama dari siklus manajemen pembangunan, oleh karenanya perencanaan pembangunan harus berjalan secara objektif, berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan dalam upaya mencapai tujuan pembangunan secara optimal sesuai dengan harapan. Berhasil tidaknya suatu produk pembangunan, akan sangat tergantung dari mantapnya perencanaan yang disusun sebelumnya.

BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan sebagai lembaga perencana sangat besar peranannya dalam menentukan muatan-muatan perencanaan yang strategis di era perkembangan masyarakat yang sangat dinamis dan partisipasi masyarakat yang terus berkembang, aparat perencana dituntut untuk meningkatkan pelayanan dan kinerja lembaganya.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Bappeda bertugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan Pemerintahan Provinsi di Bidang Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah, dalam hal ini Bappeda melakukan pelayanan terhadap perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam bentuk:

- a. pemverifikasian rancangan Renstra dan Renja perangkat daerah Provinsi Sumatera Selatan;
- b. pengkoordinasian penyusunan IKU dan PK perangkat daerah Provinsi Sumatera Selatan;
- c. pengevaluasian RPJPD, RPJMD, dan APBD kabupaten/kota;
- d. fasilitasi RKPD kabupaten/kota; dan
- e. fasilitasi dan koordinasi kegiatan Satker Kementerian/Lembaga.

2.1.5. Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

Berikut beberapa mitra perangkat daerah dalam pemberian pelayanan:

1. BPS (Badan Pusat Statistik);

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Bappeda Provinsi Sumatera Selatan menjalin kerja sama erat dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka memperkuat implementasi Satu Data Indonesia (SDI) dan penyelenggaraan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) di tingkat provinsi. Kolaborasi ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan tata kelola data yang terpadu, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

Dalam pelaksanaannya, Bappeda Provinsi Sumatera Selatan berperan sebagai koordinator pelaksana SDI daerah (sekretariat SDI provinsi) yang bertugas mengoordinasikan perencanaan dan pemanfaatan data antarperangkat daerah, sementara BPS Provinsi Sumatera Selatan berperan sebagai pembina data statistik sektoral, khususnya dalam aspek metodologi, standardisasi metadata, serta penjaminan mutu data. Melalui sinergi ini, kedua lembaga berkomitmen memastikan bahwa seluruh data sektoral yang dihasilkan oleh perangkat daerah memenuhi prinsip SDI, yaitu satu standar data, satu metadata, satu portal data, dan interoperabilitas data.

2. BI (Bank Indonesia)

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Bappeda Provinsi Sumatera Selatan menjalin kerja sama dengan BI (Bank Indonesia) dalam hal memberikan dukungan Data Ekonomi Makro dan memberikan dukungan terkait upaya-upaya dalam pengendalian ekonomi salah satunya Inflasi Bersama Stakeholder terkait lainnya.

3. GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH)

GIZ singkatan dari **Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH**, sebuah perusahaan milik pemerintah federal Jerman yang bergerak di bidang bantuan pembangunan internasional. GIZ melakukan MoU dengan Bappenas dalam proyek IKI-JET (*Innovation Regions for a Just Energy Transition*) di 2 (dua) Provinsi yaitu Provinsi Sumatera Selatan dan Kalimantan Timur. Project IKI-JET ini merupakan kerjasama (konsorsium) dari GIZ, *Union Aid Abroad* APHEDA, CAN (*Climate Action Network*) International, IISD, *International Labour Organization*, dan *Wupertal Institute*. Di Provinsi Sumatera Selatan proyek IKI-JET bekerjasama dengan Bappeda Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka mendukung Provinsi Sumatera Selatan dalam proses perencanaan partisipatif menuju transisi energi yang adil di Sumatera Selatan. Project ini dimulai 1 Januari 2023 dan akan berakhir pada 30 Juni 2026.

4. ICRAFT (International Centre for Research in Agroforestry)

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Bappeda Provinsi Sumatera Selatan menjalin kerja sama dengan ICRAF (*International Centre for Research in Agroforestry*) dalam pelaksanaan Proyek *Land4Lives*, sebuah inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan penghidupan masyarakat yang berketahanan terhadap perubahan iklim dan memperkuat pengelolaan bentang lahan berkelanjutan di wilayah Sumatera Selatan. Proyek yang didukung pendanaan oleh *Global Affairs Canada* dan dilaksanakan bersama mitra strategis seperti CIFOR dan Bappenas ini beroperasi di dua bentang lahan utama, yaitu KPH Lalan Mendis (Kabupaten Musi Banyuasin) dan KHG Saleh-Sugihan (Kabupaten Banyuasin).

5. Lemtara (Lembaga Perantara Penyaluran Dana)

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Bappeda Provinsi Sumatera Selatan menjalin kerja sama dengan Yayasan Resiliensi Lingkungan Indonesia (Relung Indonesia) sebagai Lembaga Perantara (Lemtara) dalam pelaksanaan *Proyek Result Based Payment (RBP) REDD+ Green Climate Fund (GCF) Output II*. Kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari penetapan Provinsi Sumatera Selatan sebagai salah satu penerima dana RBP REDD+ periode 2014–2016, dengan alokasi sebesar USD 692.253 atau sekitar Rp10,8 miliar yang dikelola oleh Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH).

6. WRI Indonesia (World Resources Institute Indonesia)

Kerja sama antara Bappeda Provinsi Sumatera Selatan dan WRI Indonesia (*World Resources Institute* Indonesia) merupakan kolaborasi strategis dalam mendukung upaya percepatan Pembangunan Rendah Karbon (PRK) dan pengendalian perubahan iklim di tingkat daerah. Kerja sama ini berfokus pada penyusunan Rencana Pembangunan Rendah Karbon Daerah (RPRKD) sebagai instrumen perencanaan yang berperan penting dalam mengintegrasikan kebijakan penurunan emisi gas rumah kaca ke dalam perencanaan pembangunan daerah. Melalui pendekatan perencanaan berbasis ilmiah (*science based planning*), WRI Indonesia memberikan dukungan teknis kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam bentuk analisis kebijakan, pemodelan sistem dinamis, serta pendampingan pengumpulan dan pengolahan data sektoral untuk menyusun baseline dan proyeksi emisi di berbagai sektor seperti energi, pertanian, kehutanan, limbah, dan sosial ekonomi.

2.1.6. Dukungan BUMD dalam pencapaian Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugasnya, terdapat beberapa dukungan dari BUMD dalam mencapai kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Selatan berikut beberapa BUMD :

1. Bank Sumsel Babel

Bank Sumsel Babel sebagai salah satu BUMD perbankan di Provinsi Sumatera Selatan Melalui berbagai program CSR, kemitraan dengan pemerintah daerah, dan dukungan terhadap

digitalisasi serta layanan sosial, Bank Sumsel Babel telah menjadi mitra strategis Bappeda Provinsi Sumatera Selatan.

Sinergi ini berkontribusi pada pencapaian sasaran pembangunan daerah, terutama dalam pengentasan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi lokal, serta peningkatan tata kelola pemerintahan dan layanan publik berbasis digital.

2. PT. TSM (Tirta Sriwijaya Maju)

Keberadaan PT Tirta Sriwijaya Maju menjadi mitra strategis Bappeda Provinsi Sumatera Selatan dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Sinergi antara BUMD ini dengan Bappeda berkontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat, penguatan infrastruktur dasar, serta pencapaian target pembangunan daerah yang tertuang dalam dokumen perencanaan jangka menengah provinsi.

3. PT. Jamkrida (Jaminan Kredit Daerah)

PT. Jamkrida Sumatera Selatan menjadi mitra strategis Bappeda dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan, dengan dampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan ketahanan ekonomi daerah. Melalui fungsi utamanya sebagai penjamin kredit bagi pelaku UMKM, Jamkrida membantu meningkatkan akses pelaku usaha terhadap pembiayaan perbankan, sehingga mendorong pertumbuhan usaha produktif di berbagai sektor ekonomi. Peran ini selaras dengan sasaran pembangunan ekonomi daerah yang dirancang Bappeda, terutama dalam memperluas kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan memperkuat struktur ekonomi lokal berbasis masyarakat.

4. PT. Bank Perekonomian Rakyat Sumatera Selatan.

PT Bank Perekonomian Rakyat Sumatera Selatan (Perseroda) memiliki peran strategis dalam mendukung kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Selatan, khususnya dalam pelaksanaan program pembangunan ekonomi daerah. Sebagai BUMD yang berorientasi pada pemberdayaan ekonomi rakyat, keberadaan bank ini memperkuat upaya Bappeda dalam meningkatkan akses permodalan bagi UMKM, koperasi, dan pelaku usaha kecil di tingkat lokal.

Melalui fungsi intermediasi keuangan dan sinergi dengan kebijakan pemerintah daerah, Bank Perekonomian Rakyat Sumsel berkontribusi terhadap pencapaian sasaran pembangunan ekonomi inklusif, pengurangan kesenjangan antarwilayah, serta peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat. Dengan demikian, kolaborasi antara bank daerah dan Bappeda Sumatera Selatan menjadi salah satu faktor pendukung keberhasilan implementasi rencana pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berkeadilan.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis

2.2.1. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda Provinsi Sumatera Selatan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai koordinator perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, Bappeda Provinsi Sumatera Selatan menghadapi sejumlah tantangan yang perlu segera diatasi. Tantangan utama adalah masih belum optimalnya kualitas dan konsistensi dokumen perencanaan pembangunan daerah. Hal ini dipengaruhi oleh keterbatasan kualitas data dan informasi, variasi kapasitas perencana di perangkat daerah, serta lemahnya integrasi antara dokumen perencanaan dan penganggaran. Selain itu, koordinasi lintas sektor maupun lintas wilayah belum berjalan maksimal, sehingga berpotensi menimbulkan tumpang tindih program dan belum sepenuhnya mampu menjawab isu-isu pembangunan yang kompleks, seperti kemiskinan, pengangguran, kesenjangan wilayah, serta degradasi lingkungan.

Di sisi lain, Bappeda juga menghadapi tantangan terkait dinamika regulasi yang berkembang cepat di tingkat nasional. Perubahan kebijakan pusat yang tidak segera diadaptasi berpotensi menimbulkan ketidaksinkronan dengan dokumen perencanaan daerah. Perbedaan kemampuan fiskal antar kabupaten/kota juga menjadi hambatan tersendiri dalam mewujudkan keselarasan pembangunan lintas wilayah.

Namun demikian, terdapat pula berbagai peluang yang dapat dimanfaatkan Bappeda dalam meningkatkan kualitas pelayanan perencanaan pembangunan daerah. Dukungan regulasi nasional yang semakin menekankan pada akuntabilitas kinerja serta penerapan *performance based budgeting* memberikan ruang bagi Bappeda untuk memperkuat fungsi koordinasi dan sinkronisasi. Momentum penyusunan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025–2029 juga menjadi peluang penting untuk mendorong standarisasi kualitas dokumen perencanaan perangkat daerah, sekaligus memastikan konsistensi antara RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra, dan Renja.

Selain itu, kemajuan teknologi informasi membuka peluang besar bagi pengembangan sistem perencanaan digital yang lebih transparan, partisipatif, dan berbasis data (*evidence based planning*). Integrasi sistem informasi pembangunan melalui SIPD dan penguatan satu data sumatera selatan dapat meningkatkan akurasi, konsistensi, dan keterpaduan informasi dalam mendukung perumusan kebijakan pembangunan. Dukungan pemerintah pusat melalui program penguatan SAKIP dan penyusunan indikator kinerja utama juga memperkuat peran Bappeda dalam mengoordinasikan kinerja perangkat daerah.

Dengan tantangan dan peluang tersebut, Bappeda Provinsi Sumatera Selatan dituntut untuk memperkuat kapasitas kelembagaan, meningkatkan kompetensi perencana, mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi, serta memperkuat koordinasi lintas sektor dan wilayah. Upaya ini diharapkan dapat mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang lebih berkualitas, konsisten, berkelanjutan, dan berorientasi pada hasil demi mendukung terwujudnya Sumatera Selatan yang maju, inklusif, dan berdaya saing. Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Bappeda Provinsi Sumatera Selatan dijabarkan lebih lengkap pada tabel analisis SWOT berikut:



Tabel 2.10
Analisis SWOT

Kekuatan (Strengths)	Weaknesses (Kelemahan)
Memiliki kewenangan strategis sebagai institusi utama perencana pembangunan daerah.	Kualitas perencanaan belum sepenuhnya berbasis data, <i>evidence based</i> , dan terukur.
Koordinasi lintas sektor dan lintas perangkat daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan.	Belum optimalnya integrasi antara dokumen perencanaan dan penganggaran.
SDM yang berpengalaman dalam penyusunan RPJMD, Renstra, RKPD, dll	Kapasitas teknis terkait perencanaan pembangunan berkelanjutan masih terbatas.
Akses terhadap basis data pembangunan dan kebijakan pusat.	Koordinasi lintas OPD belum maksimal, berdampak pada tumpang tindih program.
Komitmen terhadap pengarusutamaan Gender, SDGs, KLHS, dan perencanaan berkelanjutan.	Ketergantungan terhadap data sektoral dari OPD teknis yang belum konsisten
Opportunities (Peluang)	Threats (Ancaman)
Dukungan regulasi nasional terhadap pembangunan berkelanjutan dan perencanaan daerah.	Ketidaksesuaian antara prioritas pembangunan pusat dan daerah.
Integrasi sistem SIPD berbasis digital.	Perubahan kebijakan nasional yang dinamis dan cepat.
Akses pendanaan pembangunan berkelanjutan dari pemerintah pusat dan mitra pembangunan.	Ancaman degradasi lingkungan dan dampak perubahan iklim terhadap rencana pembangunan.



Pemanfaatan teknologi data spasial dan sistem informasi pembangunan.	Keterbatasan partisipasi publik dalam proses perencanaan.
Semakin tingginya kesadaran akan pentingnya perencanaan yang inklusif dan adaptif.	Risiko sosial-ekonomi yang meningkat dan memerlukan perencanaan adaptif dan cepat.

Berdasarkan hasil analisis SWOT, dapat disimpulkan bahwa Bappeda Provinsi Sumatera Selatan memiliki peran strategis sebagai motor utama dalam penyusunan dan pengendalian arah kebijakan pembangunan daerah. Kekuatan Bappeda terletak pada posisi kelembagaan yang memiliki kewenangan lintas sektor, kemampuan koordinasi antar perangkat daerah, pengalaman dalam penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan, serta komitmen terhadap integrasi kebijakan nasional seperti tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) dan pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Namun demikian, di tengah peran strategis tersebut, Bappeda masih menghadapi sejumlah kelemahan internal yang memengaruhi efektivitas fungsi perencanaannya. Di antaranya adalah belum optimalnya integrasi data sektoral yang komprehensif dan mutakhir, rendahnya pemanfaatan teknologi informasi perencanaan secara maksimal, serta keterbatasan kapasitas teknis dalam menyusun dokumen perencanaan yang berbasis bukti dan berorientasi pada keberlanjutan. Selain itu, belum sepenuhnya terbangunnya sinergi antara perencanaan dan penganggaran menyebabkan ketidaksesuaian antara program yang dirancang dengan kebutuhan riil pembangunan.

Tantangan eksternal juga cukup signifikan. Perubahan arah dan kebijakan pembangunan nasional yang cepat menuntut kemampuan adaptasi yang tinggi dari pemerintah daerah, sementara tekanan terhadap lingkungan hidup dan sumber daya alam terus meningkat sebagai konsekuensi dari pola pembangunan yang belum sepenuhnya berkelanjutan. Di sisi lain, partisipasi publik dan kolaborasi multipihak dalam proses perencanaan masih relatif terbatas, yang dapat berdampak pada rendahnya akuntabilitas dan relevansi program pembangunan.

Meski demikian, terdapat berbagai peluang strategis yang dapat dimanfaatkan Bappeda untuk memperkuat perannya. Kemajuan teknologi informasi memungkinkan optimalisasi sistem informasi pembangunan daerah secara terintegrasi. Dukungan kebijakan nasional terkait pembangunan rendah karbon, reformasi birokrasi, dan penguatan tata kelola pembangunan juga membuka ruang perbaikan sistemik. Selain itu, adanya potensi kemitraan dengan lembaga donor, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat sipil dapat dimaksimalkan untuk memperkaya perspektif dan memperkuat kapasitas kelembagaan.

Dengan memperhatikan keempat aspek SWOT secara menyeluruh, Bappeda Provinsi Sumatera Selatan diharapkan dapat melakukan langkah-langkah penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan mendorong partisipasi multipihak. Hal ini penting untuk memastikan bahwa dokumen perencanaan pembangunan yang disusun ke depan bersifat holistik, responsif terhadap isu-isu strategis, terukur secara kinerja, serta mampu menjawab tantangan keberlanjutan dan ketahanan daerah dalam jangka panjang.

2.2.2. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappeda Provinsi Sumatera Selatan

Bappeda Provinsi Sumatera Selatan memiliki mandat sebagai instansi yang menangani fungsi penunjang pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan, dengan peran strategis sebagai koordinator, perumus kebijakan, pengendali serta evaluator pembangunan daerah. Pembangunan daerah diarahkan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan makmur melalui perencanaan yang memberikan panduan yang jelas bagi seluruh pemangku kepentingan. Dalam hal ini, Bappeda Provinsi Sumatera Selatan bertanggung jawab memastikan proses perencanaan dilaksanakan secara sistematis, terukur, partisipatif serta harmonis antara kebijakan di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Namun demikian, Dalam implementasi tugas dan fungsinya, Bappeda Provinsi Sumatera Selatan masih menghadapi berbagai tantangan sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut:



Tabel 2.11
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum Optimalnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Belum Optimalnya Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	– Belum adanya Data dan informasi pembangunan yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi. – Kapasitas SDM perencana masih terbatas, belum menguasai metodologi berbasis <i>evidence based policy</i>. – Penyusunan dokumen masih administratif, kurang analisis substansi. – Belum Optimalnya Pemanfaatan Hasil evaluasi pembangunan sebelumnya.
	Belum Optimalnya Sinergitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	– Belum Optimalnya Konsistensi Sinkronisasi antara RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra, dan Renja. – Belum Optimalnya Koordinasi lintas perangkat daerah dan antar wilayah. – Belum Optimalnya Partisipasi stakeholder. – Belum Optimalnya Adaptasi Perubahan regulasi pusat ke Daerah.
	Belum Optimalnya Keterhubungan Perencanaan Pembangunan dengan	– Belum Optimalnya Integrasi antara dokumen perencanaan dan kinerja.



Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Perencanaan Kinerja	– Belum Optimalnya Indikator kinerja perencanaan dengan indikator perangkat daerah. – Belum Optimalnya Konsistensi Penganggaran berbasis kinerja. – Belum Optimalnya Monitoring dan evaluasi yang memberi umpan balik maksimal.
	Belum Optimalnya Tata Kelola Organisasi	– Belum Optimalnya Pemberian Kewenangan dan Tanggung Jawab Kerja – Belum Optimalnya Kapasitas dan Manajemen SDM – Belum Optimalnya Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah

2.2.3. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 adalah “SUMSEL MAJU TERUS UNTUK SEMUA” dalam rangka mencapai visi tersebut dilakukan upaya yang dijabarkan dalam 7 Misi yaitu:

1. Mewujudkan masyarakat Sumatera Selatan yang berkualitas, sehat, cerdas, inovatif, produktif, berakhlak, berkeadilan, dan berkeadaban melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan sumber daya manusia Sumatera Selatan yang berdaya saing.
2. Mewujudkan ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.
3. Mewujudkan keterkaitan (nexus) yang kuat antara ketahanan pangan, ketahanan energi, dan kedaulatan air sebagai upaya mengatasi perubahan iklim.

4. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi antar kabupaten/kota dan pelayanan dasar yang berkualitas dan ramah lingkungan.
5. Meningkatkan kehidupan beragama, seni, dan budaya untuk membangun karakter kehidupan sosial yang agamis dan berbudaya, ditopang fisik yang sehat melalui kegiatan olahraga, dan pengembangan pariwisata berorientasi pariwisata religius. Memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja serta perlindungan sosial yang terjaga untuk menurunkan angka kemiskinan.
6. Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis digital, menuju pelayanan publik yang berkualitas.
7. Mewujudkan kehidupan beragama, seni dan budaya dalam masyarakat yang menjunjung tinggi toleransi dan berorientasi pada kearifan lokal.

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD 2025-2029 serta sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan pada perencanaan yang diselenggarakan Bappeda maka fungsi dan tugas Bappeda terkait erat dengan pencapaian misi ke-6, yaitu “Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis digital, menuju pelayanan publik yang berkualitas”. Khususnya terkait dengan tujuan terwujudnya tata kelola pemerintahan dengan sasaran meningkatnya kualitas dan kapabilitas birokrasi.

Bappeda Provinsi Sumatera Selatan sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam proses perencanaan, penganggaran, pengendalian, serta evaluasi pembangunan daerah, BAPPEDA memiliki peran sentral dalam memastikan tercapainya tujuan pembangunan daerah yang efektif dan berkelanjutan. Untuk itu, peningkatan kualitas dan kapabilitas birokrasi internal BAPPEDA menjadi prasyarat utama bagi terselenggaranya proses perencanaan yang berkualitas dan diharapkan akan menjadi pondasi utama dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang efektif, adaptif, dan berdampak nyata bagi masyarakat.

2.2.4. Telaahan Keterkaitan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dengan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappeda Provinsi Sumatera Selatan

Sebagai institusi yang memegang peranan strategis dalam merumuskan arah kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah, Bappeda Provinsi Sumatera Selatan memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap langkah pembangunan yang dirancang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan aspek keberlanjutan lingkungan, keadilan sosial, dan ketahanan wilayah terhadap berbagai tantangan jangka panjang. Dalam rangka penyusunan dokumen Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029, pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) menjadi suatu keharusan normatif dan substansial sebagai salah satu instrumen untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam kerangka kebijakan dan perencanaan sektoral maupun lintas sektor. KLHS pada Renstra ini tidak hanya berfungsi sebagai alat evaluatif terhadap potensi dampak lingkungan dari kebijakan yang dirumuskan, tetapi juga sebagai wahana strategis untuk mengidentifikasi isu-isu pembangunan utama yang bersifat sistemik, lintas wilayah, dan berdampak jangka panjang, khususnya terkait dengan pelestarian sumber daya alam, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, peningkatan kualitas hidup masyarakat, serta penguatan tata kelola pembangunan daerah.

Dengan demikian, telaahan ini disusun untuk memberikan landasan ilmiah, analisis kritis, dan rekomendasi strategis guna mendukung penyusunan Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Selatan yang lebih responsif terhadap dinamika pembangunan dan selaras dengan komitmen nasional serta global terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan.

KLHS mengidentifikasi sembilan isu strategis pembangunan berkelanjutan di Provinsi Sumatera Selatan, yaitu :

- a. Belum optimalnya pengentasan kemiskinan ekstrem dan *stunting* yang menjadi masalah sosial yang saling terkait dan memberikan dampak jangka panjang pada pembangunan Provinsi Sumatera Selatan, Kedua masalah ini memerlukan perhatian serius dan pendekatan yang terintegrasi untuk dapat diatasi dengan cepat dan efektif.

- b. Pengembangan potensi ekonomi daerah yang belum optimal menjadi salah satu isu yang signifikan dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang merata di Indonesia. Setiap daerah di Indonesia memiliki potensi ekonomi yang beragam, seperti sektor pertanian, pariwisata, perikanan, industri kreatif, dan energi terbarukan. Namun, sering kali potensi ini belum dimaksimalkan karena berbagai hambatan yang menghalangi pembangunan daerah secara optimal.
- c. Kerentanan ketahanan pangan yang disebabkan karena tekanan pertumbuhan penduduk, *stunting* meningkat, kesejahteraan petani belum optimal, dan tata kelola pertanian dan perkebunan masih kurang optimal.
- d. Degradasi sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil menjadi isu yang perlu diperhatikan dengan tingginya konversi lahan, pencemaran wilayah, dan perubahan dan kerusakan habitat, termasuk mangrove. Kondisi penurunan kualitas sumber daya pesisir dan pulau - pulau kecil memberikan dampak pada penurunan kualitas hidup masyarakat pesisir, habitat, DDTL, dan semakin rentan akan bencana pesisir (intrusi air laut, abrasi, sedimentasi, dan sebagainya).
- e. Ancaman keanekaragaman hayati hal ini disebabkan karena degradasi keanekaragaman hayati darat dan perairan. Isu penurunan keanekaragaman hayati darat dan perairan termasuk di dalamnya eksploitasi sumber keanekaragaman hayati, konflik satwa-manusia, dan penurunan kondisi biofisik habitat satwa. Selain itu, berdasarkan pelingkupan potensi dampak yang ditimbulkan antara lain kepunahan spesies, korban jiwa dari konflik satwa manusia, dan menimbulkan ketidakstabilan ekologis. Dampak yang ditimbulkan juga berkaitan dengan alih fungsi lahan, kerusakan ekosistem gambut, dan perubahan iklim.
- f. Alih fungsi lahan dan hutan cukup masif terjadi dan memberikan dampak peningkatan lahan kritis (pada Tahun 2022, lahan kritis seluas 180.310,48 Ha (91,44 %) dan lahan sangat kritis seluas 16.868,84 Ha (8,56%)). Isu ini disepakati karena kerusakan gambut semakin meningkat, demikian pula dengan keadaan kebakaran hutan dan lahan gambut, pengelolaan mangrove yang kurang efektif, deforestasi terus meningkat, kemiskinan di lahan

gambut, pengendalian dan reklamasi lahan tambang, serta ketidaksesuaian pemanfaatan ruang. Selain itu, isu alih fungsi lahan dan hutan memberikan risiko pada penurunan keanekaragaman hayati, degradasi hutan, konflik lahan, penurunan kesuburan tanah, dan secara makro berdampak pada perubahan iklim.

- g. Belum optimalnya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Hal ini dikarenakan beberapa hal seperti: meningkatnya kerentanan terhadap perubahan iklim, meningkatnya kejadian bencana hidrometeorologi, kerentanan daerah pesisir terhadap dampak perubahan iklim, pengelolaan persampahan dan limbah yang belum optimal, penurunan kualitas udara, rendahnya kapasitas adaptasi bencana, transisi energi baru terbarukan/rendah karbon, *climate-smart agriculture*, serta konektivitas infrastruktur kewilayahan terbatas.
- h. Belum optimalnya pengendalian terhadap pencemaran polusi dan kerusakan lingkungan membuat Sumatera Selatan menjadi salah satu Provinsi yang menyumbangkan polusi asap terbesar akibat terjadinya kebakaran lahan dan hutan, selain pada polusi kebakaran ini sendiri juga akan berdampak pada kerusakan ekosistem yang ada di sekitarnya termasuk kepada manusia.
- i. Belum optimalnya pengelolaan sumber daya air berkelanjutan, kondisi tersebut dapat tercermin pada saat musim kemarau panjang terlebih saat el nino terjadi berbagai wilayah di Sumatera Selatan mengalami kekeringan dan masyarakat susah untuk mendapatkan air bersih serta kebutuhan air untuk pertanian juga menjadi permasalahan yang dialami. Karena hal tersebut menyebabkan rendahnya capaian air minum dan sanitasi.

Dengan mengidentifikasi sembilan isu strategis yang mencerminkan kompleksitas tantangan pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan, telaahan ini menegaskan bahwa peran Bappeda tidak hanya terfokus pada perencanaan program dan kegiatan pembangunan semata, tetapi juga pada bagaimana memastikan bahwa seluruh proses perencanaan berjalan selaras dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) menjadi instrumen vital dalam memastikan bahwa setiap kebijakan yang tertuang dalam Renstra Bappeda Provinsi



Sumatera Selatan Tahun 2025–2029 mampu merespons isu-isu krusial secara terintegrasi, berbasis data, dan berorientasi pada keberlanjutan jangka panjang. Melalui integrasi KLHS ke dalam proses penyusunan Renstra, diharapkan arah pembangunan daerah tidak hanya mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan sosial, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan wilayah, dan memperkuat fondasi Sumatera Selatan menuju pembangunan yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan.

2.2.5. Penentuan Isu Strategis

Penentuan isu-isu strategis Bappeda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029, didasarkan pada faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan ditinjau dari:

1. Kelompok sasaran layanan Bappeda Provinsi Sumatera Selatan.
2. Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Bappeda Provinsi Sumatera Selatan.
3. Telaahan terhadap Kajian Lingkungan Hidup (KLHS).

Bappeda merupakan lembaga perencanaan dan pengendalian yang bersifat lintas wilayah, sektoral dan waktu yang diharapkan dapat mengakomodasi kebijakan- kebijakan pembangunan wilayah dan sektoral secara menyeluruh dalam satu kesatuan pembangunan wilayah yang diharapkan mampu menghasilkan kualitas perencanaan pembangunan untuk mencapai tujuan pembangunan daerah. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, masih terdapat sejumlah tantangan yang kemudian teridentifikasi sebagai isu strategis dalam bidang perencanaan, sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.12
Isu Strategis Perangkat Daerah

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH			ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan kabupaten/kota Se-Sumatera Selatan	1. Belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah 2. Belum optimalnya sinergitas dokumen perencanaan	Pembangunan berkelanjutan belum semuanya terintegrasi dalam perencanaan dan pengambilan keputusan pembangunan	Belum Tercapainya Program SDG's Dan Transisi Energi Dalam Pembangunan Daerah	Belum Optimalnya Perubahan Regulasi Peraturan Perundang-Undangan Yang Belum Berdampak Pada Daerah	Belum Optimalnya Kerjasama Perencanaan Pembangunan antar Wilayah	Belum optimalnya kualitas perencanaan pembangunan daerah



	Pembangunan Daerah	di tingkat daerah				
	3. Belum optimalnya keterhubungan perencanaan pembangunan dengan perencanaan kinerja					
	4. Belum optimalnya tata kelola organisasi					

Berdasarkan analisis tersebut, maka isu strategis yang perlu ditangani Bappeda Provinsi Sumatera Selatan dalam menyelenggarakan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan adalah Belum Optimalnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025–2029 sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD, serta mendukung pencapaian target pembangunan nasional yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Bappeda Provinsi Sumatera Selatan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan kebijakan umum sebagai dasar penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra) Tahun 2025–2029.

Tujuan Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 yaitu “Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah” yang didukung oleh indikator tujuan yaitu “Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah”. Selanjutnya, sasaran Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 adalah :

1. Meningkatkan Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah
2. Meningkatkan Keselarasan (Sinergitas) Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
3. Meningkatkan Kualitas Pengendalian dan Evaluasi rencana Pembangunan Daerah.
4. Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Bappeda

Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda Provinsi Sumatera Selatan beserta indikator kinerjanya sebagaimana dalam Tabel 3.1.



Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Bappeda Provinsi Sumatera Selatan

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Baseline 2024	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030	Ket.
Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah; Evaluasi Rancangan Perda tentang RPJPD, RPJMD, dan Perubahan RPJPD/RPJMD	Meningkatnya Kualitas Perencanaaan Pembangunan Daerah		Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	96,51	96,55	96,60	96,65	96,70	96,75	96,80	
		Meningkatnya Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Kesesuaian antara Isu Strategis dengan Prioritas Daerah	97,30	97,35	97,40	97,45	97,50	97,55	97,60	
Inmendagri No.2 Tahun 2025 tentang Pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029		Meningkatnya Keselarasan (Sinergitas) Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Persentase Keselarasan Dokumen RPJMD dengan Dokumen RPJMN	90,00	90,05	90,10	90,15	90,20	90,25	90,30	
			2. Persentase Keselarasan Dokumen RKPD dengan RKP	93,20	93,25	93,30	93,35	93,40	93,45	93,50	
Permendagri No.18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah			3. Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	N/A	80-100	80-100	80-100	80-100	80-100	80-100	
			4. Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	N/A	80-100	80-100	80-100	80-100	80-100	80-100	
Sasaran RPJMD Provinsi Sumatera Selatan : Meningkatnya Kualitas dan Kapabilitas Birokrasi Sasaran RPJMD Provinsi Sumatera Selatan : Meningkatnya Kualitas dan Kapabilitas Birokrasi			5. Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD	N/A	80-100	80-100	80-100	80-100	80-100	80-100	
		Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Evaluasi rencana Pembangunan Daerah	Persentase target tujuan dan sasaran pembangunan daerah menjadi target dan sasaran kinerja Perangkat Daerah	100	100	100	100	100	100	100	
		Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Bappeda	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	100	100	100	100	100	100	100	



1. Meningkatnya Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah.

Sasaran ini diukur melalui “Persentase Kesesuaian antara Isu Strategis dengan Prioritas Daerah”. Indikator ini penting untuk memastikan bahwa dokumen perencanaan tidak hanya menjadi formalitas, tetapi juga responsif terhadap kondisi faktual dan kebutuhan nyata di daerah. Semakin tinggi persentase kesesuaian, semakin baik kualitas dokumen perencanaan tersebut dalam menjawab tantangan pembangunan. Indikator tersebut dapat diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Isu Strategis yang diakomodir Prioritas Daerah}}{\text{Total Isu Strategis}} \times 100$$

2. Meningkatnya Keselarasan (Sinergitas) Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah.

Sinergitas antara dokumen perencanaan daerah dan nasional menjadi krusial untuk menciptakan kesinambungan pembangunan, tingginya tingkat keselarasan menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah berhasil menerjemahkan arah kebijakan pembangunan nasional ke dalam perencanaan jangka menengah dan tahunan di tingkat daerah, yang pada gilirannya dapat memperkuat keterpaduan program lintas sektor dan wilayah. Sasaran ini diukur dengan lima indikator, yaitu:

- a. Persentase Keselarasan Dokumen RPJMD dengan Dokumen RPJMN, Indikator tersebut dapat diukur dengan menggunakan Rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Indikator RPJMN yang Selaras dalam RPJMD}}{\text{Jumlah Indikator RPJMN yang Relevan untuk Daerah}} \times 100$$

- b. Persentase Keselarasan Dokumen RKPD dengan RKP, Indikator tersebut dapat diukur dengan menggunakan Rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Program/Kegiatan Prioritas RKP yang Diakomodasi dalam RKPD}}{\text{Jumlah Program/Kegiatan Prioritas RKP yang Relevan untuk Daerah}} \times 100$$



- c. Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD, Indikator tersebut dapat diukur dengan menggunakan Rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Target Indikator Makro pada RPJMD}}{\text{Target Makro RKPD}} \times 100$$

- d. Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD, Indikator tersebut dapat diukur dengan menggunakan Rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Target IKK pada RPJMD Per Urusan}}{\text{Target IKU Renstra PD}} \times 100$$

- e. Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD, Indikator tersebut dapat diukur dengan menggunakan Rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Target Indikator Kinerja Program pada RKPD}}{\text{Target Indikator Program di Renja PD}} \times 100$$

3. Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Evaluasi rencana Pembangunan Daerah.

Integrasi antara perencanaan pembangunan dan kinerja perangkat daerah menjadi tolok ukur penting efektivitas pelaksanaan pembangunan. Hal ini diukur dengan Indikator “persentase target tujuan dan sasaran pembangunan daerah menjadi target dan sasaran kinerja perangkat daerah”. Semakin tinggi angka ini, semakin menunjukkan bahwa dokumen perencanaan benar-benar diimplementasikan oleh perangkat daerah sebagai acuan kinerja, indikator tersebut dapat diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Target dan Sasaran Pembangunan Daerah yang Dijadikan Target/Sasaran Perangkat Daerah}}{\text{Total Jumlah Target dan Sasaran Pembangunan Daerah}} \times 100$$

4. Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Bappeda

Sebagai lembaga perencana daerah, Bappeda memegang peran kunci dalam memastikan keberhasilan perencanaan pembangunan. Oleh karena itu, peningkatan tata kelola organisasi Bappeda diukur melalui “Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah”. Indikator ini mencerminkan seberapa baik Bappeda mendukung kebutuhan perencanaan perangkat daerah lainnya, baik dari sisi data, fasilitasi, maupun koordinasi.



3.2 Strategi Bappeda Provinsi Sumatera Selatan Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029

Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 dilaksanakan melalui pendekatan bertahap dan saling berkesinambungan. Tahapan tersebut bukan hanya sekedar urutan waktu melainkan kerangka kerja yang merefleksikan fokus kerja Bappeda Provinsi Sumatera Selatan.

Tabel 3.2
Penahapan Renstra Perangkat Daerah

TAHAP 1 (2026)	TAHAP 2 (2027)	TAHAP 3 (2028)	TAHAP 4 (2029)	TAHAP 5 (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pemetaan dan Konsolidasi data dan informasi sebagai dasar perencanaan Daerah Berbasis digital	Penyelarasan sistem dan standar perencanaan melalui Aplikasi	Penguatan Digitalisasi perencanaan berbasis tematik, holistik, integratif, dan spasial (THIS)	Monitoring dan evaluasi kinerja pembangunan daerah melalui sistem aplikasi yang terintegrasi	Pemantapan Proses Perencanaan Pembangunan Daerah Menuju Digitalisasi Pelayanan Publik
Penyiapan sistem database Perencanaan Pembangunan Daerah terpadu	Pengawasan dan Pembinaan SDM Perencana dalam mengelola sistem aplikasi perencanaan daerah secara berkala	Penyusunan dokumen perencanaan berbasis data spasial dan tematik yang dapat diakses melalui website pemda	Integrasi aplikasi Monitoring dan Evaluasi pada sistem perencanaan daerah	Integrasi sistem perencanaan dengan pelayanan publik berbasis digital
Pemetaan dan inventarisasi data sektoral dan spasial dari seluruh OPD Secara Berkala	Penyusunan SOP teknis perencanaan berbasis digital	Pemuktahiran data lintas sektor dan wilayah yang terintegrasi	Penyajian dan penggunaan dashboard kinerja pembangunan sebagai bahan Monev	Partisipasi publik melalui platform digital
Konsolidasi Standarisasi metadata pembangunan	Penyelarasan Perencanaan Daerah dengan Perencanaan Nasional Berbasis Digital	Penguatan Konsep Holistik Perencanaan Berbasis Digital	Penyusunan laporan kinerja pembangunan sistematis periodik	Penetapan grand desain roadmap Digitalisasi Perencanaan pembangunan daerah berbasis kolaborasi multipihak
Penguatan kapasitas SDM dalam manajemen data	Updating Penguatan Data pada Peningkatan Kapasitas SDM	Optimalisasi Rencana Pendanaan Pembangunan yang Integratif Berbasis Digital	Penguatan Evaluasi Pembangunan Berbasis Digital	Pemanatapan SDM pengelolaan Aplikasi Digital Perencanaan Pembangunan Daerah



3.3 Arah Kebijakan Bappeda Provinsi Sumatera Selatan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029

Arah Kebijakan strategis Bappeda Provinsi Sumatera Selatan lima tahun ke depan disusun berdasarkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan RPJMD. Rincian kebijakan tersebut disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Arah Kebijakan Renstra dan Strategi

No	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA	Rencana Strategis
1	SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) Penggunaan SIPD untuk sinkronisasi program pembangunan pusat dan daerah, monitor penggunaan anggaran, dan kinerja program prioritas agar data dan informasi menjadi satu titik pantau yang bisa dipertanggungjawabkan	Penerapan Sistem Pemerintahan Digital Terintegrasi untuk Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Pelayanan Publik	Penguatan sistem perencanaan berbasis digital sistem informasi pembangunan daerah (SIPD)	1. Optimalisasi penggunaan SIPD melalui pelatihan teknis berkelanjutan bagi perencana daerah. 2. Integrasi SIPD dengan Dokumen SIPD sehingga dokumen perencanaan, penganggaran, dan monitoring dapat ditelusuri dalam satu sistem 3. Penyusunan SOP digitalisasi perencanaan, untuk memastikan standar input, pengelolaan, dan validasi data lintas perangkat daerah.
2		Penguatan transparansi dan akuntabilitas melalui teknologi informasi dan partisipasi publik digital	Pengembangan mekanisme perencanaan partisipatif berbasis digital, publikasi terbuka dokumen perencanaan, dan pemanfaatan dashboard kinerja	1. Publikasi dokumen perencanaan secara terbuka melalui website resmi Bappeda 2. Peningkatan partisipasi masyarakat melalui media sosial resmi Bappeda, kanal



No	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA	Rencana Strategis
				konsultasi publik, dan aplikasi mobile. 3. Pengembangan dashboard kinerja yang dapat diakses publik dengan visualisasi capaian pembangunan secara real-time
3		Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan berbasis transformasi digital yang didukung oleh kualitas data dan informasi	Penguatan basis data sektoral dan spasial yang terintegrasi serta penyusunan dokumen perencanaan berbasis evidence	1. Penguatan sistem informasi geospasial (SIG) untuk mendukung analisis berbasis wilayah. 2. Kolaborasi dengan BPS, perguruan tinggi, dan lembaga riset guna memastikan kualitas dan validitas data perencanaan. 3. Pengembangan mekanisme verifikasi dan validasi data secara periodik agar tidak ada data tumpang tindih.

Dari penjelasan arah kebijakan dan Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Selatan pada tabel 3.3 tersebut diharapkan pembangunan perencanaan jangka menengah Provinsi Sumatera Selatan dapat mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang konsisten, transparan, partisipatif, berbasis data, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, kualitas dokumen perencanaan meningkat, dan dampaknya langsung pada efektivitas pelaksanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan.



BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Sebagai tindak lanjut atas Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 mengenai Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berkomitmen untuk menyelaraskan proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025–2029 secara serempak, terintegrasi, dan terkoordinasi. Dalam konteks tersebut, penyusunan Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025–2029 diarahkan tidak hanya untuk menjamin kesinambungan arah kebijakan pembangunan daerah, tetapi juga untuk memperkuat sinergi antara perencanaan dan penganggaran berbasis hasil. Renstra ini menjadi landasan strategis bagi Bappeda dalam merumuskan program, kegiatan, dan subkegiatan pembangunan yang lebih fokus, tepat sasaran, dan berdaya guna.

Melalui dokumen Renstra ini, Bappeda Provinsi Sumatera Selatan memastikan bahwa setiap program yang dirancang berkontribusi nyata terhadap pencapaian visi pembangunan jangka menengah daerah, dengan mengedepankan prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Dukungan terhadap penggunaan data dan sistem perencanaan terintegrasi juga menjadi prioritas dalam rangka mendorong tata kelola pemerintahan yang responsif, adaptif, dan berbasis kinerja. Dengan pendekatan ini, diharapkan pelaksanaan pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan dalam lima tahun ke depan dapat lebih terarah, berdampak luas, dan mampu menjawab kebutuhan serta aspirasi masyarakat secara berkelanjutan. Penjabaran mengenai Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung terwujudnya tujuan dan sasaran Bappeda Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 4.1
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Selatan

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/sub kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
Sasaran RPJMD Provinsi Sumatera Selatan : Meningkatnya Kualitas dan Kapabilitas Birokrasi Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah; Evaluasi Rancangan Perda tentang RPJPD, RPJMD, dan	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah				Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah		
		Meningkatnya Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah			Persentase Kesesuaian antara Isu Strategis dengan Prioritas Daerah		
			Meningkatnya Dukungan Data yang berkualitas dalam Perumusan Permasalahan Pembangunan		Persentase Ketersediaan Data Dalam Perumusan Permasalahan Pembangunan	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	
				Terlaksananya Pengumpulan Data Sesuai SOP	Persentase data sektoral Perencanaan pembangunan daerah yang Tersedia	Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
						Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	



NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/sub kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
Perubahan RPJPD/RPJMD Inmendagri No.2 Tahun 2025 tentang Pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Kepmendagri No.900.1-2850 Tahun 2025 Tentang perubahan ketiga atas keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 959-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi,						Sub Kegiatan Pembinaan dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	
						Sub Kegiatan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	
				Tersedianya Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	Persentase Tersediaanya Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
						Sub Kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
				Tersedianya Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	Persentase Tersediaanya Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	
						Sub Kegiatan Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	
				Tersedianya Analisis Data dan Informasi	Persentase Tersediaanya Analisis Data dan Informasi	Kegiatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di	



NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/sub kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah				Perencanaan Pembangunan	Perencanaan Pembangunan	Bidang Pembangunan Daerah	
						Sub Kegiatan Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	
						Sub Kegiatan Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	
						Sub Kegiatan Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi	
			Meningkatnya Konsistensi antara Permasalahan dan Isu strategis dengan Program Prioritas Daerah		Persentase Konsistensi antara Permasalahan dan Isu strategis dengan Program Prioritas Daerah	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	
				Meningkatnya Partisipasi Publik dalam Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase rekomendasi Usulan pemangku kepentingan yang terakomodir dalam dokumen perencanaan	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	



NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ sub kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
						Sub Kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Publik	
						Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	
			Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah	Meningkatnya Koordinasi, Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Lintas Sektor	Persentase Program Prioritas Daerah yang Holistik dan Integratif antar Sektor	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	
						Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah	
			Meningkatnya Konsistensi antara Permasalahan dan Isu strategis dengan Program Prioritas Daerah		Persentase Konsistensi antara Permasalahan dan Isu strategis dengan Program Prioritas Daerah	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
				Meningkatnya Koordinasi, Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Lintas Sektor	Persentase Program Prioritas Daerah yang Holistik dan Integratif antar Sektor	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	



NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ sub kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
						Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	
						Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	
				Meningkatnya Koordinasi, Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Lintas Sektor	Persentase Program Prioritas Daerah yang Holistik dan Integratif antar Sektor	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	
						Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	
						Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan	



NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/sub kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
						Pembangunan Daerah Bidang SDA (Sumber Daya Alam)	
				Meningkatnya Koordinasi, Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Lintas Sektor	Persentase Program Prioritas Daerah yang Holistik dan Integratif antar Sektor	Kegiatan Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
						Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	
						Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	
		Meningkatnya Keselarasan (Sinergitas) antar Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah			(1) Persentase Keselarasan Dokumen RPJMD dengan Dokumen RPJMN (2) Persentase Keselarasan		



NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ sub kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
					Dokumen RKPD dengan RKP (3) Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD (4) Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD (5) Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD		
			Meningkatnya Keselarasan Target Indikator Makro Pembangunan Antara Nasional dengan Provinsi		Persentase Keselarasan Target Indikator Makro Pembangunan Antara Pemerintah Provinsi dengan Nasional	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	
				Meningkatnya Keselarasan Target Indikator Makro Pembangunan Antara Provinsi dan Kabupaten/Kota	Persentase Keselarasan Target Indikator Makro Pembangunan Antara Provinsi dan Kabupaten/Kota	Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
						Sub Kegiatan Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	



NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ sub kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Meningkatnya Keselarasan Target Pembangunan Daerah dengan Target Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Target Pembangunan Daerah dengan Target Perangkat Daerah	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	
						Sub Kegiatan Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	
			Meningkatnya Keselarasan Target Indikator Makro Pembangunan Antara Nasional dengan Provinsi		Persentase Keselarasan Target Indikator Makro Pembangunan Antara Pemerintah Provinsi dengan Nasional	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
				Meningkatnya Keselarasan Target Pembangunan Daerah dengan Target Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Target Pembangunan Daerah dengan Target Perangkat Daerah	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
						Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	
						Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	
				Meningkatnya Keselarasan	Persentase Keselarasan Target	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian	



NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ sub kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Target Pembangunan Daerah dengan Target Perangkat Daerah	Pembangunan Daerah dengan Target Perangkat Daerah	dan SDA (Sumber Daya Alam)	
						Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	
						Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	
				Meningkatnya Keselarasan Target Pembangunan Daerah dengan Target Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Target Pembangunan Daerah dengan Target Perangkat Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
						Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	
						Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	



NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/sub kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
			Meningkatnya Keselarasan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Nasional di Provinsi		Persentase Keselarasan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Nasional yang diakomodir pada Dokumen Perencanaan Provinsi	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	
				Meningkatnya Keselarasan Program Prioritas Nasional dan Daerah	Persentase Keselarasan Program Prioritas Nasional dan Daerah	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	
						Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	
				Tersediannya Dukungan Pendanaan Daerah dalam mendukung Prioritas Nasional	Persentase Prioritas Nasional yang di dukung pendanaan	Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
						Sub Kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	



NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ sub kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
		Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Evaluasi rencana Pembangunan Daerah			Persentase target tujuan dan sasaran pembangunan daerah menjadi target dan sasaran kinerja Perangkat Daerah		
			Meningkatnya Pengendalian Proses Perencanaan Pembangunan Daerah		RKPD Tepat Waktu sesuai dengan jadwal yg ditentukan	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
				Terlaksananya Tahapan Penyusunan RKPD yang tepat waktu	Persentase Tahapan Penyusunan RKPD yang tepat waktu	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
						Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
						Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	



NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ sub kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya Tahapan Penyusunan RKPD yang tepat waktu	Persentase Tahapan Penyusunan RKPD yang tepat waktu	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	
						Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
						Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
				Terlaksananya Tahapan Penyusunan RKPD yang tepat waktu	Persentase Tahapan Penyusunan RKPD yang tepat waktu	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
						Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
						Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	



NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ sub kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
						(RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
			Meningkatnya kualitas Evaluasi Hasil Rencana Pembangunan Daerah		Persentase Capaian Target Kinerja Utama Pembangunan Daerah Provinsi > 75%	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	
				Meningkatnya Koordinasi Pelaporan Hasil Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan	Persentase Perangkat Daerah yang Menyampaikan laporan Hasil Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan	Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
						Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Kerja sama Daerah	
				Meningkatnya Pemantauan Pelaksanaan Program Prioritas Daerah	Persentase Program Prioritas Daerah Pemantauan Pelaksanaan	Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
						Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	
				Meningkatnya kualitas Evaluasi Hasil Rencana Pembangunan Daerah	Persentase Capaian Target Kinerja Utama Pembangunan Daerah Provinsi > 75%	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
				Meningkatnya Pemantauan	Persentase Program Prioritas Daerah	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang	



NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/sub kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Pelaksanaan Program Prioritas Daerah	Pemantauan Pelaksanaan	Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
						Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	
						Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	
				Meningkatnya Pemantauan Pelaksanaan Program Prioritas Daerah	Persentase Program Prioritas Daerah Pemantauan Pelaksanaan	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	
						Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan bidang Perekonomian	
						Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi	



NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ sub kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	
				Meningkatnya Pemantauan Pelaksanaan Program Prioritas Daerah	Persentase Program Prioritas Daerah Pemantauan Pelaksanaan	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
						Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	
						Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	
		Terlaksananya Tata Kelola Organisasi Bappeda			Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah		
			Tercapainya Kualitas Tata kelola Perencanaan,Evalua		Persentase Dokumen PEP yang tersusun	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	



NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ sub kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
			si, dan Pelaporan (PEP) Perangkat Daerah			DAERAH PROVINSI	
				Terlaksananya Administrasi Perkantoran yang Terlayani	Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
				Tercapainya Kinerja yang meningkat/ berkembang	Persentase Sistem Capaian Kinerja yang meningkat / berkembang	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan	



NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/sub kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
					Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	
					Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	
					Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Perangkat	



NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/sub kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
					Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Daerah Urusan Rangka Perencanaan Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang yang Diampu dalam Penyusunan Dokumen	
					Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pendukung Statistik Daerah Hasil Walidata Sektoral	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
					Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Sub Kegiatan Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	
					Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	Sub Kegiatan Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	



NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ sub kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
			Tercapainya Kualitas Tata Kelola Penganggaran dan Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Dokumen Penganggaran dan Keuangan yang Tersusun	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
				Tercapainya Kinerja yang meningkat/berkembang	Persentase Sistem Capaian Kinerja yang meningkat / berkembang	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
				Terlaksananya Administrasi Perkantoran yang Terlayani	Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan	Sub Kegiatan Pelaksanaan	



NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ sub kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
					dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	



NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ sub kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
			Tercapainya Kualitas Tata Kelola Kepegawaian		Persentase Pelayanan Kepegawaian yang Terlaksana	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
				Terlaksananya Administrasi Perkantoran yang Terlayani	Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
				Tercapainya Peningkatan Kapasitas Aparatur	Persentase Aparatur yang meningkat kapasitasnya	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Sub Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan	



NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ sub kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
					Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Administrasi Kepegawaian	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
					Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	Sub Kegiatan Pemulangan Pegawai yang Pensiun	
					Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Sub Kegiatan Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	
					Jumlah ASN yang Dipindahtugaskan	Sub Kegiatan Pemindahan Tugas ASN	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
					Jumlah Orang yang Mengikuti	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	



NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ sub kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
					Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan		
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Terlaksananya Administrasi Perkantoran yang Terlayani	Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan	Sub Kegiatan Penyediaan Barang	



NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/sub kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
					Penggandaan yang Disediakan	Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	
					Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Terlaksananya Administrasi Perkantoran yang Terlayani	Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi,	



NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/sub kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
					Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			Tercapainya kualitas Tata Kelola BMD Perangkat Daerah		Persentase Jenis Tata Kelola BMD Terlaksana	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
				Terlaksananya Administrasi Perkantoran yang Terlayani	Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	



NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ sub kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Sub Kegiatan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
					Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Sub Kegiatan Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	
				Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur yang Berfungsi Baik	Persentase Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur yang Berfungsi Baik	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	



NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ sub kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tetap Lainnya	
					Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tak Berwujud	
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana	



NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/sub kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
					Bangunan Lainnya yang Disediakan	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur yang Berfungsi Baik	Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur yang Berfungsi Baik	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	



NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ sub kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	
					Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	



NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/sub kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
					Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	



4.2. Uraian Sub Kegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif

Program, kegiatan, sub kegiatan dan Pendanaan dirumuskan di dalam Rencana Strategis Bappeda Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025-2029, selanjutnya disesuaikan dengan ketentuan nomenklatur program kegiatan dan subkegiatan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemutakhirannya dapat dilihat melalui tabel berikut ini :

TABEL 4.2
RENCANA/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAN PAGU INDIKATIF

BIDANG URUSAN/PROGR AM/OUTCOME/K EGIATAN/SUBKE GIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTP UT	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket.	
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030			
		Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerj a	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	12 FS	Pro SN		
			(Rp)		(Rp)		(Rp)		(Rp)		(Rp)		(Rp)			(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Urusan Perencanaan																	
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	96.51	30,770,229,764	96.55	38,387,144,866	96,60	42,299,524,679	96.65	59,351,156,206	96,70	92,620,151,827	96.75	65,892,167,010	96,80	72,142,750,711		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Dokumen PEP yang tersusun	91,63	25,362,175,908	91.63	33,049,212,745	91.78	37,520,348,264	91.93	50,627,101,700	92.08	82,658,691,870	92.23	55,279,561,057	92.38	60,713,884,163		
	Persentase Dokumen Penganggaran dan Keuangan yang Tersusun	100%		100%		100%		100%		100%		100%					
	Persentase Pelayanan Kepegawaian yang Terlaksana	100%		100%		100%		100%		100%		100%					



BIDANG URUSAN/PROGR AM/OUTCOME/K EGIATAN/SUBKE GIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTP UT	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket.	
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030			
		Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerj a	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	12 PS	Pro SN
			(Rp)		(Rp)		(Rp)		(Rp)		(Rp)		(Rp)		(Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Persentase Jenis Tata Kelola BMD Terlaksana	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%			
Outcome : Meningkatnya Kualitas Tata kelola Perencanaan,Eva luasi, dan Pelaporan (PEP) Perangkat Daerah	Indikator Outcome : Persentase Dokumen PEP yang tersusun		148,570,998	100%	374,988,950	100%	309,500,000	100%	640,450,000	100%	704,495,000	100%	774,944,500	100%	852,438,950		
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100%	140.988.950	100%	129,500,000	100%	442.450.000	100%	486.695.000	100%	535.364.500	100%	588.900.950		
Output :Tercapainya Kinerja yang meningkat/ berkembang	Persentase Sistem Capaian Kinerja yang meningkat / berkembang	91,63 (AA)	67,720,998	91.63	140,988,950	91.78	114,500,000	91.83	425,950,000	91,88	468,545,000	91,93	515,399,500	91,98	566,939,450		
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen (Renja, LKjIP, Sakip dan RB Bappeda)	67,720,998	4 dokumen (Renstra, Renja, LKjIP, Sakip Bappeda)	140,988,950	2 dokumen (Renja, Sakip Bappeda)	15,000,000	2 dokumen (Renja, Sakip Bappeda)	16,500,000	2 dokum en (Renja, Sakip Bappe da)	18,150,000	2 dokumen (Renja, Sakip Bappeda)	19,965,000	3 dokumen (Renstra, Renja, Sakip Bappeda)	21,961,500	Sumsel Berinte gritas dan Melaya ni	
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD			-		1 Dokumen (RKA Induk)	17,000,000	1 Dokumen (RKA Induk)	18,700,000	1 Doku men (RKA Induk)	20,570,000	1 Dokumen (RKA Induk)	22,627,000	1 Dokumen (RKA Induk)	24,889,700	Sumsel Berinte gritas dan Melaya ni	
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD			-		1 Dokumen (RKA Perubaha n)	17,500,000	1 Dokumen (RKA Perubaha n)	19,250,000	1 Doku men (RKA Peruba han)	21,175,000	1 Dokumen (RKA Perubaha n)	23,292,500	1 Dokumen (RKA Perubaha n)	25,621,750	Sumsel Berinte gritas dan Melaya ni	
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPDdan Laporan Penyusunan Kinerja dan Kinerja SKPDHasil LaporanIkhtisarKo ordinasi Capaian Realisasi			-		2 Laporan (LPPD dan Laporan Capaian Kinerja)	32,500,000	2 Laporan (LPPD dan Laporan Capaian Kinerja)	35,750,000	2 Lapora n (LPPD dan Lapora n Capaia n Kinerj a)	39,325,000	2 Laporan (LPPD dan Laporan Capaian Kinerja)	43,257,500	2 Laporan (LPPD dan Laporan Capaian Kinerja)	47,583,250	Sumsel Berinte gritas dan Melaya ni	



BIDANG URUSAN/PROGR AM/OUTCOME/K EGIATAN/SUBKE GIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTP UT	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket.	
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030			
		Target Kinerja	Pagu (Rp)	Target Kinerja	Pagu (Rp)	Target Kinerja	Pagu (Rp)	Target Kinerj a	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	12 PS	Pro SN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			-		4 Laporan (LKJIP per Triwulan)	32,500,000	4 Laporan (LKJIP per Triwulan)	35,750,000	4 Lapora n (LKJIP per Triwul an)	39,325,000	4 Laporan (LKJIP per Triwulan)	43,257,500	4 Laporan (LKJIP per Triwulan)	47,583,250	Sumsel Berinte gritas dan Melaya ni	
Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah			-		-	-	1 Data	50,000,000	1 Data	55,000,000	1 Data	60,500,000	1 Data	66,550,000	Sumsel Berinte gritas dan Melaya ni	
Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah UrusanRangka Perencanaan Perangkat DaerahBerdasark an Bidang yang Diampu dalam Penyusunan Dokumen	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			-		-	-	1 Berita Acara	50,000,000	1 Berita Acara	55,000,000	1 Berita Acara	60,500,000	1 Berita Acara	66,550,000	Sumsel Berinte gritas dan Melaya ni	
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pendukung Statistik DaerahHasil Walidata Sektoral			-		-	-	1 Dokumen	50,000,000	1 Doku men	55,000,000	1 Dokumen	60,500,000	1 Dokumen	66,550,000	Sumsel Berinte gritas dan Melaya ni	
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun			-		-	-	1 Dokumen	50,000,000	1 Doku men	55,000,000	1 Dokumen	60,500,000	1 Dokumen	66,550,000	Sumsel Berinte gritas dan Melaya ni	
Sub Kegiatan Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan			-		-	-	1 Berita Acara	50,000,000	1 Berita Acara	55,000,000	1 Berita Acara	60,500,000	1 Berita Acara	66,550,000	Sumsel Berinte gritas dan Melaya ni	
Sub Kegiatan Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu			-		-	-	1 Substansi	50,000,000	1 Substa nsi	55,000,000	1 Substansi	60,500,000	1 Substansi	66,550,000	Sumsel Berinte gritas dan Melaya ni	
Kegiatan Administrasi		100%		100%	3.386.101.320	100%	2.376.836.612	100%	4.249.000.000	100%	4.723.900.00	100%	3.606.290.000	100%	3.846.919.000		



BIDANG URUSAN/PROGR AM/OUTCOME/K EGIATAN/SUBKE GIATAN/OUPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTP UT	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket.	
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030			
		Target Kinerja	Pagu (Rp)	Target Kinerja	Pagu (Rp)	Target Kinerja	Pagu (Rp)	Target Kinerj a	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	12 PS	Pro SN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Umum Perangkat Daerah																	
Output : Terlaksananya Administrasi Perkantoran yang Terlayani	Indikator Output : Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani	100%	80,850,000	100%	234,000,000	100%	195,000,000	100%	214,500,000	100%	235,950,000	100%	259,545,000	100%	285,499,500		
Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen (website dan buletin)	80,850,000	16 Dokumen (2 dok website/ Medsos, 2 dok buletin, 12 Dok Kliping)	234,000,000	16 Dokumen (2 dok website/ Medsos, 2 dok buletin, 12 Dok Kliping)	195,000,000	16 Dokumen (2 dok website/ Medsos, 2 dok buletin, 12 Dok Kliping)	214,500,000	16 Dokumen (2 dok website/ Medsos, 2 dok buletin, 12 Dok Kliping)	235,950,000	16 Dokumen (2 dok website/ Medsos, 2 dok buletin, 12 Dok Kliping)	259,545,000	16 Dokumen (2 dok website/ Medsos, 2 dok buletin, 12 Dok Kliping)	285,499,500	Sumsel Berinte gritas dan Melaya ni	
Outcome : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penganggaran dan Keuangan Perangkat Daerah	Indikator Outcome: Persentase Dokumen Penganggaran dan Keuangan yang Tersusun		20,961,085,120		26,012,593,000		31,082,397,000		33,824,136,700		38,306,550,370		42,137,205,407		46,350,925,948		
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100%	140.988.950	100%	129,500,000	100%	442.450.000	100%	486.695.000	100%	535.364.500	100%	588.900.950		
Output : Tercapainya Kinerja yang meningkat/berke mbang	Indikator Output : Persentase Sistem Capaian Kinerja yang meningkat / berkembang	91,63		91.63		91.78	15,000,000	91.83	16,500,000	91.88	18,150,000	91.93	19,965,000	91.98	21,961,500		
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			-		1 Dokumen	7,500,000	1 Dokumen	8,250,000	1 Dokumen	9,075,000	1 Dokumen	9,982,500	1 Dokumen	10,980,750	Sumsel Berinte gritas dan Melaya ni	
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			-		1 Dokumen	7,500,000	1 Dokumen	8,250,000	1 Dokumen	9,075,000	1 Dokumen	9,982,500	1 Dokumen	10,980,750	Sumsel Berinte gritas dan Melaya ni	
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%		100%	26.281.829.000	100%	31.086.797.000	100%	34.822.636.700	100%	38.304.900.370	100%	42.135.390.407	100%	46.348.929.448		



Rancangan RENSTRA BAPPEDA
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN/PROGR AM/OUTCOME/K EGIATAN/SUBKE GIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTP UT	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket.	
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030			
		Target Kinerja	Pagu (Rp)	Target Kinerja	Pagu (Rp)	Target Kinerja	Pagu (Rp)	Target Kinerja	Pagu (Rp)	Target Kinerj a	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	12 PS	Pro SN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Output : Terlaksananya Administrasi Perkantoran yang Terlayani	Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani	100%	20,961,085,120	100%	26,012,593,000	100%	31,667,397,000	100%	33,407,636,700	100%	38,888,400,370	100%	41,717,240,407	100%	45,928,964,448		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	149 orang/bu lan (130 org Gaji; 19 org)	20,709,195,120	149 orang/bu lan	25,671,883,000	159 orang/bu lan	30,410,897,000	169 orang/bu lan	33,941,986,700	179 orang/ bulan	37,376,185,370	189 orang/bu lan	41,153,803,907	199 orang/bu lan	45,309,184,298	Sumsel Berinte gritas dan Melaya ni	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifik asi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifik asi Keuangan SKPD	5 Dokumen	191,890,000	5 Dokumen	283,160,000	5 Dokumen	200,000,000	5 Dokumen	220,000,000	5 Doku men	242,000,000	5 Dokumen	266,200,000	5 Dokumen	292,820,000	Sumsel Berinte gritas dan Melaya ni	
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			-		-		1 Dokumen	50,000,000	1 Doku men	55,000,000	1 Dokumen	60,500,000	1 Dokumen	66,550,000	Sumsel Berinte gritas dan Melaya ni	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Laporan	60,000,000	3 Laporan	57,550,000	3 Laporan	41,500,000	3 Laporan	45,650,000	3 Lapora n	50,215,000	3 Laporan	55,236,500	3 Laporan	60,760,150	Sumsel Berinte gritas dan Melaya ni	
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan			-		-		1 Dokumen	50,000,000	1 Doku men	55,000,000	1 Dokumen	60,500,000	1 Dokumen	66,550,000	Sumsel Berinte gritas dan Melaya ni	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Seme steran SKPD	Jumlah Bulanan/SKPD dan Penyusunan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPDLaporan Keuangan Triwulanan/Seme steran Laporan Koordinasi Laporan Keuangan			-		-		1 Laporan	50,000,000	1 Lapora n	55,000,000	1 Laporan	60,500,000	1 Laporan	66,550,000	Sumsel Berinte gritas dan Melaya ni	
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			0		6 Dokumen (dok Realisasi Fisik dan Keuanga n per triwulan dan per semester)	15,000,000	6 Dokumen (dok Realisasi Fisik dan Keuanga n per triwulan dan per semester)	50,000,000	6 Doku men (dok Realis asi Fisik dan Keuan gan per triwula n dan per	55,000,000	6 Dokumen (dok Realisasi Fisik dan Keuanga n per triwulan dan per semester)	60,500,000	6 Dokumen (dok Realisasi Fisik dan Keuanga n per triwulan dan per semester)	66,550,000	Sumsel Berinte gritas dan Melaya ni	



BIDANG URUSAN/PROGR AM/OUTCOME/K EGIATAN/SUBKE GIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTP UT	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket.	
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030			
		Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerj a	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	12 PS	Pro SN
			(Rp)		(Rp)		(Rp)		(Rp)		(Rp)		(Rp)		(Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
										semest er)							
Outcome : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kepegawaian	Indikator Outcome : Persentase Pelayanan Kepegawaian yang Terlaksana	100%	3,427,902,000	100%	5,347,029,405	100%	4,147,301,264	100%	8,104,515,000	100%	9,978,846,500	100%	9,341,731,150	100%	10,132,954,265		
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani	100%		100%	26.281.829.000	100%	31.086.797.000	100%	34.822.636.700	100%	38.304.900.370	100%	42.135.390.407	100%	46.348.929.448		
Output : Terlaksananya Administrasi Perkantoran yang Terlayani	Indikator Output : Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani	100%	561,970,000	100%	337,134,000	100%	419,400,000	100%	415,000,000	100%	416,500,000	100%	418,150,000	100%	419,965,000		
Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	33 dokumen (32 SPK tenaga honor administr asi+ 1 SPK Tenaga Tutor SKJ)	561,970,000	33 dokumen (32 SPK tenaga honor administr asi+ 1 SPK Tenaga Tutor SKJ)	337,134,000	5 Dokumen	419,400,000	5 Dokumen	415,000,000	5 Doku men	416,500,000	5 Dokumen	418,150,000	5 Dokumen	419,965,000	Sumsel Berinte gritas dan Melaya ni	
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%	7,000,000	100%	510.892.085	100%	306.064.652	100%	1.509.015.000	100%	1.389.916.500	100%	1.523.908.150	100%	1.693.348.965		
Output : Tercapainya Peningkatan Kapasias Aparatur	Indikator Output :Persentase Aparatur yang meningkat kapasitasnya	100%	7,000,000	100%	510,892,085	100%	306,064,652	100%	1,509,015,000	100%	1,389,916,500	100%	1,523,908,150	100%	1,693,348,965		
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai			-		-	-	1 Unit	50,000,000	1 Unit	55,000,000	1 Unit	60,500,000	1 Unit	66,550,000	Sumsel Berinte gritas dan Melaya ni	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan			-	-	-	-	400 Paket (Pakaian Kuning Khaki dan Pakaian Putih)	400,000,000	400 Paket (Pakai an Kuning g Khaki dan Pakaia n Putih)	440,000,000	400 Paket (Pakaian Kuning Khaki dan Pakaia n Putih)	484,000,000	400 Paket (Pakaian Kuning Khaki dan Pakaian Putih)	532,400,000	Sumsel Berinte gritas dan Melaya ni	
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			1 Dokumen	66,800,000	1 Dokumen	53,650,000	1 Dokumen	59,015,000	1 Doku men	64,916,500	1 Dokumen	71,408,150	1 Dokumen	78,548,965	Sumsel Berinte gritas dan Melaya ni	



BIDANG URUSAN/PROGR AM/OUTCOME/K EGIATAN/SUBKE GIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTP UT	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket.	
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030			
		Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerj a	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	12 PS	Pro SN
			(Rp)		(Rp)		(Rp)		(Rp)		(Rp)		(Rp)		(Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian			-		-		1 Dokumen	50,000,000	1 Doku men	55,000,000	1 Dokumen	60,500,000	1 Dokumen	66,550,000	Sumsel Berinte gritas dan Melaya ni	
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			-		-		1 Dokumen	50,000,000	1 Doku men	55,000,000	1 Dokumen	60,500,000	1 Dokumen	66,550,000	Sumsel Berinte gritas dan Melaya ni	
Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan			-		-		3 Orang	50,000,000	3 Orang	55,000,000	3 Orang	60,500,000	3 Orang	66,550,000	Sumsel Berinte gritas dan Melaya ni	
Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas			-		-		1 Laporan	50,000,000	1 Lapora n	55,000,000	1 Laporan	60,500,000	1 Laporan	66,550,000	Sumsel Berinte gritas dan Melaya ni	
Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang Dipindahtugaskan			-		-		2 Orang	50,000,000	2 Orang	50,000,000	2 Orang	50,000,000	2 Orang	66,550,000	Sumsel Berinte gritas dan Melaya ni	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 orang (Pejabat Eselon II, III dan IV yang mengikut i Diklat PIM	7,000,000	3 orang (Pejabat Eselon II, III dan IV yang mengikut i Diklat PIM	83,092,085	3 orang (Pejabat Eselon II, III dan IV yang mengikut i Diklat PIM	40,000,000	3 orang (Pejabat Eselon II, III dan IV yang mengikut i Diklat PIM	100,000,000	3 orang (Pejabat Eselon II, III dan IV yang mengikut i Diklat PIM	110,000,000	3 orang (Pejabat Eselon II, III dan IV yang mengikut i Diklat PIM	121,000,000	3 orang (Pejabat Eselon II, III dan IV yang mengikut i Diklat PIM	133,100,000	Sumsel Berinte gritas dan Melaya ni	
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	135 orang (Pegawai yang mengikut i uji kompetensi 5 orang; pegawai yang memahami peraturan perundan g-undangan 130 orang)	45,000,000	135 orang (Pegawai yang mengikut i uji kompetensi 5 orang; pegawai yang memahami peraturan perundan g-undangan 130 orang)	82,500,000	135 orang (Pegawai yang mengikut i uji kompetensi 5 orang; pegawai yang memahami peraturan perundan g-undangan 130 orang)	150,000,000	135 orang (Pegawai yang mengikut i uji kompetensi 5 orang; pegawai yang memahami peraturan perundan g-undangan 130 orang)	200,000,000	135 orang (Pegawai yang mengikut i uji kompetensi 5 orang; pegawai yang memahami peraturan perundan g-undangan 130 orang)	220,000,000	135 orang (Pegawai yang mengikut i uji kompetensi 5 orang; pegawai yang memahami peraturan perundan g-undangan 130 orang)	250,000,000	Sumsel Berinte gritas dan Melaya ni	



BIDANG URUSAN/PROGR AM/OUTCOME/K EGIATAN/SUBKE GIATAN/OUPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTP UT	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket.	
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030			
		Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerj a	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	12 PS	Pro SN
			(Rp)		(Rp)		(Rp)		(Rp)		(Rp)		(Rp)		(Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
										130 orang)							
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	-	-	279 orang (10 org Bimtek Kepegawa ian dan aset; 100 orang workshop Anjab&A BK;25 orang Worksho p Keuanga n dan Perencana aan; 100 orang workshop penyusun an angka kredit Jafung; 34 orang workshop public speaking; 130 workshop etika pegawai; 34 org workshop Karya Ilmiah)	316,000,000	279 orang (10 org Bimtek Kepegawa ian dan aset; 100 orang workshop Anjab&A BK;25 orang Worksho p Keuanga n dan Perencana aan; 100 orang workshop penyusun an angka kredit Jafung; 34 orang workshop public speaking; 130 workshop etika pegawai; 34 org workshop Karya Ilmiah)	129,914,652	279 orang (10 org Bimtek Kepegawa ian dan aset; 100 orang workshop Anjab&A BK;25 orang Worksho p Keuanga n dan Perencana aan; 100 orang workshop penyusun an angka kredit Jafung; 34 orang workshop public speaking; 130 workshop etika pegawai; 34 org workshop Karya Ilmiah)	500,000,000	279 orang (10 org Bimtek Kepega waian dan aset; 100 orang works hop Anjab &ABK; 25 orang workshop Anjab&A BK;25 orang Kueuan gan dan Perenc anaan; 100 orang works hop penyu sunan angka kredit Jafung ; 34 orang works hop public speaki ng; 130 works hop etika pegaw ai; 34 org works hop Karya Ilmiah)	250,000,000	279 orang (10 org Bimtek Kepegawa ian dan aset; 100 orang workshop Anjab&A BK;25 orang Worksho p Keuanga n dan Perencana aan; 100 orang workshop penyusun an angka kredit Jafung; 34 orang workshop public speaking; 130 workshop etika pegawai; 34 org workshop Karya Ilmiah)	275,000,000	279 orang (10 org Bimtek Kepegawa ian dan aset; 100 orang workshop Anjab&A BK;25 orang Worksho p Keuanga n dan Perencana aan; 100 orang workshop penyusun an angka kredit Jafung; 34 orang workshop public speaking; 130 workshop etika pegawai; 34 org workshop Karya Ilmiah)	300,000,000	Sumsel Berinte gritas dan Melaya ni	
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%		100%	3.386.101.320	100%	2.376.836.612	100%	4.249.000.000	100%	4.723.900.00	100%	3.606.290.000	100%	3.846.919.000		



BIDANG URUSAN/PROGR AM/OUTCOME/K EGIATAN/SUBKE GIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTP UT	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket.	
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030			
		Target Kinerja	Pagu (Rp)	Target Kinerja	Pagu (Rp)	Target Kinerja	Pagu (Rp)	Target Kinerja	Pagu (Rp)	Target Kinerj a	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	12 PS	Pro SN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Output : Terlaksananya Administrasi Perkantoran yang Terlayani	Indikator Output: Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani	100%	1,220,600,000	100%	2,985,003,320	100%	2,181,836,612	100%	4,034,500,000	100%	4,487,950,000	100%	3,346,745,000	100%	3,561,419,500		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket	60,000,000	20 Paket	200,000,000	20 Paket	100,000,000	20 Paket	110,000,000	20 Paket	121,000,000	20 Paket	133,100,000	20 Paket	146,410,000	Sumsel Berinte gritas dan Melaya ni	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	220,600,000	5 Paket	1,465,163,320	5 Paket	486,836,612	5 Paket	2,000,000,000	5 Paket	2,200,000,000	5 Paket	800,000,000	5 Paket	750,000,000	Sumsel Berinte gritas dan Melaya ni	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	110 Paket (60 paket alat tulis kantor; 50 paket makan minum rapat dan kunjunga n tamu)	240,000,000	110 Paket (60 paket alat tulis kantor; 50 paket makan minum rapat dan kunjunga n tamu)	493,065,000	110 Paket (60 paket alat tulis kantor; 50 paket makan minum rapat dan kunjunga n tamu)	450,000,000	110 Paket (60 paket alat tulis kantor; 50 paket makan minum rapat dan kunjunga n tamu)	500,000,000	110 Paket (60 paket alat tulis kantor ; 50 paket makan minum rapat dan kunju ngan tamu)	600,000,000	110 Paket (60 paket alat tulis kantor; 50 paket makan minum rapat dan kunjunga n tamu)	700,000,000	110 Paket (60 paket alat tulis kantor; 50 paket makan minum rapat dan kunjunga n tamu)	800,000,000	Sumsel Berinte gritas dan Melaya ni	
Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakn dan Penggandaan yang Disediakan	16 Paket	100,000,000	16 Paket	193,625,000	16 Paket	175,000,000	16 Paket	192,500,000	16 Paket	211,750,000	16 Paket	232,925,000	16 Paket	256,217,500	Sumsel Berinte gritas dan Melaya ni	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	-	-	-	-	4 Dokumen	20,000,000	4 Dokumen	22,000,000	4 Doku men	24,200,000	4 Dokumen	26,620,000	4 Dokumen	29,282,000	Sumsel Berinte gritas dan Melaya ni	
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan			-		-	-	1 Paket	50,000,000	1 Paket	55,000,000	1 Paket	60,500,000	1 Paket	66,550,000	Sumsel Berinte gritas dan Melaya ni	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			-		-	-	1 Laporan	50,000,000	1 Lapora n	55,000,000	1 Laporan	60,500,000	1 Laporan	66,550,000	Sumsel Berinte gritas dan Melaya ni	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	120 Laporan	600,000,000	120 Laporan	633,150,000	120 Laporan	850,000,000	120 Laporan	1,000,000,000	120 Lapora n	1,100,000,000	120 Laporan	1,200,000,000	120 Laporan	1,300,000,000	Sumsel Berinte gritas dan	



BIDANG URUSAN/PROGR AM/OUTCOME/K EGIATAN/SUBKE GIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTP UT	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket.	
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030			
		Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerj a	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	12 PS	Pro SN
			(Rp)		(Rp)		(Rp)		(Rp)		(Rp)		(Rp)		(Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	dan Konsultasi SKPD															Melaya ni	
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					1 Dokumen	100,000,000	1 Dokumen	110,000,000	1 Doku men	121,000,000	1 Dokumen	133,100,000	1 Dokumen	146,410,000	Sumsel Berinte gritas dan Melaya ni	
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	1,638,332,000	100%	1,514,000,000	100%	1,640,000,000	100%	2,146,000,000	100%	3,684,480,000	100%	4,052,928,000	100%	4,458,220,800		
Output : Terlaksananya Administrasi Perkantoran yang Terlayani	Indikator Output: Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani	100%	1,638,332,000	100%	1,514,000,000	100%	1,640,000,000	100%	2,146,000,000	100%	3,684,480,000	100%	4,052,928,000	100%	4,458,220,800		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan (1 laporan jumlah pengirima n surat)	2,000,000	1 Laporan (1 laporan jumlah pengirima n surat)	10,000,000	1 Laporan (1 laporan jumlah pengirima n surat)	8,000,000	1 Laporan (1 laporan jumlah pengirima n surat)	8,800,000	1 Lapora n (1 lapora n jumlah pengiri man surat)	9,680,000	1 Laporan (1 laporan jumlah pengirima n surat)	10,648,000	1 Laporan (1 laporan jumlah pengirima n surat)	11,712,800	Sumsel Berinte gritas dan Melaya ni	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan (laporan pemakaia n Jasa Komunik asi, Sumber Daya Air dan Listrik)	1,023,332,000	1 Laporan (laporan pemakaia n Jasa Komunik asi, Sumber Daya Air dan Listrik)	822,000,000	1 Laporan (laporan pemakaia n Jasa Komunik asi, Sumber Daya Air dan Listrik)	972,000,000	1 Laporan (laporan pemakaia n Jasa Komunik asi, Sumber Daya Air dan Listrik)	1,069,200,000	1 Lapora n (lapora n pemak aian Jasa Komu nikasi, Sumbe r Daya Air dan Listrik)	2,500,000,000	1 Laporan (laporan pemakaia n Jasa Komunik asi, Sumber Daya Air dan Listrik)	2,750,000,000	1 Laporan (laporan pemakaia n Jasa Komunik asi, Sumber Daya Air dan Listrik)	3,025,000,000	Sumsel Berinte gritas dan Melaya ni	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan (lap Jenis alat Kebersiha n dan Bahan pembersi h yang digunaka n)	100,000,000	1 Laporan (lap Jenis alat Kebersiha n dan Bahan pembersi h yang digunaka n)	72,000,000	1 Laporan (lap Jenis alat Kebersiha n dan Bahan pembersi h yang digunaka n)	50,000,000	1 Laporan (lap Jenis alat Kebersiha n dan Bahan pembersi h yang digunaka n)	100,000,000	1 Lapora n (lap Jenis alat Kebersi han dan Bahan pembe rsh yang diguna kan)	110,000,000	1 Laporan (lap Jenis alat Kebersiha n dan Bahan pembersi h yang digunaka n)	121,000,000	1 Laporan (lap Jenis alat Kebersiha n dan Bahan pembersi h yang digunaka n)	133,100,000	Sumsel Berinte gritas dan Melaya ni	



BIDANG URUSAN/PROGR AM/OUTCOME/K EGIATAN/SUBKE GIATAN/OUPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTP UT	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket.	
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030			
		Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerj a	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	12 PS	Pro SN
			(Rp)		(Rp)		(Rp)		(Rp)		(Rp)		(Rp)		(Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan (lap luasan kantor yang dibersihkan; lap pengamanan kantor; spanduk dan dokumen tasi)	513,000,000	1 Laporan (lap luasan kantor yang dibersihkan; lap pengamanan kantor; spanduk dan dokumen tasi)	610,000,000	1 Laporan (lap luasan kantor yang dibersihkan; lap pengamanan kantor; spanduk dan dokumen tasi)	610,000,000	1 Laporan (lap luasan kantor yang dibersihkan; lap pengamanan kantor; spanduk dan dokumen tasi)	968,000,000	1 Lapora n (lap luasan kantor yang dibersi hkan; lap penga manan kantor ; spand uk dan dokum entasi)	1,064,800,000	1 Laporan (lap luasan kantor yang dibersihkan; lap pengamanan kantor; spanduk dan dokumen tasi)	1,171,280,000	1 Laporan (lap luasan kantor yang dibersihkan; lap pengamanan kantor; spanduk dan dokumen tasi)	1,288,408,000	Sumsel Berinte gritas dan Melaya ni	
Outcome : Meningkatkan kualitas Tata Kelola BMD Perangkat Daerah	Indikator Outcome: Persentase Jenis Tata Kelola BMD Terlaksana	100%	824,617,790	100%	1,314,601,390	100%	1,981,150,000	100%	7,458,000,000	100%	34,068,800,000	100%	3,425,680,000	100%	3,777,565,000		
Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		100%	95,997,980	100%	145,320,000	100%	130,000,000	100%	393,000,000	100%	432,300,000	100%	475,530,000	100%	523,083,000		
Output : Terlaksananya Administrasi Perkantoran yang Terlayani	Indikator Output : Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani	100%	95,997,980	100%	145,320,000	100%	130,000,000	100%	393,000,000	100%	432,300,000	100%	475,530,000	100%	523,083,000		
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	1 Dokumen RKBMD	45,320,000	1 Dokumen RKBMD	50,000,000	1 Dokumen RKBMD	55,000,000	1 Doku men RKBMD	60,500,000	1 Dokumen RKBMD	66,550,000	1 Dokumen RKBMD	73,205,000	Sumsel Berinte gritas dan Melaya ni	
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen (Polis asuransi)	95,997,980	1 Dokumen (Polis asuransi)	100,000,000	1 Dokumen (Polis asuransi)	80,000,000	1 Dokumen (Polis asuransi)	88,000,000	1 Doku men (Polis asuran si)	96,800,000	1 Dokumen (Polis asuransi)	106,480,000	1 Dokumen (Polis asuransi)	117,128,000	Sumsel Berinte gritas dan Melaya ni	
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-	-	-	-	1 Laporan	50,000,000	1 Lapora n	55,000,000	1 Laporan	60,500,000	1 Laporan	66,550,000	Sumsel Berinte gritas dan Melaya ni	
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	-	-	-	1 Laporan	50,000,000	1 Lapora n	55,000,000	1 Laporan	60,500,000	1 Laporan	66,550,000	Sumsel Berinte gritas dan Melaya ni	



BIDANG URUSAN/PROGR AM/OUTCOME/K EGIATAN/SUBKE GIATAN/OUPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTP UT	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket.	
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030			
		Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerj a	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	12 PS	Pro SN		
			(Rp)		(Rp)		(Rp)		(Rp)		(Rp)		(Rp)			(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			-		-	-	1 Laporan	50,000,000	1 Lapora n	55,000,000	1 Laporan	60,500,000	1 Laporan	66,550,000	Sumsel Berinte gritas dan Melaya ni	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			-		-	-	1 Laporan	50,000,000	1 Lapora n	55,000,000	1 Laporan	60,500,000	1 Laporan	66,550,000	Sumsel Berinte gritas dan Melaya ni	
Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD			-		-	-	1 Dokumen	50,000,000	1 Doku men	55,000,000	1 Dokumen	60,500,000	1 Dokumen	66,550,000	Sumsel Berinte gritas dan Melaya ni	
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%		100%		100%	1,041,150,000	100%	4,800,000,000	100%	31,165,000,000	100%	231,500,000	100%	254,650,000		
Output : Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur yang Berfungsi Baik	Indikator Output : Persentase Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur yang Berfungsi Baik	100%		100%		100%	1,041,150,000	100%	4,800,000,000	100%	31,165,000,000	100%	231,500,000	100%	254,650,000		
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan			-		-	-	5 Unit	2,000,000,000	-	-	-	-	-	-	Sumsel Berinte gritas dan Melaya ni	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakanl			1 Unit Kendaraa n Dinas Operasio nal		1 Unit Kendaraa n Dinas Operasio nal	771,150,000	5 Unit Kendaraa n Dinas Operasio nal	2,000,000,000	-	-	-	-	-	-	Sumsel Berinte gritas dan Melaya ni	
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			Paket		2 Paket (Meja dan Kursi)	270,000,000	2 Paket (Meja dan Kursi)	500,000,000	2 Paket (Meja dan Kursi)	1,000,000,000	2 Paket (Meja dan Kursi)	-	2 Paket (Meja dan Kursi)	-	Sumsel Berinte gritas dan Melaya ni	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			-		-	-	1 Unit	50,000,000	1 Unit	55,000,000	1 Unit	60,500,000	1 Unit	66,550,000	Sumsel Berinte gritas dan Melaya ni	
Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan			-		-	-	1 Unit	50,000,000	1 Unit	55,000,000	1 Unit	60,500,000	1 Unit	66,550,000	Sumsel Berinte gritas dan Melaya ni	



BIDANG URUSAN/PROGR AM/OUTCOME/K EGIATAN/SUBKE GIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTP UT	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket.	
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030			
		Target Kinerja	Pagu (Rp)	Target Kinerja	Pagu (Rp)	Target Kinerja	Pagu (Rp)	Target Kinerj a	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	12 PS	Pro SN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan			-		-	-	1 Unit	50,000,000	1 Unit	55,000,000	1 Unit	60,500,000	1 Unit	66,550,000	Sumsel Berinte gritas dan Melaya ni	
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			-		-	-	1 Unit	100,000,000	1 Unit	25,000,000,000	0	-	0	-	Sumsel Berinte gritas dan Melaya ni	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			-		-	-	1 Unit	50,000,000	1 Unit	5,000,000,000	1 Unit	-	1 Unit	-	Sumsel Berinte gritas dan Melaya ni	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			-		-	-	1 Unit	-	1 Unit	-	1 Unit	50,000,000	1 Unit	55,000,000	Sumsel Berinte gritas dan Melaya ni	
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		85%	728,619,810	100%	1,169,281,390	100%	810,000,000	100%	2,265,000,000	100%	2,471,500,000	100%	2,718,650,000	100%	2,999,832,000		
Output : Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur yang Berfungsi Baik	Indikator Output : Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur yang Berfungsi Baik	85%	728,619,810	100%	1,169,281,390	100%	810,000,000	100%	2,265,000,000	100%	2,471,500,000	100%	2,718,650,000	100%	2,999,832,000		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			-		-	-	8 Unit	200,000,000	8 Unit	200,000,000	8 Unit	220,000,000	8 Unit	242,000,000	Sumsel Berinte gritas dan Melaya ni	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			1 Unit	230,000,000	1 Unit	260,000,000	15 Unit	286,000,000	15 Unit	314,600,000	15 Unit	346,060,000	15 Unit	380,666,000	Sumsel Berinte gritas dan Melaya ni	
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara			-		-	-	15 Unit	80,000,000	15 Unit	88,000,000	15 Unit	96,800,000	15 Unit	106,480,000	Sumsel Berinte gritas dan	



BIDANG URUSAN/PROGR AM/OUTCOME/K EGIATAN/SUBKE GIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTP UT	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket.	
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030			
		Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerj a	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	12 PS	Pro SN
			(Rp)		(Rp)		(Rp)		(Rp)		(Rp)		(Rp)		(Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
																Melaya ni	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	126 Unit (16 unit roda 4; 10 unit roda 2; 100 unit peralatan &perleng kapan kantor)	524,424,810	126 Unit (16 unit roda 4; 10 unit roda 2; 100 unit peralatan &perleng kapan kantor)	243,588,340	126 Unit (16 unit roda 4; 10 unit roda 2; 100 unit peralatan &perleng kapan kantor)	230,000,000	126 Unit (16 unit roda 4; 10 unit roda 2; 100 unit peralatan &perleng kapan kantor)	847,000,000	126 Unit (16 unit roda 4; 10 unit roda 2; 100 unit peralat an&pe rieng kapan kantor)	931,700,000	126 Unit (16 unit roda 4; 10 unit roda 2; 100 unit peralatan &perleng kapan kantor)	1,024,870,000	126 Unit (16 unit roda 4; 10 unit roda 2; 100 unit peralatan &perleng kapan kantor)	1,024,870,000	Sumsel Berinte gritas dan Melaya ni	
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara			-		-	-	1 Unit	50,000,000	1 Unit	55,000,000	1 Unit	60,500,000	1 Unit	66,550,000	Sumsel Berinte gritas dan Melaya ni	
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara			-		-	-	1 Unit	50,000,000	1 Unit	55,000,000	1 Unit	60,500,000	1 Unit	66,550,000	Sumsel Berinte gritas dan Melaya ni	
Pemeliharaan/Re habilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi	1 Unit (gedung kantor)	204,195,000	1 Unit (gedung kantor)	695,693,050	1 Unit (gedung kantor)	320,000,000	1 Unit (gedung kantor)	352,000,000	1 Unit (gedun g kantor)	387,200,000	1 Unit (gedung kantor)	425,920,000	1 Unit (gedung kantor)	468,512,000	Sumsel Berinte gritas dan Melaya ni	
Pemeliharaan/Re habilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi			-		-	-	1 Unit	200,000,000	1 Unit	220,000,000	1 Unit	242,000,000	1 Unit	322,102,000	Sumsel Berinte gritas dan Melaya ni	
Pemeliharaan/Re habilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi			-		-	-	1 Unit	200,000,000	1 Unit	220,000,000	1 Unit	242,000,000	1 Unit	322,102,000	Sumsel Berinte gritas dan Melaya ni	
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	(1). Persentase Konsistensi antara Permasalahan dan Isu strategis dengan Program Prioritas Daerah	N/A	2,676,527,666	100%	2,350,883,428	100%	2,445,423,451	100%	3,629,551,000	100%	3,992,506,100	100%	4,391,756,710	100%	4,830,932,381		
	(2) Persentase Keselarasan Target Indikator Makro Pembangunan	N/A		100%		100%		100%									



BIDANG URUSAN/PROGR AM/OUTCOME/K EGIATAN/SUBKE GIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTP UT	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket.	
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030			
		Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerj a	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	12 PS	Pro SN		
			(Rp)		(Rp)		(Rp)		(Rp)		(Rp)		(Rp)			(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Antara Pemerintah Provinsi dengan Nasional																
	(3). RKPD Tepat Waktu sesuai dengan jadwal yg ditentukan	100%		100%		100%		100%		100%							
	(4) Persentase Capaian Target Kinerja Utama Pembangunan Daerah Provinsi > 75%	87,78%		87,83%		87,88%		87,93%		87,88 %		87,93%		87,98%			
Outcome : Meningkatnya Konsistensi antara Permasalahan dan Isu strategis dengan Program Prioritas Daerah	Persentase Konsistensi antara Permasalahan dan Isu strategis dengan Program Prioritas Daerah	N/A	1,516,988,871	100%	918,617,507	100%	1,013,147,560	100%	1,379,551,000	100%	1,517,506,100	100%	1,669,256,710	100%	1,836,182,381		
Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia				100%	.892.088.625	100%	1.044.705.750	100%	1.419.551.000	100%	1.561.506.100	100%	1.717.656.710	100%	1.889.422.381		
Output : Meningkatnya Koordinasi, Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Lintas Sektor	Persentase Program Prioritas Daerah yang Holistik dan Integratif antar Sektor	N/A	960,500,000	100%	421,345,692	100%	501,410,000	100%	569,551,000	100%	626,506,100	100%	689,156,710	100%	758,072,381		
Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan (Lap Ranham / KKP HAM)	129,000,000	1 Laporan (Lap Ranham / KKP HAM)	95,654,000	1 Laporan (Lap Ranham / KKP HAM)	120,000,000	1 Laporan (Lap Ranham / KKP HAM)	150,000,000	1 Lapora n (Lap Ranha m / KKPH AM)	165,000,000	1 Laporan (Lap Ranham / KKP HAM)	181,500,000	1 Laporan (Lap Ranham / KKP HAM)	199,650,000	Sumsel Berinte gritas dan Melaya ni	



BIDANG URUSAN/PROGR AM/OUTCOME/K EGIATAN/SUBKE GIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTP UT	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket.	
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030			
		Target Kinerja	Pagu (Rp)	Target Kinerja	Pagu (Rp)	Target Kinerja	Pagu (Rp)	Target Kinerja	Pagu (Rp)	Target Kinerj a	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	12 FS	Pro SN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	7 Laporan (2 Lap Kesos (RKT Kemiskin an, Lap SDG's); 5 Lap Kesra (Lap Stunting, Lap Germas, Lap KKS, PUG, Kepemud aan))	831,500,000	7 Laporan (2 Lap Kesos (RKT Kemiskin an, Lap SDG's); 5 Lap Kesra (Lap Stunting, Lap Germas, Lap KKS, PUG, Kepemud aan))	325,691,692	7 Laporan (2 Lap Kesos (RKT Kemiskin an, Lap SDG's); 5 Lap Kesra (Lap Stunting, Lap Germas, Lap KKS, PUG, Kepemud aan))	381,410,000	7 Laporan (2 Lap Kesos (RKT Kemiskin an, Lap SDG's); 5 Lap Kesra (Lap Stunting, Lap Germas, Lap KKS, PUG, Kepemud aan))	419,551,000	7 Lapora n (2 Lap Kesos (RKT Kemis kinan, Lap SDG's) ; 5 Lap Kesra (Lap Stunti ng, Lap Germa s, Lap KKS, PUG, Kepemud aan))	461,506,100	7 Laporan (2 Lap Kesos (RKT Kemiskin an, Lap SDG's); 5 Lap Kesra (Lap Stunting, Lap Germas, Lap KKS, PUG, Kepemud aan))	507,656,710	7 Laporan (2 Lap Kesos (RKT Kemiskin an, Lap SDG's); 5 Lap Kesra (Lap Stunting, Lap Germas, Lap KKS, PUG, Kepemud aan))	558,422,381	Sumsel Berinte gritas dan Melaya ni	Penangu gulan Kemiskin an
Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam				100%	690.166.691	100%	699.587.219	100%	1.110.000.000	100%	1.221.000.000	100%	1.343.100.000	100%	1.477.410.000		
Output : Meningkatnya Koordinasi, Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Lintas Sektor	Persentase Program Prioritas Daerah yang Holistik dan Integratif antar Sektor	N/A	233,150,000	100%	281,893,250	100%	301,898,925	100%	460,000,000	100%	506,000,000	100%	556,600,000	100%	612,260,000		
Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 Laporan (1 Lap Integrasi dan sinkronis asi perencan aan prioritas investasi dan ekonomi kerakyata n)	139,650,000	1 Laporan (1 Lap Integrasi dan sinkronis asi perencan aan prioritas investasi dan ekonomi kerakyata n)	207,737,860	1 Laporan (1 Lap Integrasi dan sinkronis asi perencan aan prioritas investasi dan ekonomi kerakyata n)	215,622,950	2 Laporan (1 Lap Integrasi dan sinkronis asi perencan aan prioritas investasi dan ekonomi kerakyata n)	360,000,000	1 Lapora n (1 Lap Integra si dan sinkro nisasi perenc naan priorit as investa si dan ekono mi keraky atan)	396,000,000	1 Laporan (1 Lap Integrasi dan sinkronis asi perencan aan prioritas investasi dan ekonomi kerakyata n)	435,600,000	1 Laporan (1 Lap Integrasi dan sinkronis asi perencan aan prioritas investasi dan ekonomi kerakyata n)	479,160,000	Sumsel Berinte gritas dan Melaya ni	Pengenda lian Inflasi



BIDANG URUSAN/PROGR AM/OUTCOME/K EGIATAN/SUBKE GIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTP UT	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket.	
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030			
		Target Kinerja	Pagu (Rp)	Target Kinerja	Pagu (Rp)	Target Kinerja	Pagu (Rp)	Target Kinerja	Pagu (Rp)	Target Kinerj a	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	12 PS	Pro SN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	1 Laporan (Lap hasil integritas dan sinkronis asi perencanaan aan prioritas SDA dan IPTEK)	93,500,000	1 Laporan (Lap hasil integritas dan sinkronis asi perencanaan aan prioritas SDA dan IPTEK)	74,155,390	1 Laporan (Lap hasil integritas dan sinkronis asi perencanaan aan prioritas SDA dan IPTEK)	86,275,975	1 Laporan (Lap hasil integritas dan sinkronis asi perencanaan aan prioritas SDA dan IPTEK)	100,000,000	1 Laporan (Lap hasil integritas dan sinkronis asi perencanaan aan prioritas SDA dan IPTEK)	110,000,000	1 Laporan (Lap hasil integritas dan sinkronis asi perencanaan aan prioritas SDA dan IPTEK)	121,000,000	1 Laporan (Lap hasil integritas dan sinkronis asi perencanaan aan prioritas SDA dan IPTEK)	133,100,000	Sumsel Berinte gritas dan Melaya ni	Pengenda lian Inflasi
Kegiatan Perencanaan Bidang Infrastruktut dan Kewilayahan				100%	768.628.112	100%	701.130.482	100%	1.100.000.000	100%	1.210.000.000	100%	1.331.000.000	100%	1.464.100.000		
Output : Meningkatnya Koordinasi, Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Lintas Sektor	Persentase Program Prioritas Daerah yang Holistik dan Integratif antar Sektor	N/A	323,338,871	100%	215,378,565	100%	209,838,635	100%	350,000,000	100%	385,000,000	100%	423,500,000	100%	465,850,000		
Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	3 Laporan	205,107,589	3 Laporan	89,956,125	3 Laporan	111,255,000	3 Laporan	200,000,000	3 Lapora n	220,000,000	3 Laporan	242,000,000	3 Laporan	266,200,000	Sumsel Berinte gritas dan Melaya ni	Pengenda lian Inflasi
Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	3 Laporan (Jumlah Laporan Koordinasi Komisi Irigasi ; Jumlah Pelaporan Pelaksanaan aan Infrastru ktur; Jumlah Laporan yang disusun)	118,231,282	3 Laporan (Jumlah Laporan Koordinasi Komisi Irigasi ; Jumlah Pelaporan Pelaksanaan aan Infrastru ktur; Jumlah Laporan yang disusun)	125,422,440	3 Laporan (Jumlah Laporan Koordinasi Komisi Irigasi ; Jumlah Pelaporan Pelaksanaan aan Infrastru ktur; Jumlah Laporan yang disusun)	98,583,635	3 Laporan (Jumlah Laporan Koordinasi Komisi Irigasi ; Jumlah Pelaporan Pelaksanaan aan Infrastru ktur; Jumlah Laporan yang disusun)	150,000,000	3 Lapora n (Jumla h Lapora n Koordi nasi Komisi Irigasi ; Jumlah Pelaporan Pelaksanaan aan Infrastru ktur; Jumlah Laporan yang disusun)	165,000,000	3 Laporan (Jumlah Laporan Koordinasi Komisi Irigasi ; Jumlah Pelaporan Pelaksanaan aan Infrastru ktur; Jumlah Laporan yang disusun)	181,500,000	3 Laporan (Jumlah Laporan Koordinasi Komisi Irigasi ; Jumlah Pelaporan Pelaksanaan aan Infrastru ktur; Jumlah Laporan yang disusun)	199,650,000	Sumsel Berinte gritas dan Melaya ni	Pelestaria n Lingkung an dan Pengelola an Sampah



BIDANG URUSAN/PROGR AM/OUTCOME/K EGIATAN/SUBKE GIATAN/OUPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTP UT	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket.	
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030			
		Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerj a	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	12 PS	Pro SN
			(Rp)		(Rp)		(Rp)		(Rp)		(Rp)		(Rp)		(Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
										n yang disusu n)							
Outcome : Meningkatnya Keselarasan Target Indikator Makro Pembangunan Antara Nasional dengan Proviinsi	Persentase Keselarasan Target Indikator Makro Pembangunan Antara Pemerintah Provinsi dengan Nasional	N/A	221,748,435	100%	352,965,128	100%	280,199,970	100%	600,000,000	100%	660,000,000	100%	726,000,000	100%	798,600,000		
Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia				100%	892.088.625	100%	1.044.705.750	100%	1.419.551.000	100%	1.561.506.100	100%	1.717.656.710	100%	1.889.422.381		Penangu ngan Kemiskin an
Output : Meningkatnya Keselarasan Target Pembangunan Daerah dengan Target Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Target Pembangunan Daerah dengan Target Perangkat Daerah	N/A		100%	113,721,177	100%	105,556,030	100%	200,000,000	100%	220,000,000	100%	242,000,000	100%	266,200,000		
Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	-	1 Laporan	55,250,564	1 Laporan	55,000,000	1 Laporan	100,000,000	1 Lapora n	110,000,000	1 Laporan	121,000,000	1 Laporan	133,100,000	Sumsel Berinte gritas dan Melaya ni	



BIDANG URUSAN/PROGR AM/OUTCOME/K EGIATAN/SUBKE GIATAN/OUPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTP UT	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket.	
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030			
		Target Kinerja	Pagu (Rp)	Target Kinerja	Pagu (Rp)	Target Kinerja	Pagu (Rp)	Target Kinerj a	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	12 FS	Pro SN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	-	1 Laporan	58,470,613	1 Laporan	50,556,030	1 Laporan	100,000,000	1 Lapora n	110,000,000	1 Laporan	121,000,000	1 Laporan	133,100,000	Sumsel Berinte gritas dan Melaya ni	Penangu ngan Kemiskin an
Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)				100%	690.166.691	100%	699.587.219	100%	1.110.000.000	100%	1.221.000.000	100%	1.343.100.000	100%	1.477.410.000		
Output : Meningkatkan Keselarasan Target Pembangunan Daerah dengan Target Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Target Pembangunan Daerah dengan Target Perangkat Daerah	N/A	85,500,000	100%	82,694,076	100%	70,485,190	100%	200,000,000	100%	220,000,000	100%	242,000,000	100%	266,200,000		
Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan	28,500,000	1 Laporan	52,097,038	1 Laporan	35,242,595	1 Laporan	100,000,000	1 Lapora n	110,000,000	1 Laporan	121,000,000	1 Laporan	133,100,000	Sumsel Berinte gritas dan Melaya ni	Pengenda lian Inflasi
Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 Laporan	57,000,000	1 Laporan	30,597,038	1 Laporan	35,242,595	1 Laporan	100,000,000	1 Lapora n	110,000,000	1 Laporan	121,000,000	1 Laporan	133,100,000	Sumsel Berinte gritas dan Melaya ni	Pengenda lian Inflasi
Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan				100%	768.628.112	100%	701.130.482	100%	1.100.000.000	100%	1.210.000.000	100%	1.331.000.000	100%	1.464.100.000		



Rancangan RENSTRA BAPPEDA
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN/PROGR AM/OUTCOME/K EGIATAN/SUBKE GIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTP UT	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket.	
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030			
		Target Kinerja	Pagu (Rp)	Target Kinerja	Pagu (Rp)	Target Kinerja	Pagu (Rp)	Target Kinerj a	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	12 PS	Pro SN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Output : Meningkatnya Keselarasan Target Pembangunan Daerah dengan Target Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Target Pembangunan Daerah dengan Target Perangkat Daerah	N/A	136,248,435	100%	156,549,875	100%	104,158,750	100%	200,000,000	100%	220,000,000	100%	242,000,000	100%	266,200,000		
Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	68,248,435	1 Laporan	72,391,125	1 Laporan	50,000,000	1 Laporan	100,000,000	1 Lapora n	110,000,000	1 Laporan	121,000,000	1 Laporan	133,100,000	Sumsel Berinte gritas dan Melaya ni	Stunting
Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1 Laporan	68,000,000	1 Laporan	84,158,750	1 Laporan	54,158,750	1 Laporan	100,000,000	1 Lapora n	110,000,000	1 Laporan	121,000,000	1 Laporan	133,100,000	Sumsel Berinte gritas dan Melaya ni	Pelestaria n Lingkung an dan Pengeloa an Sampah
Outcome : Meningkatnya Pengendalian Proses Perencanaan Pembangunan Daerah	RKPD Tepat Waktu sesuai dengan jadwal yg ditentukan	100%	595,021,771	100%	739,267,308	100%	645,817,147	100%	900,000,000	100%	990,000,000	100%	1,089,000,000	100%	1,131,350,450		
Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia				100%	892.088.625	100%	1.044.705.750	100%	1.419.551.000	100%	1.561.506.100	100%	1.717.656.710	100%	1.889.422.381		
Output : Terlaksananya Tahapan Penyusunan RKPD yang tepat waktu	Persentase Tahapan Penyusunan RKPD yang tepat waktu	100%	177,000,000	100%	239,890,836	100%	173,747,300	100%	300,000,000	100%	330,000,000	100%	363,000,000	100%	399,300,000		



BIDANG URUSAN/PROGR AM/OUTCOME/K EGIATAN/SUBKE GIATAN/OUPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTP UT	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket.	
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030			
		Target Kinerja	Pagu (Rp)	Target Kinerja	Pagu (Rp)	Target Kinerja	Pagu (Rp)	Target Kinerja	Pagu (Rp)	Target Kinerj a	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	12 FS	Pro SN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen (1 Dok RKPD Bidang Pemerint ahan; 1 Dok RKPD Perubaha n Bidang Pemerint ahan)	64,000,000	2 Dokumen (1 Dok RKPD Bidang Pemerint ahan; 1 Dok RKPD Perubaha n Bidang Pemerint ahan)	61,400,437	2 Dokumen (1 Dok RKPD Bidang Pemerint ahan; 1 Dok RKPD Perubaha n Bidang Pemerint ahan)	69,529,340	2 Dokumen (1 Dok RKPD Bidang Pemerint ahan; 1 Dok RKPD Perubaha n Bidang Pemerint ahan)	100,000,000	2 Doku men (1 Dok RKPD Bidang Pemerint ahan; 1 Dok RKPD Perubaha n Bidang Pemerint ahan)	110,000,000	2 Dokumen (1 Dok RKPD Bidang Pemerint ahan; 1 Dok RKPD Perubaha n Bidang Pemerint ahan)	121,000,000	2 Dokumen (1 Dok RKPD Bidang Pemerint ahan; 1 Dok RKPD Perubaha n Bidang Pemerint ahan)	133,100,000	Sumsel Berinte gritas dan Melaya ni	
Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen (1 Dok RKPD Bidang Pembang unan Manusia; 1 Dok RKPD Perubaha n Bidang Pembang unan Manusia)	113,000,000	2 Dokumen (1 Dok RKPD Bidang Pembang unan Manusia; 1 Dok RKPD Perubaha n Bidang Pembang unan Manusia)	178,490,399	2 Dokumen (1 Dok RKPD Bidang Pembang unan Manusia; 1 Dok RKPD Perubaha n Bidang Pembang unan Manusia)	104,217,960	2 Dokumen (1 Dok RKPD Bidang Pembang unan Manusia; 1 Dok RKPD Perubaha n Bidang Pembang unan Manusia)	200,000,000	2 Doku men (1 Dok RKPD Bidang Pemba nguna n Manus ia; 1 Dok RKPD Peruba han Bidang Pemba nguna n Manus ia)	220,000,000	2 Dokumen (1 Dok RKPD Bidang Pembang unan Manusia; 1 Dok RKPD Perubaha n Bidang Pembang unan Manusia)	242,000,000	2 Dokumen (1 Dok RKPD Bidang Pembang unan Manusia; 1 Dok RKPD Perubaha n Bidang Pembang unan Manusia)	266,200,000	Sumsel Berinte gritas dan Melaya ni	Penanggu langan Kemiskin an
Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)				100%	690.166.691	100%	699.587.219	100%	1.110.000.000	100%	1.221.000.000	100%	1.343.100.000	100%	1.477.410.000		
Output : Terlaksananya Tahapan Penyusunan RKPD yang tepat waktu	Persentase Tahapan Penyusunan RKPD yang tepat waktu	100%	224,136,070	100%	267,458,925	100%	211,832,750	100%	250,000,000	100%	275,000,000	100%	302,500,000	100%	332,750,000		



Rancangan RENSTRA BAPPEDA
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN/PROGR AM/OUTCOME/K EGIATAN/SUBKE GIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTP UT	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket.	
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030			
		Target Kinerja	Pagu (Rp)	Target Kinerja	Pagu (Rp)	Target Kinerja	Pagu (Rp)	Target Kinerja	Pagu (Rp)	Target Kinerj a	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	12 PS	Pro SN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen (1 Dok Kerangka Makro Ekonomi Daerah)	167,136,070	1 Dokumen (1 Dok Kerangka Makro Ekonomi Daerah)	236,139,135	1 Dokumen (1 Dok Kerangka Makro Ekonomi Daerah)	174,783,275	1 Dokumen (1 Dok Kerangka Makro Ekonomi Daerah)	200,000,000	1 Dokumen (1 Dok Kerangka Makro Ekonomi Daerah)	220,000,000	1 Dokumen (1 Dok Kerangka Makro Ekonomi Daerah)	242,000,000	1 Dokumen (1 Dok Kerangka Makro Ekonomi Daerah)	266,200,000	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Pengendalian Inflasi
Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen (1 Dok Potensi dan Strategi Pengembangan SDA)	57,000,000	1 Dokumen (1 Dok Potensi dan Strategi Pengembangan SDA)	31,319,790	1 Dokumen (1 Dok Potensi dan Strategi Pengembangan SDA)	37,049,475	1 Dokumen (1 Dok Potensi dan Strategi Pengembangan SDA)	50,000,000	1 Dokumen (1 Dok Potensi dan Strategi Pengembangan SDA)	55,000,000	1 Dokumen (1 Dok Potensi dan Strategi Pengembangan SDA)	60,500,000	1 Dokumen (1 Dok Potensi dan Strategi Pengembangan SDA)	66,550,000	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Pengendalian Inflasi
Kegiatan Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Meningkatnya Koordinasi Sinergis dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sektor			100%	768.628.112	100%	701.130.482	100%	1.100.000.000	100%	1.210.000.000	100%	1.331.000.000	100%	1.464.100.000		
Output : Terlaksananya Tahapan Penyusunan RKPD yang tepat waktu	Persentase Tahapan Penyusunan RKPD yang tepat waktu	100%	193,885,701	100%	231,917,547	100%	260,237,097	100%	350,000,000	100%	385,000,000	100%	423,500,000	100%	465,850,000		
Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	86,274,000	1 Dokumen	82,926,125	1 Dokumen	59,111,500	1 Dokumen	100,000,000	1 Dokumen	110,000,000	1 Dokumen	121,000,000	1 Dokumen	133,100,000	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Pengendalian Inflasi
Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen (1 dok Pengembangan wilayah; Jasa Konsultansi Kajian Dokumen Masterplan Science Techno Park)	107,611,701	2 Dokumen (1 dok Pengembangan wilayah; Jasa Konsultansi Kajian Dokumen Masterplan Science Techno Park)	148,991,422	2 Dokumen (1 dok Pengembangan wilayah; Jasa Konsultansi Kajian Dokumen Masterplan Science Techno Park)	201,125,597	2 Dokumen (1 dok Pengembangan wilayah; Jasa Konsultansi Kajian Dokumen Masterplan Science Techno Park)	250,000,000	2 Dokumen (1 dok Pengembangan wilayah; Jasa Konsultansi Kajian Dokumen Masterplan Science Techno Park)	275,000,000	2 Dokumen (1 dok Pengembangan wilayah; Jasa Konsultansi Kajian Dokumen Masterplan Science Techno Park)	302,500,000	2 Dokumen (1 dok Pengembangan wilayah; Jasa Konsultansi Kajian Dokumen Masterplan Science Techno Park)	332,750,000	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Pelestarian Lingkungan dan Pengelolaan Sampah



BIDANG URUSAN/PROGR AM/OUTCOME/K EGIATAN/SUBKE GIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTP UT	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket.	
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030			
		Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerj a	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	12 PS	Pro SN
			(Rp)		(Rp)		(Rp)		(Rp)		(Rp)		(Rp)		(Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
										men Master plan Scienc e Techn o Park)							
Outcome :Meningkatnya kualitas Evaluasi Hasil Rencana Pembangunan Daerah	Indikator Outcome : Persentase Capaian Target Kinerja Utama Pembangunan Daerah Provinsi > 75%	100%	342,768,589	100%	340,033,485	100%	506,258,774	100%	750,000,000	100%	825,000,000	100%	907,500,000	100%	998,250,000		
Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Capaian Target Program Perangkat Daerah Provinsi bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Minimal 75%			100%	892.088.625	100%	1.044.705.750	100%	1.419.551.000	100%	1.561.506.100	100%	1.717.656.710	100%	1.889.422.381		
Output : Meningkatnya Pemantauan Pelaksanaan Program Prioritas Daerah	Persentase Program Prioritas Daerah Pemantauan Pelaksanaan	N/A	92,925,600	100%	117,130,920	100%	263,982,420	100%	350,000,000	100%	385,000,000	100%	423,500,000	100%	465,850,000		
Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	22,891,000	1 Laporan	58,460,296	1 Laporan	57,762,420	1 Laporan	100,000,000	1 Lapora n	110,000,000	1 Laporan	121,000,000	1 Laporan	133,100,000	Sumsel Berinte gritas dan Melaya ni	
Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	70,034,600	1 Laporan	58,670,624	1 Laporan	206,220,000	1 Laporan	250,000,000	1 Lapora n	275,000,000	1 Laporan	302,500,000	1 Laporan	332,750,000	Sumsel Berinte gritas dan Melaya ni	Penangu ngan Kemiskin an



BIDANG URUSAN/PROGR AM/OUTCOME/K EGIATAN/SUBKE GIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTP UT	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket.	
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030			
		Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerj a	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	12 PS	Pro SN		
			(Rp)		(Rp)		(Rp)		(Rp)		(Rp)		(Rp)			(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perencanaan dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Capaian Target Program Perangkat Daerah Provinsi Bidang Perencanaan dan SDA Minimal 75%			100%	690.166.691	100%	699.587.219	100%	1.110.000.000	100%	1.221.000.000	100%	1.343.100.000	100%	1.477.410.000		
Output : Meningkatnya Pemantauan Pelaksanaan Program Prioritas Daerah	Persentase Program Prioritas Daerah Pemantauan Pelaksanaan	N/A	96,000,000	100%	58,120,440	100%	115,370,354	100%	200,000,000	100%	220,000,000	100%	242,000,000	100%	266,200,000		
Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan bidang Perencanaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan	1 Laporan	48,000,000	1 Laporan	29,916,638	1 Laporan	83,541,595	1 Laporan	100,000,000	1 Lapora n	110,000,000	1 Laporan	121,000,000	1 Laporan	133,100,000	Sumsel Berinte gritas dan Melaya ni	Pengenda lian Inflasi
Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan bidang SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 Laporan	48,000,000	1 Laporan	28,203,802	1 Laporan	31,828,759	1 Laporan	100,000,000	1 Lapora n	110,000,000	1 Laporan	121,000,000	1 Laporan	133,100,000	Sumsel Berinte gritas dan Melaya ni	Pengenda lian Inflasi
Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan			100%	768.628.112	100%	701.130.482	100%	1.100.000.000	100%	1.210.000.000	100%	1.331.000.000	100%	1.464.100.000		
Output : Meningkatnya Pemantauan Pelaksanaan Program Prioritas Daerah	Persentase Program Prioritas Daerah Pemantauan Pelaksanaan	N/A	153,842,989	100%	164,782,125	100%	126,906,000	100%	200,000,000	100%	220,000,000	100%	242,000,000	100%	266,200,000		



BIDANG URUSAN/PROGR AM/OUTCOME/K EGIATAN/SUBKE GIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTP UT	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket.	
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030			
		Target Kinerja	Pagu (Rp)	Target Kinerja	Pagu (Rp)	Target Kinerja	Pagu (Rp)	Target Kinerj a	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	12 FS	Pro SN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan pembangunan bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	101,625,600	1 Laporan	82,426,125	1 Laporan	71,550,000	1 Laporan	100,000,000	1 Lapora n	110,000,000	1 Laporan	121,000,000	1 Laporan	133,100,000	Sumsel Berinte gritas dan Melaya ni	Pengenda lian Inflasi
Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1 Laporan	52,217,389	1 Laporan	82,356,000	1 Laporan	55,356,000	1 Laporan	100,000,000	1 Lapora n	110,000,000	1 Laporan	121,000,000	1 Laporan	133,100,000	Sumsel Berinte gritas dan Melaya ni	Pelestaria n Lingkung an dan Pengelola an Sampah
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Ketersediaan Data Dalam Perumusan Permasalahan Pembangunan	N/A	2,731,526,190	100%	2,987,048,693	100%	2,333,752,964	100%	5,094,503,506	100%	5,968,953,857	100%	6,220,849,243	100%	6,597,934,167		
	Persentase Konsistensi antara Permasalahan dan Isu strategis dengan Program Prioritas Daerah	N/A		100%		100%		100%		100%		100%		100%			
	Persentase Keselarasan Target Indikator Makro Pembangunan Antara Pemerintah Provinsi dengan Nasional	N/A		100%		100%		100%		100%		100%		100%			
	Persentase Keselarasan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Nasional yang diakomodir pada Dokumen Perencanaan Provinsi	N/A		100%		100%		100%		100%		100%		100%			



BIDANG URUSAN/PROGR AM/OUTCOME/K EGIATAN/SUBKE GIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTP UT	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket.	
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030			
		Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerj a	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	12 PS	Pro SN		
			(Rp)		(Rp)		(Rp)		(Rp)		(Rp)		(Rp)			(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Persentase Capaian Target Kinerja Utama Pembangunan Daerah Provinsi > 75%	87,78%		87,83%		87,88%		87,93%		87,98 %		88,03%		88,08%			
Outcome : Meningkatnya Dukungan Data yang berkualitas dalam Perumusan Permasalahan Pembangunan	Indikator Outcome : Persentase Ketersediaan Data Dalam Perumusan Permasalahan Pembangunan	N/A	114,000,000	100%	192,923,105	100%	380,450,000	100%	650,000,000	100%	1,815,000,000	100%	891,500,000	100%	1,530,650,000		
Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				100%	192.923.105	100%	380.450.000	100%	650.000.000	100%	1.265.000.000	100%	891.500.000	100%	1.530.650.000		
Output : Terlaksananya Pengumpulan Data Sesuai SOP	Persentase data sektoral Perencanaan pembangunan daerah yang Tersedia	N/A	114,000,000	100%	24,974,105	100%	247,450,000	100%	500,000,000	100%	550,000,000	100%	605,000,000	100%	665,500,000		
Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi		-	-	-	-	-	-	100,000,000	-	110,000,000	-	121,000,000	-	133,100,000	Sumsel Berinte gritas dan Melaya ni	
Sub Kegiatan Pembinaan dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		-	-	-	-	-	-	100,000,000	-	110,000,000	-	121,000,000	-	133,100,000	Sumsel Berinte gritas dan Melaya ni	



BIDANG URUSAN/PROGR AM/OUTCOME/K EGIATAN/SUBKE GIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTP UT	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket.	
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030			
		Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerj a	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	12 PS	Pro SN
			(Rp)		(Rp)		(Rp)		(Rp)		(Rp)		(Rp)		(Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Sub Kegiatan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	3 Buku (1 Database Profil Pembang unan Daerah Bidang Perekono mian; 1 Database Profil Pembang unan Daerah Bidang Parindag; 1 Database Bidang Infrastru ktur)	114,000,000	3 Buku (1 Database Profil Pembang unan Daerah Bidang Perekono mian; 1 Database Profil Pembang unan Daerah Bidang Parindag; 1 Database Bidang Infrastru ktur)	24,974,105	3 Buku (1 Database Profil Pembang unan Daerah Bidang Perekono mian; 1 Database Profil Pembang unan Daerah Bidang Parindag; 1 Database Bidang Infrastru ktur)	247,450,000	3 Buku (1 Database Profil Pembang unan Daerah Bidang Parindag; 1 Database Bidang Infrastru ktur)	300,000,000	3 Buku (1 Datab ase Profil Pemba nguna n Daera h Bidan g Perek onomi an; 1 Datab ase Profil Pemba nguna n Daera h Bidan g Parind ag; 1 Datab ase Bidan g Infrastru ktur)	330,000,000	3 Buku (1 Database Profil Pembang unan Daerah Bidang Perekono mian; 1 Database Profil Pembang unan Daerah Bidang Parindag; 1 Database Bidang Infrastru ktur)	363,000,000	3 Buku (1 Database Profil Pembang unan Daerah Bidang Parindag; 1 Database Bidang Infrastru ktur)	399,300,000	Sumsel Berinte gritas dan Melaya ni	
Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				100%	192.923.105	100%	380.450.000	100%	650.000.000	100%	1.265.000.000	100%	891.500.000	100%	1.530.650.000		
Output : Tersedianya Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	Persentase Tersediaanya Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	N/A	-	100%	167,949,000	100%	133,000,000	100%	150,000,000	100%	715,000,000	100%	286,500,000	100%	865,150,000		
Sub Kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) (Dokumen)	-	-	1 Dokume n	167,949,000	1 Dokume n	133,000,000	1 Dokume n	150,000,000	1 Doku men	715,000,000	1 Dokume n	286,500,000	1 Dokume n	865,150,000	Sumsel Berinte gritas dan Melaya ni	



BIDANG URUSAN/PROGR AM/OUTCOME/K EGIATAN/SUBKE GIATAN/OUPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTP UT	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket.	
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030			
		Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerj a	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	12 PS	Pro SN
			(Rp)		(Rp)		(Rp)		(Rp)		(Rp)		(Rp)		(Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan			-		1.603.754.700-		1.041.732.964-		2.714.503.506 -		2.785.953.857		3.209.549.243-		2.780.504.167		
Output : Tersedianya Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	Persentase Tersediaanya Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	N/A		100%		100%		100%		100%	550,000,000	100%		100%			
Sub Kegiatan Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah		1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Doku men	550,000,000	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	Sumsel Berinte gritas dan Melaya ni	
Kegiatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah				-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		
Output : Tersedianya Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	Persentase Tersediaanya Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	N/A		100%		100%		100%		100%		100%		100%			
Sub Kegiatan Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	1 Laporan (1 Lap Updating Aplikasi E-monev)		1 Dokumen (1 Dok Updating Aplikasi E-monev)	-	1 Dokumen (1 Dok Updating Aplikasi E-monev)		1 Dokumen (1 Dok Updating Aplikasi E-monev)	-	1 Doku men (1 Dok Updati ng Aplika si E- monev)		1 Dokumen (1 Dok Updating Aplikasi E-monev)	-	1 Dokumen (1 Dok Updating Aplikasi E-monev)	-	Sumsel Berinte gritas dan Melaya ni	
Sub Kegiatan Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	1 Dokumen (1 Dok Data dan Informasi Perencan aan Pembang unan Daerah yang disediaka n)		1 Dokumen (1 Dok Data dan Informasi Perencan aan Pembang unan Daerah yang disediaka n)	-	1 Dokumen (1 Dok Data dan Informasi Perencan aan Pembang unan Daerah yang disediaka n)		1 Dokumen (1 Dok Data dan Informasi Perencan aan Pembang unan Daerah yang disediaka n)	-	1 Doku men (1 Dok Data dan Inform asi Perenc anaan Pembang unan Pemb a n Daera h yang disedia kan)		1 Dokumen (1 Dok Data dan Informasi Perencan aan Pembang unan Daerah yang disediaka n)	-	1 Dokumen (1 Dok Data dan Informasi Perencan aan Pembang unan Daerah yang disediaka n)	-	Sumsel Berinte gritas dan Melaya ni	



BIDANG URUSAN/PROGR AM/OUTCOME/K EGIATAN/SUBKE GIATAN/OUPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTP UT	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket.	
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030			
		Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerj a	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	12 PS	Pro SN		
			(Rp)		(Rp)		(Rp)		(Rp)		(Rp)		(Rp)			(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Sub Kegiatan Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Doku men	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	Sumsel Berinte gritas dan Melaya ni	
Outcome : Meningkatnya Konsistensi antara Permasalahan dan Isu strategis dengan Program Prioritas Daerah	Persentase Konsistensi antara Permasalahan dan Isu strategis dengan Program Prioritas Daerah	N/A	545,603,480	100%	733,093,638	100%	754,332,964	100%	850,000,000	100%	935,000,000	100%	1,028,500,000	100%	1,131,350,000		
Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan			-		1.603.754.700		1.041.732.964-		2.714.503.506 -		2.785.953.857		3.209.549.243-		2.780.504.167		
Output : Meningkatnya Partisipasi Publik dalam Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase rekomendasi Usulan pemangku kepentingan yang terakomodir dalam dokumen perencanaan	N/A	417,800,000	100%	656,600,000	100%	495,000,000	100%	550,000,000	100%	605,000,000	100%	665,500,000	100%	732,050,000		
Sub Kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Publik		1 Berita Acara	-	1 Berita Acara	-	1 Berita Acara	-	1 Berita Acara	-	1 Berita Acara	-	1 Berita Acara	-	1 Berita Acara	-	Sumsel Berinte gritas dan Melaya ni	
Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Provinsi		2 Berita Acara	417,800,000	2 Berita Acara	656,600,000	1 Berita Acara	495,000,000	1 Berita Acara	550,000,000	1 Berita Acara	605,000,000	1 Berita Acara	665,500,000	2 Berita Acara	732,050,000	Sumsel Berinte gritas dan Melaya ni	



BIDANG URUSAN/PROGR AM/OUTCOME/K EGIATAN/SUBKE GIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTP UT	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket.	
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030			
		Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerj a	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	12 PS	Pro SN
			(Rp)		(Rp)		(Rp)		(Rp)		(Rp)		(Rp)		(Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan					1.603.754.700		1.041.732.964		2.714.503.506		2.785.953.857		3.209.549.243		2.780.504.167		
Output : Meningkatnya Koordinasi, Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Lintas Sektor	Persentase Program Prioritas Daerah yang Holistik dan Integratif antar Sektor	N/A	127,803,480	100%	76,493,638	100%	259,332,964	100%	300,000,000	100%	330,000,000	100%	363,000,000	100%	399,300,000		
Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	2 Berita Acara (Forum SKPD; kortekren bang Regional)	127,803,480	2 Berita Acara (Forum SKPD; kortekren bang Regional)	76,493,638	2 Berita Acara (Forum SKPD; kortekren bang Regional)	259,332,964	2 Berita Acara (Forum SKPD; kortekren bang Regional)	300,000,000	2 Berita Acara (Foru m SKPD; kortek renban g Region al)	330,000,000	2 Berita Acara (Forum SKPD; kortekren bang Regional)	363,000,000	2 Berita Acara (Forum SKPD; kortekren bang Regional)	399,300,000	Sumsel Berinte gritas dan Melaya ni	
Outcome : Meningkatnya Keselarasan Target Indikator Makro Pembangunan Antara Nasional dengan Proviinsi	Indikator Outcome :Persentase Keselarasan Target Indikator Makro Pembangunan Antara Pemerintah Provinsi dengan Nasional	100%	604,275,000	100%	771,334,238	100%	726,470,000	100%	1,400,000,000	100%	1,540,000,000	100%	1,694,000,000	100%	1,863,400,000		
Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				100%	1.051.170.888	100%	911.570.000	100%	1.730.000.000	100%	1.918.000.000	100%	2.119.800.000	100%	2.286.780.000		
Ouput : Meningkatnya Keselarasan Target Indikator Makro Pembangunan Antara Proviinsi dan Kabupaten/ Kota	Indikator Output:Persentase Keselarasan Target Indikator Makro Pembangunan Antara Proviinsi dan Kabupaten/ Kota	N/A	529,275,000	100%	592,840,000	100%	680,070,000	100%	1,200,000,000	100%	1,320,000,000	100%	1,452,000,000	100%	1,597,200,000		



BIDANG URUSAN/PROGR AM/OUTCOME/K EGIATAN/SUBKE GIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTP UT	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket.	
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030			
		Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerj a	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	12 PS	Pro SN
			(Rp)		(Rp)		(Rp)		(Rp)		(Rp)		(Rp)		(Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Sub Kegiatan Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi	4 Dokumen (1 Dok Fasilitasi Ranperka da RKPD Kab/Kota 2027, 1 Dok Fasilitasi Perubaha n 2026; 1 Dok Fasilitasi Perubaha n 2026; 1 Dok Evaluasi Kinerja Pembang unan Kab/Kota ; 1 Dok Evaluasi Ranhir Perubaha n RPJMD Kab/Kota 2025- 2030; 1 Dok Hasil Penilaian PPD Sriwijaya Kab/Kota)	529,275,000	5 Dokumen (1 Dok Fasilitasi Ranperka da RKPD Kab/Kota 2027, 1 Dok Fasilitasi Perubaha n 2026; 1 Dok Evaluasi Kinerja Pembang unan Kab/Kota ; 1 Dok Evaluasi Ranhir Perubaha n RPJMD Kab/Kota 2025- 2030; 1 Dok Hasil Penilaian PPD Sriwijaya Kab/Kota)	592,840,000	4 Dokumen (1 Dok Fasilitasi Ranperka da RKPD Kab/Kota 2027, 1 Dok Fasilitasi Perubaha n 2026; 1 Dok Evaluasi Kinerja Pembang unan Kab/Kota ; 1 Dok Hasil Penilaian PPD Sriwijaya Kab/Kota)	680,070,000	4 Dokumen (1 Dok Fasilitasi Ranperka da RKPD Kab/Kota 2027 dan Perubaha n 2026; 1 Dok Evaluasi Kinerja Pembang unan Kab/Kota ; 1 Dok Evaluasi Ranhir Perubaha n RPJMD Kab/Kota 2025- 2030; 1 Dok Hasil Penilaian PPD Sriwijaya Kab/Kota) 1 Dok Evaluasi IUP Kab/Kota ;1 Dok Evaluasi Penyelara san Indikator Makro Kab/Kota ; 1 Evaluasi Program Prioritas Gubernur utk Kab/Kota	1,200,000,000	4 Dokumen (1 Dok Fasilit asi Ranpe rkada RKPD Kab/K ota 2027 dan Peruba han 2026; 1 Dok Evalua si Kinerj a Pemba nguna n Kab/K ota; 1 Dok Evalua si Ranhir Peruba han RPJM D Kab/K ota 2025- 2030; 1 Dok Hasil Penilai an PPD Sriwija ya Kab/K ota);1 Dok Evalua si IUP Kab/Kota ;1 Dok Evaluasi Penyelara san Indikator Makro Kab/Kota ; 1 Dok Evalua si Progra m	1,320,000,000	4 Dokumen (1 Dok Fasilitasi Ranperka da RKPD Kab/Kota 2027 dan Perubaha n 2026; 1 Dok Evaluasi Kinerja Pembang unan Kab/Kota ; 1 Dok Evaluasi Ranhir Perubaha n RPJMD Kab/Kota 2025- 2030; 1 Dok Hasil Penilaian PPD Sriwijaya Kab/Kota);1 Dok Evaluasi IUP Kab/Kota ;1 Dok Evaluasi Penyelara san Indikator Makro Kab/Kota ; 1 Evaluasi Program Prioritas Gubernur utk Kab/Kota	1,452,000,000	4 Dokumen (1 Dok Fasilitasi Ranperka da RKPD Kab/Kota 2027 dan Perubaha n 2026; 1 Dok Evaluasi Kinerja Pembang unan Kab/Kota ; 1 Dok Evaluasi Ranhir Perubaha n RPJMD Kab/Kota 2025- 2030; 1 Dok Hasil Penilaian PPD Sriwijaya Kab/Kota);1 Dok Evaluasi IUP Kab/Kota ;1 Dok Evaluasi Penyelara san Indikator Makro Kab/Kota ; 1 Evaluasi Program Prioritas Gubernur utk Kab/Kota	1,597,200,000	Sumsel Berinte gritas dan Melaya ni	



BIDANG URUSAN/PROGR AM/OUTCOME/K EGIATAN/SUBKE GIATAN/OUPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTP UT	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket.	
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030			
		Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerj a	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	12 FS	Pro SN
			(Rp)		(Rp)		(Rp)		(Rp)		(Rp)		(Rp)		(Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
										Priorit as Guber nur utk Kab/K ota							
Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan			-		1.603.754.700		1.041.732.964-		2.714.503.506		2.785.953.857		3.209.549.243-		2.780.504.167		
Output : Meningkatnya Keselarasan Target Pembangunan Daerah dengan Target Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Target Pembangunan Daerah dengan Target Perangkat Daerah	N/A	75,000,000	100%	178,494,238	100%	46,400,000	100%	200,000,000	100%	220,000,000	100%	242,000,000	100%	266,200,000		
Sub Kegiatan Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	2 Dokumen (1 Dok PK Gubernur dan 1 Dok RKT Provinsi Sumsel Tahun)	75,000,000	2 Dokumen (1 Dok PK Gubernur dan 1 Dok RKT Provinsi Sumsel Tahun)	178,494,238	2 Dokumen (1 Dok PK Gubernur dan 1 Dok RKT Provinsi Sumsel Tahun)	46,400,000	2 Dokumen (1 Dok PK Gubernur dan 1 Dok RKT Provinsi Sumsel Tahun)	200,000,000	2 Doku men (1 Dok PK Guber nur dan 1 Dok RKT RKT Provin si Sumse l Tahun)	220,000,000	2 Dokumen (1 Dok PK Gubernur dan 1 Dok RKT Provinsi Sumsel Tahun)	242,000,000	2 Dokumen (1 Dok PK Gubernur dan 1 Dok RKT Provinsi Sumsel Tahun)	266,200,000	Sumsel Berinte gritas dan Melaya ni	
Outcome : Meningkatnya Keselarasan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Nasional di Provinsi	Indikator Outcome :Persentase Keselarasan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Nasional yang diakomodir pada Dokumen Perencanaan Provinsi	N/A	1,108,107,260	100%	929,443,074	100%	284,500,000	100%	1,764,503,506	100%	1,190,953,857	100%	2,060,049,243	100%	1,516,054,167		



BIDANG URUSAN/PROGR AM/OUTCOME/K EGIATAN/SUBKE GIATAN/OUPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTP UT	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket.	
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030			
		Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerj a	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	12 PS	Pro SN
			(Rp)		(Rp)		(Rp)		(Rp)		(Rp)		(Rp)		(Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan			-		1.603.754.700		1.041.732.964-		2.714.503.506		2.785.953.857		3.209.549.243-		2.780.504.167		
Ouput : Meningkatnya Keselarasan Program Prioritas Nasional dan Daerah	Persentase Keselarasan Program Prioritas Nasional dan Daerah	N/A	1,077,225,000	100%	831,366,824	100%	241,000,000	100%	1,664,503,506	100%	1,080,953,857	100%	1,939,049,243	100%	1,382,954,167		
Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/ RKPD)	2 Dokumen (1 Dok Penyusun an RKPD; 1 Dok Perubaha n RKPD;)	1,077,225,000	3 Dokumen (1 Dok Penyusun an RKPD; 1 Dok Perubaha n RKPD; Dok RPJMD)	831,366,824	2 Dokumen (1 Dok Penyusun an RKPD; 1 Dok Perubaha n RKPD;)	241,000,000	3 Dokumen (1 Dok Penyusun an RKPD; 1 Dok Perubaha n RKPD; Dok Perubaha n RPJMD)	1,664,503,506	2 Doku men (1 Dok Penyu sunan RKPD; 1 Dok Peruba han RKPD;)	1,080,953,857	3 Dokumen (1 Dok Penyusun an RKPD; 1 Dok Perubaha n RKPD; Dok RPJMD) (teknokra tik)	1,939,049,243	3 Dokumen (1 Dok Penyusun an RKPD; 1 Dok Perubaha n RKPD;) (RPJMD 2030- 2035)	1,382,954,167	Sumsel Berinte gritas dan Melaya ni	
Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				100%	1.051.170.888	100%	911.570.000	100%	1.730.000.000	100%	1.918.000.000	100%	2.119.800.000	100%	2.286.780.000		
Ouput : Tersediannya Dukungan Pendanaan Daerah dalam mendukung Prioritas Nasional	Persentase Prioritas Nasional yang di dukung pendanaan	N/A	30,882,260	100%	98,076,250	100%	43,500,000	100%	100,000,000	100%	110,000,000	100%	121,000,000	100%	133,100,000		
Sub Kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	1 Laporan SPIP	30,882,260	1 Laporan SPIP	98,076,250	1 Laporan SPIP	43,500,000	1 Laporan SPIP	100,000,000	1 Lapora n SPIP	110,000,000	1 Laporan SPIP	121,000,000	1 Laporan SPIP	133,100,000	Sumsel Berinte gritas dan Melaya ni	



BIDANG URUSAN/PROGR AM/OUTCOME/K EGIATAN/SUBKE GIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTP UT	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket.	
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030			
		Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerj a	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	12 FS	Pro SN
			(Rp)		(Rp)		(Rp)		(Rp)		(Rp)		(Rp)		(Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Outcome : Meningkatnya kualitas Evaluasi Hasil Rencana Pembangunan Daerah	Persentase Capaian Target Kinerja Utama Pembangunan Daerah Provinsi > 75%	N/A	359,540,450	100%	360,254,638	100%	188,000,000	100%	430,000,000	100%	488,000,000	100%	546,800,000	100%	556,480,000		
Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				100%	1.051.170.888	100%	911.570.000	100%	1.730.000.000	100%	1.918.000.000	100%	2.119.800.000	100%	2.286.780.000		
Output : Meningkatnya Koordinasi Pelaporan Hasil Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan	Persentase Perangkat Daerah yang Menyampaikan laporan Hasil Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan	N/A	23,040,450	100%	48,254,638	100%	70,000,000	100%	80,000,000	100%	88,000,000	100%	96,800,000	100%	106,480,000		
Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	1 Kerja Sama	23,040,450	1 Kerja Sama	48,254,638	1 Kerja Sama	70,000,000	1 Kerja Sama	80,000,000	1 Kerja Sama	88,000,000	1 Kerja Sama	96,800,000	1 Kerja Sama	106,480,000	Sumsel Berinte gritas dan Melaya ni	
Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				100%	1.051.170.888	100%	911.570.000	100%	1.730.000.000	100%	1.918.000.000	100%	2.119.800.000	100%	2.286.780.000		
Output : Meningkatnya Pemantauan Pelaksanaan Program Prioritas Daerah	Persentase Program Prioritas Daerah Pemantauan Pelaksanaan	N/A	336,500,000	100%	312,000,000	100%	118,000,000	100%	350,000,000	100%	400,000,000	100%	450,000,000	100%	450,000,000		



BIDANG URUSAN/PROGR AM/OUTCOME/K EGIATAN/SUBKE GIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTP UT	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket.	
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030			
		Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerj a	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	12 PS	Pro SN		
			(Rp)		(Rp)		(Rp)		(Rp)		(Rp)		(Rp)			(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	17 Laporan (1 lap RAD SDG's; 1 lap RAD Pangan Gizi; 12 LapRealis asi APBD, APBN dan DAK; 2 lap evaluasi renja PD; 1 Lap Updating Aplikasi E-monev)	336,500,000	3 Laporan (1 Laporan Evaluasi RKPD, 1 Laporan Evaluasi Perubaha n RKPD dan 1 Laporan Raker Bappeda Kab/Kota)	312,000,000	3 Laporan (1 Laporan Evaluasi RKPD, 1 Laporan Evaluasi Perubaha n RKPD dan 1 Laporan Raker Bappeda Kab/Kota)	118,000,000	3 Laporan (1 Laporan Evaluasi RKPD, 1 Laporan Evaluasi Perubaha n RKPD dan 1 Laporan Raker Bappeda Kab/Kota)	350,000,000	3 Lapora n (1 Lapora n Evalua si RKPD, 1 Lapora n Evalua si EKPD Peruba han dan 1 Lapora n Raker Bappe da Kab/K ota)	400,000,000	3 Laporan (1 Laporan Evaluasi RKPD, 1 Laporan Evaluasi Perubaha n RKPD dan 1 Laporan Raker Bappeda Kab/Kota)	450,000,000	3 Laporan (1 Laporan Evaluasi RKPD, 1 Laporan Evaluasi Perubaha n RKPD dan 1 Laporan Raker Bappeda Kab/Kota)	450,000,000	Sumsel Berinte gritas dan Melaya ni	



4.3. Rencana Struktur Anggaran APBD Bappeda Provinsi Sumatera Selatan

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029, diperlukan perencanaan struktur anggaran yang terarah, efisien, dan berkelanjutan. Rencana struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ini disusun sebagai kerangka yang mendukung pencapaian sasaran strategis, dengan memperhatikan proyeksi pendapatan daerah, belanja daerah, serta pembiayaan daerah dalam lima tahun ke depan. Tabel 4.3 Menyajikan Rencana Struktur Anggaran APBD Bappeda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2030 sebagai berikut :

Tabel 4.3
STRUKTUR ANGGARAN APBD BAPPEDA PROVINSI SUMATERA
SELATAN TAHUN 2025-2030

KODE REKENING	URAIAN	PAGU INDIKATIF					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
5	Belanja	38.387.144.866	42.299.524.679	59.351.156.206	92.620.151.827	65.892.167.010	72.142.750.711
51	Belanja Operasi	36.721.981.546	40.771.538.067	54.551.156.206	61.455.151.827	65.660.667.010	71.888.100.711
5.1.01	Belanja Pegawai	25.671.883.000	30.410.897.000	34.341.986.700	37.776.185.370	41.553.803.907	45.709.184.298
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.050.098.546	10.360.641.067	20.209.169.506	23.678.966.457	24.106.863.103	26.178.916.413
5.2.	Belanja Modal	1.665.163.320	1.527.986.612	4.800.000.000	31.165.000.000	231.500.000	254.650.000
	Total Belanja	38.387.144.866	42.299.524.679	59.351.156.206	92.620.151.827	65.892.167.010	72.142.750.711

4.4. Uraian Sub Kegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Dalam rangka mendukung pencapaian Program Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, disusun kegiatan dan sub kegiatan yang berorientasi pada peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, perencanaan, pengendalian, serta pelayanan publik. Kegiatan dan sub kegiatan tersebut mencakup proses penyusunan dokumen perencanaan, penguatan sistem informasi pembangunan, fasilitasi perencanaan lintas sektor, hingga pengelolaan administrasi perangkat daerah. Seluruh kegiatan diarahkan untuk memastikan terselenggaranya pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, serta responsif terhadap kebutuhan pembangunan daerah. Berikut ini tabel kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung program prioritas.



Tabel 4.4
Daftar Kegiatan dan Subkegiatan dalam Mendukung Program Prioritas
Pembangunan Daerah

NO.	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5
	Program Perencanaan Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	
			Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	
			Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	
			Pelaksanaan Konsultasi Publik	
			Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	
			Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	
			Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	
			Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
			Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
			Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	
			Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah kabupaten/kota	
			Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	



NO.	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5
			Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
			Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	
			Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	
			Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	
			Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah kabupaten/kota	
			Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	
			Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	
			Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	
			Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang	
			Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi	
	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Daerah 2. Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	



NO.	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5
		3. Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian dan SDA	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	
			Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	



NO.	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan bidang Perekonomian	
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	
			Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	



NO.	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5
			Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	

Melalui pelaksanaan berbagai kegiatan dan sub kegiatan tersebut, diharapkan pencapaian Program Prioritas Sumsel Berintegritas dan Melayani dapat terwujud secara konsisten. Seluruh upaya yang dilakukan tidak hanya mendukung terciptanya pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, tetapi juga mendorong peningkatan efektivitas perencanaan, pengendalian, serta evaluasi pembangunan daerah. Dengan demikian, kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik di Provinsi Sumatera Selatan semakin meningkat, sekaligus memperkuat fondasi bagi keberlanjutan pembangunan daerah.



4.5. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Bappeda
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah yang terarah, terukur, dan akuntabel, diperlukan suatu sistem pengukuran kinerja yang mampu memberikan gambaran sejauh mana tujuan dan sasaran strategis dapat dicapai. Oleh karena itu, dalam dokumen Rencana Strategis Bappeda Provinsi Sumatera Selatan ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU berperan sebagai ukuran strategis yang mencerminkan hasil utama dari pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan, serta menjadi tolok ukur kontribusi Bappeda terhadap pencapaian visi, misi, dan tujuan pembangunan daerah. Dengan adanya IKU proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan dapat dilakukan secara lebih sistematis, transparan, dan berkesinambungan, serta memberikan dasar yang kuat dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah di Provinsi Sumatera Selatan. Lebih rinci mengenai IKU Bappeda Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

No.	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahunan						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
1	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai	96,51	96,55	96,60	96,65	96,70	96,75	96,80	



4.6. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) Bappeda Provinsi Sumatera Selatan

Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagai instrumen pengukuran kinerja, IKK merupakan indikator pada level operasional yang berfungsi untuk menilai capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan secara lebih teknis, sehingga mendukung keterwujudan IKU secara konsisten. Lebih rinci mengenai IKK Bappeda Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci

No.	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahunan						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase Kesesuaian antara Isu Strategis dengan Prioritas Daerah	%	97,30	97,35	97,40	97,45	97,50	97,55	97,60	
2	Persentase Keselarasan Dokumen RPJMD dengan Dokumen RPJMN	%	90,00	90,05	90,10	90,15	90,20	90,25	90,30	
3	Persentase Keselarasan Dokumen RKPD dengan RKP	%	93,20	93,25	93,30	93,35	93,40	93,45	93,50	
4	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	%	N/A	80-100	80-100	80-100	80-100	80-100	80-100	
5	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	%	N/A	80-100	80-100	80-100	80-100	80-100	80-100	
6	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD	%	N/A	80-100	80-100	80-100	80-100	80-100	80-100	
7	Persentase target tujuan dan sasaran pembangunan daerah menjadi target dan sasaran kinerja Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	



No.	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahunan						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
8	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	%	N/A	100	100	100	100	100	100	
9	Persentase Ketersediaan Data Dalam Perumusan Permasalahan Pembangunan	%	N/A	100	100	100	100	100	100	
10	Persentase Konsistensi antara Permasalahan dan Isu strategis dengan Program Prioritas Daerah	%	N/A	100	100	100	100	100	100	
11	Persentase Keselarasan Target Indikator Makro Pembangunan Antara Pemerintah Provinsi	%	N/A	100	100	100	100	100	100	
12	Persentase Keselarasan Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah Nasional yang diakomodir pada Dokumen Perencanaan Provinsi	%	N/A	100	100	100	100	100	100	
13	RKPD Tepat Waktu sesuai dengan jadwal yg ditentukan	%	100	100	100	100	100	100	100	
14	Persentase Capaian Target Kinerja Utama Pembangunan Daerah Provinsi > 75%	%	87.78	87.83	87.88	87.93	87.98	88.03	88.08	
15	Persentase Dokumen PEP yang tersusun	%	91,63	91,68	91,73	91,78	91,83	91,88	91,93	
16	Persentase Dokumen Penganggaran dan Keuangan yang Tersusun	%	100	100	100	100	100	100	100	



No.	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahunan						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
17	Persentase Pelayanan Kepegawaian yang Terlaksana	%	100	100	100	100	100	100	100	
18	Persentase Jenis Tata Kelola BMD Terlaksana	%	100	100	100	100	100	100	100	

BAB 5

PENUTUP

Dalam rangka mendukung arah pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN Tahun 2025–2029, Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Provinsi Sumatera Selatan perlu melakukan penyelarasan terhadap dokumen perencanaan strategis daerah. Penyelarasan ini mencerminkan komitmen daerah terhadap pencapaian tujuan pembangunan nasional dengan tetap memperhatikan kondisi, karakteristik, dan otonomi daerah Sumatera Selatan yang memiliki keragaman geografis, sosial, dan potensi ekonomi yang khas.

Beberapa hal utama yang menjadi dasar dalam penyelarasan ini antara lain adalah periodisasi perencanaan, di mana Renstra PD Sumsel harus selaras dengan siklus perencanaan RPJMN 2025–2029. Selain itu, subkegiatan yang mendukung Kegiatan Prioritas Utama (KPU) dalam RPJMN harus diintegrasikan ke dalam Renstra PD, termasuk proyek-proyek prioritas nasional yang telah ditentukan lokasinya di Sumsel. Misalnya, pengembangan infrastruktur strategis di kawasan Musi Banyuasin dan penguatan ketahanan pangan di OKU Timur yang masuk dalam daftar prioritas nasional.

Kinerja tujuan, sasaran, dan *outcome* yang ditetapkan dalam Renstra PD Sumsel juga perlu diharmonisasikan dengan indikator RPJMN. Hal ini penting agar terdapat kesinambungan antara target pembangunan pusat dan daerah. Dalam konteks Sumsel, indikator-indikator seperti peningkatan angka partisipasi sekolah menengah, penurunan tingkat kemiskinan di wilayah perdesaan, serta peningkatan indeks daya saing daerah menjadi bagian penting dari ukuran kinerja yang harus disesuaikan dengan indikator nasional.

Lebih jauh lagi, Renstra PD Sumsel juga harus mengacu pada indikator kinerja urusan yang bersifat konkuren serta target-targetnya, sebagaimana tercantum dalam RPJMN maupun NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) yang dikeluarkan oleh kementerian/lembaga. Hal ini memastikan bahwa program dan kegiatan daerah tetap berada dalam kerangka kebijakan nasional, sekaligus memberikan ruang bagi inovasi dan adaptasi sesuai kebutuhan lokal Sumatera Selatan, misalnya dalam urusan pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, serta perlindungan.

Selain penyelarasan terhadap arah pembangunan nasional, Rencana Strategis Bappeda Provinsi Sumatera Selatan juga mengarusutamakan lima tema utama pembangunan lintas sektor, yaitu :

1. Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial

Pengarusutamaan gender dan inklusi sosial diarahkan untuk mewujudkan pembangunan yang adil dan setara bagi seluruh kelompok masyarakat, termasuk perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya. Dalam mendukung Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial Bappeda Provinsi Sumatera Selatan telah memberikan fasilitas kamar mandi dan toilet disetiap lantai yang sudah membedakan antara toilet laki-laki dan perempuan, terdapat ruang laktasi untuk ibu menyusui, mushola khusus perempuan di lantai 2, tempat bermain anak serta terdapat tempat parkir khusus untuk penyandang disabilitas.

2. Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan diimplementasikan melalui integrasi prinsip efisiensi sumber daya, pelestarian lingkungan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berimbang. Bappeda Provinsi Sumatera Selatan dengan meninjau kajian KLHS berupaya mengoptimalkan perencanaan pembangunan yang berkelanjutan.

3. Transformasi Digital

Transformasi digital merupakan instrumen penting dalam meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan, kualitas pelayanan publik, serta pengambilan keputusan berbasis data dan teknologi informasi. Dalam tahapan renstra dan arah kebijakan renstra Bappeda Provinsi Sumatera Selatan telah mengarah pada pengembangan perencanaan yang berbasis digital.

4. Pembangunan Rendah Karbon dan Pembangunan Berketahanan Iklim

Dalam upaya mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan tangguh terhadap perubahan iklim, Bappeda Provinsi Sumatera Selatan mengarusutamakan pendekatan Pembangunan Rendah Karbon (PRK) dan Pembangunan Berketahanan Iklim (PBI) ke dalam Rencana Strategis (Renstra) sebagai bagian penting dari arah kebijakan pembangunan daerah. Pengarusutamaan ini merupakan komitmen daerah dalam mendukung implementasi



Rencana Pembangunan Rendah Karbon Nasional dan Rencana Aksi Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API) yang menjadi prioritas nasional sebagaimana tercantum dalam RPJPN 2025–2045 dan RPJMN 2025–2029.

Implementasi pengarusutamaan PRK dan PBI dalam Renstra dilakukan melalui sejumlah strategi, antara lain: penguatan sistem data dan informasi pembangunan rendah karbon dan adaptasi iklim, integrasi indikator hijau dan indikator ketahanan iklim dalam dokumen perencanaan dan penganggaran, serta peningkatan kapasitas teknis perangkat daerah dalam perencanaan berbasis sains dan bukti (*evidence-based planning*). Selain itu, Bappeda juga mendorong sinergi lintas sektor dan kemitraan dengan lembaga mitra seperti WRI Indonesia, ICRAF, dan Lemtara Relung Indonesia, guna memperkuat analisis kebijakan, riset, serta inovasi program yang mendukung pencapaian pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim di daerah.